



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLIKASI PERPECAHAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)
TERHADAP RADIKALISASI KELOMPOK KIRI DI INDONESIA
(STUDI KASUS PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK)**

TESIS

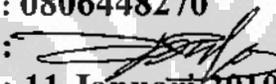
**ARIF WIDIYARTO
NPM : 0806448270**

**PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN**

**JAKARTA
JANUARI, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Arif Widiyanto
NPM : 0806448270
Tanda Tangan : 
Tanggal : 11 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

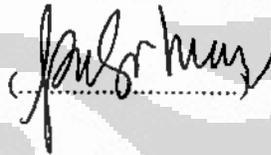
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Arif Widiyanto
NPM : 0806448270
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen
Judul Tesis : Implikasi Perpecahan Partai Rakyat Demokratik (PRD) terhadap Radikalisasi Kelompok Kiri di Indonesia (Studi Kasus Partai Rakyat Demokratik)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Intelijen pada Program Studi Kajian Stratejik Intelijen Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

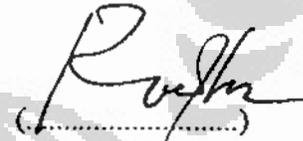
Ketua Sidang : Dra. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.si



Pembimbing : Prof. Dr. Adrianus Meliala, Ph.D

(.....)

Penguji : Dr. Lili Romli, M.Si



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik semesta alam ini. Atas berkat rahmat dan karunia Nya, penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul : Implikasi Perpecahan Partai Rakyat Demokratik (PRD) terhadap Radikalisasi Kelompok Kiri di Indonesia (Studi Kasus Partai Rakyat Demokratik). Penulisan tesis ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar Magister Program Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik dalam proses persiapan, bimbingan penulisan, hingga terselesaikannya tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Bapak Karnadi dan Ibu Sutami, kedua orang tua penulis yang terus menerus memberikan dukungan dan doa kepada penulis; dan Dian Rachmawati, istri penulis yang terus menerus memberikan semangat dan supportnya.
2. Dra. F. Iriani Sopian Yudhoyoko, MSi selaku Ketua Jurusan dan dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, waktu, bimbingan, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Adrianus Meliala, Ph.D selaku pembimbing, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Lili Romli, M.Si. selaku penguji dalam tesis ini sehingga tulisan penulis yang jauh dari sempurna ini memperoleh berbagai masukan yang membangun.
5. Dosen-dosen di Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Intelijen Strategis yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang menjadi bekal berharga bagi penulis, *Men Learn History To Be Wise Before (Irawan Soekarno)*.
6. Sahabat dan rekan-rekan seangkatan, terimakasih atas supportnya.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Namun dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritikan maupun saran yang membangun dari semua pihak, akan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan ini di waktu mendatang. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2011

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERESEITUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Widiyanto
NPM : 0806448270
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Implikasi Perpecahan Partai Rakyat Demokratik (PRD) terhadap Radikalisasi Kelompok Kiri di Indonesia (Studi Kasus Partai Rakyat Demokratik)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2011

Yang menyatakan



(Arif Widiyanto)

ABSTRAK

Nama : Arif Widiyanto
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen
Judul : Implikasi Perpecahan Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Terhadap Radikalisasi Kelompok Kiri di Indonesia (Studi Kasus Partai Rakyat Demokratik).

Pakar politik ekonomi Amerika Serikat Profesor Geoffrey B Hainswort pernah mengatakan bahwa komunisme dan sosialisme sebagai paham dan ideologi tidak akan mati, mereka hanya tertidur lelap. Hal ini pula yang terjadi di Indonesia, pasca hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965 serta semua regulasi tentang larangan paham Marxisme dan Leninisme, kelompok kiri di Indonesia seolah-olah menghilang. Baru pada tahun 1990-an kelompok kiri di Indonesia mulai muncul ke permukaan yang direpresentasikan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Dalam perjalanannya, PRD memiliki dinamika organisasi dan konflik internal yang berujung pada perpecahan gerakan. Sehingga dalam tesis ini, penulis akan mengangkat pertanyaan penelitian: Bagaimana implikasi perpecahan PRD terhadap radikalisasi gerakan kiri di Indonesia? Disamping itu, untuk memperkaya ulasan masalah tersebut, penulis juga akan membahas bagaimana format radikalisasi kelompok kiri di Indonesia pasca perpecahan internal PRD, serta seberapa besar ancaman strategis kelompok kiri di Indonesia pasca perpecahan PRD.

Dalam tesis ini penulis menggunakan metode observasi langsung ke dalam organisasi PRD dengan menjadi aktivis PRD dari tahun 2008, sehingga banyak hal-hal yang ditemukan dengan cara informal tanpa harus melalui jalur formal. Selain itu, penggunaan jurnal, buku-buku, situs internet, serta literatur lain juga dipakai untuk melengkapi data dan fakta tesis ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini selain terpetakannya format gerakan kiri di Indonesia pasca perpecahan PRD, secara umum kita juga bisa melihat implikasi gerakan PRD terhadap berbagai bidang kehidupan di Indonesia (ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya), dan secara khusus kita bisa melihat radikalisasi kelompok kiri di Indonesia baik yang menganut Marxisme-Leninisme, Leon Trotsky, maupun kelompok yang pragmatis-opportunis.

Dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa kelompok kiri di Indonesia sebenarnya masih eksis dalam mempropagandakan sosialisme maupun aliran kiri lainnya. Ancaman strategis dari kelompok kiri dalam berbagai segi kehidupan akan terus berlanjut di masa depan, sehingga perlu kewaspadaan dini terhadap propaganda mereka baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Indonesia.

Kata kunci :
Radikalisasi, Perpecahan PRD, Kelompok kiri

ABSTRACT

Name : Arif Widiyanto
Study Program : Intelligence Strategic Study
Title : Implications Disunity the Peoples Democratic Party (PRD) Against the Radicalization of the Left Group on Indonesia (Case Study of the Peoples Democratic Party)

The United States economic policy expert, Professor Geoffrey B Hainswort once said that communism and socialism as concept and ideology will not die, they just fell asleep. This also happens in Indonesia, after the collapse of the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965 and all regulations on the prohibition Marxism and Leninism, leftist groups in Indonesia seemed to disappear. In 1990s, the leftist group in Indonesia began appear as represented by the Peoples Democratic Party (PRD).

In the process, PRD has an organizational change and internal conflicts that led to the disintegration of the movement. So in this thesis, the author will raise the question: what is the implication of PRD disunity to the radicalization of the left movement in Indonesia? In addition, to enrich the issue, the author will also discuss a leftist radicalization format in Indonesia after the PRD internal divisions, as well as how much the strategic threat of leftist groups in Indonesia after the split of PRD.

In this thesis, the writer use direct observation methods into PRD organization with becoming PRD activist from 2008, so many things that are found in an informal manner without having through formal channels. In addition, the use of journals, books, internet sites, and other literatures are also used to supplement the data and facts of this thesis.

Results obtained from this study in addition to mapped format left movement in Indonesia after the split of PRD, in general we can also see the implications of the PRD movement towards various aspects of life in Indonesia (ideological, political, economic, and socio-cultural), and in particular we can see the radicalization of the left in Indonesia, which adheres to Marxism-Leninism, Leon Trotsky, and groups, are pragmatic-opportunistic.

From this research we can see that the leftist groups in Indonesia actually still exist in the propagation of socialism and other leftist flow. Strategic threat from leftist groups in the various faces of life will continue in the future, so need an early awareness of their propaganda either directly or indirectly to the people of Indonesia.

Keyword :

Radicalization, PRD disunity, the leftist group

DATAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Permasalahan.....	8
1.3 Pembatasan Masalah Penelitian.....	8
1.4 Signifikansi Penelitian.....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6 Tujuan Penelitian.....	9
1.7 Metodologi Penelitian.....	9
1.7.1 Pendekatan Pemikiran.....	9
1.7.2 Pengumpulan Data.....	10
1.8 Sistematika Penulisan.....	11
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Konsep-Konsep yang Dipakai.....	13
2.1.1 Sosialisme.....	13
2.1.2 Radikalisasi.....	15
2.1.3 Marxisme.....	16
2.1.4. Leninisme.....	19
2.1.5 Leon Trotsky.....	21
2.1.6 Pragmatisme.....	23
2.2 Teori-teori.....	24
2.2.1 Radikalisme.....	24
2.2.2 Marxis dan Neo Marxis.....	26
2.2.3 Teori Elit.....	28
2.2.4 Partai Politik.....	31
2.3. Alur Pikir.....	34

3. PROFIL PRD	37
3.1 Sejarah Lahirnya PRD.....	37
3.1.1 Tahap Pertama: Perlawanan terhadap Pemerintahan Soeharto.....	37
3.1.2 Tahap Kedua: Penyatuan Organisasi Perlawanan.....	49
3.1.3 Tahap Ketiga: Pembentukan Persatuan Rakyat Demokratik.....	41
3.1.4 Tahap Keempat: Deklarasi Partai Rakyat Demokratik.....	43
3.1.5 Tahap Kelima: Perjuangan Bawah Tanah.....	44
3.1.6 Tahap Keenam: Perjuangan Parlemeute.....	47
3.2 Para Tokoh PRD.....	49
3.2.1 Budiman Sudjatmiko.....	49
3.2.2 Dita Indah Sari.....	51
3.2.3 Faisol Reza.....	54
3.2.4 Haris Rusli Moti.....	56
3.2.5 Natalia Scholastika.....	57
3.2.6 Kelik Ismunanto.....	58
3.3 Underbow PRD.....	59
3.3.1 Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).....	59
3.3.2 Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).....	63
3.3.3 Sukarelawan Pembela Tanah Air (Spartan).....	64
3.3.4 Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP).....	65
3.3.5 Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).....	66
3.3.6 Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER).....	67
4. AKSI-AKSI DAN PERPECAHAN PRD	68
4.1 Aksi-aksi PRD.....	68
4.1.1 Tahun 1993.....	68
4.1.2 Tahun 1994.....	68
4.1.3 Tahun 1995.....	69
4.1.4 Tahun 1996.....	71
4.1.5 Tahun 1997.....	71
4.1.6 Tahun 1998.....	73
4.1.7 Tahun 1999.....	73
4.1.8 Tahun 2000.....	74
4.1.9 Tahun 2001.....	78
4.1.10 Tahun 2002.....	78

4.1.11 Tahun 2003.....	82
4.1.12 Tahun 2004.....	84
4.1.13 Tahun 2005-2009	86
4.1.14 Tahun 2010	89
4.2. Perpecahan Internal PRD.....	89
4.2.1 Kedekatan Budiman Sudjatmiko dengan Presiden Abdurrahman Wahid	89
4.3.2 Kegagalan PRD dalam Pemilu 2004 dan 2009.....	90
4.3.3 Pro-Kontra Keikutsertaan Beberapa Tokoh PRD dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	92
5. IMPLIKASI GERAKAN PRD TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN RADIKALISASI GERAKAN KIRI DI INDONESIA	93
4.1 Implikasi Pergerakan dan Perpecahan PRD terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia.....	93
4.1.1 Implikasi di Bidang Ideologi.....	93
4.1.2 Implikasi di Bidang Politik.....	95
4.1.3 Implikasi di Bidang Ekonomi.....	97
4.1.4 Implikasi di Bidang Sosial Budaya	97
4.2 Implikasi Perpecahan PRD terhadap Radikalisasi Kelompok Kiri di Indonesia.....	98
4.2.1 Munculnya Kelompok Penganut Marxisme-Leninisme.....	99
4.2.2 Munculnya Kelompok Penganut Leon Trortsky.....	103
4.2.3 Munculnya Kelompok Pragmatis-Opportunis.....	104
6. KESIMPULAN DAN SARA.....	106
6.1 Kesimpulan.....	106
6.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemunculan tiga arus besar gerakan yang berbasis ideologi dunia (kapitalisme, sosialisme-komunisme, dan fasisme) serta perkembangan gerakan sosial dan ilmu pengetahuan yang diikuti oleh munculnya teori-teori baru beserta prediksi-prediksi ilmiah telah membawa wacana gerakan berbasis ideologi dalam perbincangan hangat di kalangan kaum intelektual.¹ Perbincangan ini akan membawa sebuah arus gerakan sekelompok masyarakat yang memiliki pikiran yang sama tentang sebuah ideologi. Di hampir seluruh dunia, gerakan-gerakan massa yang ideologis ini masih terus berjuang dalam mempertahankan eksistensinya walaupun ideologi mereka mendapat larangan dari negaranya, hal ini juga terjadi di Indonesia.

Berbagai macam gerakan berbasis ideologi telah lama berkembang di Indonesia. Gerakan yang merepresentasikan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah diwakili oleh kelompok kiri. Gerakan kelompok kiri di Indonesia bisa dikatakan berjalan di bawah tanah sejak tahun 1965. Bila tahun 1926 dan 1948 penghancuran gerakan kiri dilakukan hanya terbatas pada PKI yang dituding sebagai pelaku pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Republik yang baru lahir Agustus 1945, maka pada tahun 1965 penghancuran gerakan kiri dilakukan secara massif dan sistematis oleh pemerintahan Orde Baru (Orba). Tidak hanya PKI beserta Ormas-ormasnya saja yang dimusnahkan, tetapi hampir semua kekuatan massa dan politik yang menganut paham kiri walaupun dalam prakteknya berseberangan dengan PKI turut serta terkena imbas gerakan pembersihan kekuatan kiri yang dilakukan oleh rezim Orba.²

¹ Li, M. (2009). *A Harmony of Capitalism and Socialism?* hal. 216. Diakses dari www.jstor.com pada 10 November 2010.

² Curaming, R. (2006). Breaking the immortalized past: Anti-communist discourse and politics of reconciliation in post-Suharto Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*. hal. 359-361. Diakses dari www.jstor.com pada 10 November 2010.

Di Indonesia setelah pembersihan politik tahun 1965 tidak ada lagi tersisa kekuatan politik kiri ataupun gerakan sosial kiri. Pembersihan ini dilakukan melalui empat jalur: Politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keempat jalur ini memiliki dampak yang besar dan efektif untuk mencegah kembali kemunculan kekuatan politik kiri di Indonesia.

Di jalur politik, rezim Orba telah mengeluarkan dan memberlakukan TAP MPRS No. XXV tahun 1967 tentang pelarangan ideologi dan ajaran Marxisme-Leninisme di Indonesia. Di jalur sosial budaya deideologisasi masyarakat dilakukan melalui pencitraan negatif tentang sejarah demokrasi liberal 1950-an dan peristiwa 1965. Dalam buku-buku sejarah, film-film dan di bangku-bangku sekolah selalu diperlihatkan tentang keburukan dua periode tersebut. Sementara di jalur ekonomi, keberhasilan sementara rezim Orba dalam pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi telah menciptakan kelas menengah baru yang lebih pragmatis dan apolitis.

Walaupun di pertengahan tahun 1998 gerakan tersebut dianggap berhasil menumbangkan rezim Suharto melalui gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa, fenomena kemunculan gerakan politik kiri tidak terjadi, padahal ruang demokrasi telah terbuka terutama melalui Pemilu 1999. Dari ratusan partai politik yang mendaftarkan diri dan puluhan yang ikut Pemilu hanya satu partai yakni Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang secara eksplisit mewakili kepentingan kekuatan politik kiri.³

Melihat dari uraian di atas, sampai saat ini kita masih bisa mengikuti jargon bahwa ideologi tidak akan pernah mati karena ada dalam pikiran manusia. Jargon tersebut bisa menggambarkan bagaimana ideologi kelompok penganut sosialisme (kemudian dikenal dengan istilah gerakan kiri) di Indonesia yang dalam perjalanannya sejak tahun 1965 sampai dengan saat ini (2010) masih tetap bertahan. Pasca tragedi Gerakan 30 September 1965 yang terindikasi didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), penganut gerakan ini seakan-akan menghilang dari

³ Emmet Kenedy, (2005) "*Ideology*" from Destutt De Tracy to Marx. <http://www.jstor.org/pss/2709242>. Diakses pada 8 November 2010.

Indonesia. Bukan hanya karena kebijakan pemerintah yang melarang ajaran ini berkembang, tetapi juga banyak kajian-kajian yang mengatakan bahwa gerakan kiri akan hilang sejalan dengan globalisasi yang lebih condong ke liberalisme.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, muncul kelompok kiri yang keberadaannya masih menunjukkan eksistensi sampai dengan saat ini, yakni Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD mulai membangun gerakannya pada awal tahun 1990-an dan secara formal dibentuk pada Kongres bulan April 1996, lalu dideklarasikan pada 22 Juli 1996 di Jakarta. PRD merupakan representasi dari kelompok kiri yang ada di Indonesia hingga saat ini karena hampir semua kelompok radikal kiri di Indonesia masih menginduk pada struktur organisasi PRD.

Aktivis-aktivis PRD dikenal memiliki militansi yang tangguh. Militansi ini terbentuk melalui aksi-aksi massa dan pendidikan politik-ideologi di internal PRD. Seorang kader dalam merekrut "anggota" baru melakukan berbagai pendekatan sesuai dengan level sang calon anggota. Terhadap mahasiswa pencinta alam, mereka melakukan pendekatan berbeda dibanding ketika mereka mendekati mahasiswa aktivis pers mahasiswa, aktivis kelompok studi, atau mahasiswa biasa. Demikian juga di sektor petani dan buruh ataupun kaum miskin kota. Pendekatannya tentu berbeda ketika harus merekrut calon dari sektor mahasiswa.

Di sektor mahasiswa, PRD menggunakan isu-isu yang menyangkut kepentingan mahasiswa, yakni hak-hak mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa. Di sektor buruh, PRD mengangkat isu upah, cuti haid, dan serikat buruh independen, sedangkan di sektor petani, mereka mengangkat isu-isu penggusuran, hak atas tanah, dan serikat petani sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan petani.

Aksi unjuk rasa bagi mereka bukan sekadar sarana untuk menuntut atau memprotes sesuatu, tetapi juga sangat penting untuk meningkatkan militansi dan radikalisme.⁴ Selain itu, aksi unjuk rasa juga berfungsi sebagai pendidikan politik secara konkret. Melalui aksi, peserta dihadapkan secara langsung tentang realitas yang sesungguhnya.

⁴ Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda (PRD Melawan Tirani)*, Jakarta: Desantara, Desember 2004. Hal 77.

Dalam hubungannya dengan organisasi lain, keterlibatan tokoh-tokoh PRD dengan organisasi kiri internasional merupakan suatu upaya PRD untuk mencari dukungan internasional, khususnya dari kelompok-kelompok oposisi yang menginginkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Strategi yang digunakan adalah menciptakan kondisi dan memanfaatkan setiap permasalahan menjadi bentuk kerusuhan dengan memanfaatkan pertarungan kepentingan para elit politik, kelompok menengah dan kelompok bawah melalui kegiatan diplomatis maupun aksi radikal. Aksi-aksi radikal seperti mogok makan, pembakaran foto-foto tokoh, sampai dengan memcaci maki presiden merupakan propaganda efektif agar aksi mereka diekspos oleh media massa.

Sejak pemerintahan reformasi di bawah Presiden BJ. Habibie, banyak tahanan politik dan narapidana politik dibebaskan, termasuk tokoh-tokoh PRD. Pembebasan tersebut lebih ditujukan kepada pertimbangan kemanusiaan, dan PRD menilai pembebasan tersebut atas desakan kepentingan politik bahkan desakan dari pihak negara asing. Sehingga momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk propaganda generasi muda tentang manifesto politik PRD. Dalam alinea pertama manifesto politik PRD tertanggal 22 April 1996, dikatakan sebagai berikut:

“Tidak ada demokrasi di Indonesia. Demokrasi -dalam makna kedaulatan rakyat- adalah prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan suatu kekuasaan negara. Selama kedaulatan rakyat masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya sebuah bangsa dan masyarakat, selama itu pula sejarah akan memberikan alat-alat perlawanan untuk menegakkannya.”

Manifesto tersebut menjadi landasan PRD untuk mempropagandakan agenda-agenda gerakannya sampai saat ini. Pada dasarnya PRD selalu menyuarakan tentang kegagalan dan kritik terhadap pemerintahan, yang membedakan adalah cara gerak dan kepentingannya.

Sejak terbentuk sampai saat ini, PRD mengalami masa-masa yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik internal di dalam kelompok tersebut. Mulai dari kedekatan pimpinan PRD dengan pejabat negara, masalah keikutsertaan dalam Pemilu, kesimpulan atas persoalan pokok masyarakat Indonesia, rumusan asas, strategi politik, strategi organisasi, dan bahkan tujuan PRD. Permasalahan-

permasalahan tersebut ternyata bisa dilihat dari perbedaan mazhab yang dianut oleh mereka.

Dari perjalanan politik PRD, terjadinya berbagai konflik internal di atas menyebabkan gerakan PRD terpecah-belah dan membedakan alur gerakan kelompok kiri hingga saat ini. Sebagai contoh adalah saat tahun 2008, beberapa tokoh Komite Pimpinan Pusat (KPP) PRD mendeklarasikan Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD) dengan alasan menolak keikutsertaan beberapa tokoh PRD dalam bursa Calon Legislatif (Caleg) dalam Pemilu tahun 2009 dan tetap memegang asas politik rakyat miskin.⁵ KPRM-PRD dengan tegas menolak pendekatan PRD yang mulai bermain pada tingkatan parlemen dan menganggap meninggalkan kepentingan rakyat miskin.⁶ Selain itu ada juga pecahan PRD yang memilih mengadakan diskusi-diskusi tentang isu-isu aktual yang bertujuan memberikan tekanan kepada pemerintah bahwa seolah-olah akan ada gerakan massa yang besar, namun hal tersebut lebih pada “teror” untuk mendapatkan uang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Perpecahan inilah yang menjadi salah satu perbedaan radikalisasi dari PRD hingga saat ini.

Pergerakan PRD dalam kancah politik nasional terlihat saat Pemilu tahun 2009. Manuver politik PRD (yang kemudian mendeklarasikan Partai Persatuan dan Pembebasan Nasional / Papernas) saat Pemilu 2009 akhirnya gagal karena tidak lolos kualifikasi untuk mengikuti Pemilu 2009. Namun, mereka kemudian berusaha “menyusupkan” wakil-wakil kelompok kiri ke partai yang lolos ke parlemen.⁷ Agus Jabo Priyono, Benediktus Adu, Yusuf Lakaseng, Dita Indah Sari, dan Muhammad Anshar merupakan petinggi-petinggi dalam struktur organisasi PRD yang mengikuti pemilihan calon legislatif dalam Pemilu 2009 dengan “menumpang” Partai Bintang

⁵ Menurut KPRM-PRD, politik rakyat miskin telah dinodai oleh beberapa tokoh PRD yang ikut dalam bursa Caleg pada Pemilu 2009.

⁶ Disampaikan oleh Zelly Ariane (Jubir KPRM-PRD) pada saat pendeklarasian KPRM-PRD tanggal 31 Oktober 2008 di Kantor YLBHI, Jakarta.

⁷ Aulia Asep Ralla, dalam artikel *Waspada! Aktivitas PRD dan Papernas*. www.kabarindonesia.com. Diakses pada 19 November 2010.

Reformasi (PBR).⁸ Walaupun strategi ini akhirnya gagal karena PBR tidak lolos *parlementary threshold*, tetapi ancaman strategis dari kelompok PRD dengan berbagai tingkatan radikalisasinya tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus memperjuangkan sosialisme ditegakkan di Indonesia dengan strategi baru yang terus berkembang seiring dengan dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Inilah yang akan menjadi landasan penulisan tesis ini dilihat dari sudut pandang potensi ancaman strategis radikalisasi kelompok kiri.

1.2 Permasalahan

Berbagai permasalahan sosial yang masih terjadi di Indonesia, seperti pengangguran, eksploitasi buruh, mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan serta terus meningkatnya kemiskinan adalah faktor-faktor yang terus memicu berkembangnya propaganda dari kelompok kiri di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa sosialisme di Amerika Latin terus meningkat karena angka kemiskinan yang besar di negara-negara Amerika Latin.

Dalam hal ini, keberadaan kelompok kiri di Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan eksistensinya, isu "neoliberalisme" yang masif menjelang Pemilu 2009 yang lalu dimanfaatkan kelompok kiri, untuk terus mempropagandakan bahwa penegakan sosialisme di Indonesia sangat diperlukan untuk keluar dari paham liberalisme.

Dalam hal ini sebenarnya radikalisme dari kelompok kiri di Indonesia yang direpresentasikan oleh PRD memiliki derajat radikalisasi yang berbeda-beda tingkatannya. Perpecahan internal dalam tubuh PRD mengakibatkan terjadinya perbedaan radikalisasi gerakan, yang paling tidak ada tiga kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok PRD yang tetap teguh memegang sosialisme dan menolak segala usaha pendekatan ke parlementaris (yang direpresentasikan oleh KPRM-PRD) yang bisa dikategorikan sangat radikal. Kelompok kedua adalah kelompok PRD yang dalam perjalanannya tetap mengkritisi pemerintahan namun sempat mengikuti bursa

⁸ Strategi ini menjadi salah satu sumber perpecahan dalam PRD, karena beberapa tokoh PRD menyatakan bahwa strategi ini adalah upaya untuk mendekat kepada pemerintahan yang tidak berhasil menyejahterakan rakyat.

Caleg dan mengakui keberadaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal⁹ (yang direpresentasikan oleh KPP-PRD) yang dikategorikan radikal. Kelompok ketiga adalah kelompok PRD yang sampai saat ini menggunakan kritikan dan aksi massanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata (direpresentasikan oleh tokoh-tokoh PRD yang mendirikan organisasi baru) yang dikategorikan tidak radikal dan cenderung pragmatis.

Secara umum semua kelompok PRD di Indonesia sampai saat ini masih terus melakukan kritik terhadap pemerintahan yang terlihat dari berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan dan konsolidasi-konsolidasi di tingkatan internal kelompok-kelompok tersebut. Agus Jabo Priyono (Ketua Umum KPP-PRD) pada 16 Oktober 2009 mengungkapkan bahwa kelompok kiri di Indonesia dalam waktu lima tahun ke depan (2009-2014) akan terus mengkampanyekan slogan "hentikan!" sebagai simbol ketidakpuasan kelompok kiri Indonesia terhadap kebijakan pemerintahan saat ini. Hal ini tentu akan menjadi potensi ancaman bagi stabilitas pemerintahan Indonesia ke depan. Wapres Boediono pernah menyampaikan bahawa radikalisme adalah ancaman riil yang bisa menceraiberaikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Karenanya, gejala radikalisme maupun pemikiran mengenai konflik peradaban harus dicegah dan dilawan sekuat tenaga. Kecenderungan ini sangat berbahaya jika dibiarkan berkembang luas.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dalam tesis ini penulis akan merumuskan masalah pokok penelitian, sebagai berikut: **Bagaimana implikasi perpecahan PRD terhadap radikalisasi gerakan kiri di Indonesia?** Disamping itu, untuk memperkaya ulasan masalah tersebut, penulis juga akan membahas bagaimana format radikalisasi kelompok kiri di Indonesia pasca perpecahan internal PRD, serta seberapa besar ancaman strategis kelompok kiri di Indonesia pasca perpecahan PRD.

⁹ Disampaikan dalam Kongres ke-7 PRD di Salatiga, Jawa Tengah, tanggal 1-3 Maret 2010.

¹⁰ Disampaikan Wakil Presiden Boediono dalam pidato: membuka Global Peace Leadership Conference di Hotel Gran Melia, Jl Rasuna Said, Jakarta, 16 Oktober 2010.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada beberapa konflik internal PRD terutama di tahun 2000, 2004, dan 2008, yang akhirnya menyebabkan perpecahan di tubuh PRD. Dari perpecahan tersebut, PRD kemudian memiliki tiga kelompok besar yang merepresentasikan gerakan kiri di Indonesia sampai saat ini. Selain itu, tesis ini akan mengambil rentang waktu dari tahun 1996 (deklarasi resmi PRD) sampai dengan tahun 2010.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dipilihnya PRD sebagai parameter radikalisme kelompok kiri di Indonesia karena pasca bubarnya PKI, PRD adalah cikal bakal organisasi yang beraliran kiri di Indonesia yang terus menunjukkan eksistensinya sampai saat ini. Perpecahan dalam tubuh PRD telah melahirkan berbagai macam organisasi kiri di Indonesia yang masih menunjukkan eksistensinya sampai saat ini. Beberapa penelitian yang ada sebelumnya hanya disampaikan bagaimana radikalisme internal yang ada pada organisasi dan pimpinan-pimpinan PRD sampai dengan sebelum tahun 2008. Sudut pandang penelitian-penelitian tersebut adalah justifikasi tentang radikalisme yang dilakukan PRD dalam melawan pemerintah.

Di sisi lain, saat ini sebagian masyarakat Indonesia menganggap kelompok kiri dengan segala ideologinya telah lenyap dan tidak akan memiliki nilai jual di kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menggambarkan bahwa pasca hancurnya PKI, benih-benih gerakan kiri di Indonesia masih tetap ada di Indonesia dengan segala macam strategi dan taktik propagandanya. Dalam hal ini PRD lah yang secara konsisten melakukan hal tersebut, baik secara disadari maupun tidak disadari oleh masyarakat. Dalam tesis ini yang akan dibahas adalah dampak perpecahan kelompok PRD terhadap radikalisme berbagai macam kelompok kiri di Indonesia sampai dengan saat ini (2010) dilihat dari sudut pandang ancaman strategis kelompok kiri di Indonesia. Selanjutnya, akan diuraikan juga bagaimana pergolakan ideologi yang menyebabkan kelompok PRD bisa terpecah menjadi beberapa kelompok kiri yang merepresentasikan pergerakan kelompok kiri di Indonesia sampai saat ini. Selain itu akan dibahas mengenai implikasi pergerakan

PRD terhadap kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, maupun secara khusus implikasi terhadap radikalisasi gerakan kiri di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian yang dilakukan terbagi dalam tiga kelompok besar PRD, yakni di KPP-PRD pimpinan Agus Jabo Priyono, KPRM-PRD pimpinan Paulus Surya Ginting, dan pecahan PRD lain yang direpresentasikan oleh gerakan Forum Kepemimpinan Pemuda Indonesia (FKPI) pimpinan Haris Rusli (Mantan Ketua KPP-PRD periode 2001-2003).

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan utama untuk mengetahui implikasi perpecahan PRD bagi kelompok kiri di Indonesia saat ini. Implikasi tersebut akan bisa digunakan untuk melihat format radikalisasi kelompok kiri di Indonesia serta melihat seberapa jauh ancaman strategis radikalisasi kelompok kiri di Indonesia.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dalam rangka memberikan penjelasan atas permasalahan (gejala penelitian). Sehingga diperoleh penjelasan yang konsisten sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam suatu disiplin ilmu. Sedang, metode penelitian adalah tata cara yang baku yang berlaku dalam suatu disiplin ilmu untuk melaksanakan kegiatan penelitian sehingga dapat diperoleh penjelasan permasalahan yang diteliti yang konsisten.¹¹

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang diteliti. Menurut Straus dan Corbin, pendekatan ini digunakan

¹¹ Mustofa. Prof. Dr., *Materi kuliah Metodologi Riset*. Jakarta: UI, 2008.

untuk mempelajari dan membuka apa yang terjadi dibalik setiap fenomena yang baru sedikit diketahui.¹² Pendekatan kualitatif akan memudahkan dalam menganalisa karena bisa menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitik, yakni berusaha menuturkan, menganalisa atau menafsirkan serta mengkalasifikasikan data-data yang ada.¹³ Data-data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa pola dan struktur yang pada obyek penelitian atau sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu partai kebangkitan bangsa.

Pertimbangan lain, karena metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan gejala yang kompleks, metode ini akan menyajikan secara langsung akibat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan catatan, hubungan tersebut tidak mempengaruhi obyektifitas peneliti dalam melakukan telaah atau analisis terhadap data-data dan informasi yang ada. Selain itu, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman dan pengaruh secara bersama-sama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁴

1.7.2 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif maka data yang di kumpulkan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian langsung di dalam organisasi PRD serta wawancara mendalam dengan beberapa nara sumber terkait permasalahan dalam tesis ini. Sedangkan sumber data sekunder antara lain buku, majalah, jurnal, internet, media cetak dan elektronik.

Mengingat pergerakan dari PRD banyak yang tertutup, maka penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara ikut menjadi aktivis PRD (pengamatan

¹² Straus A. and J. Corbin.. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. 1990.

¹³ Anton Bakler dan Achmad Charis. *Metodologi penelitian Filsafat*. Kanisius, Yogyakarta, 1990.

¹⁴ Matthew B. Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

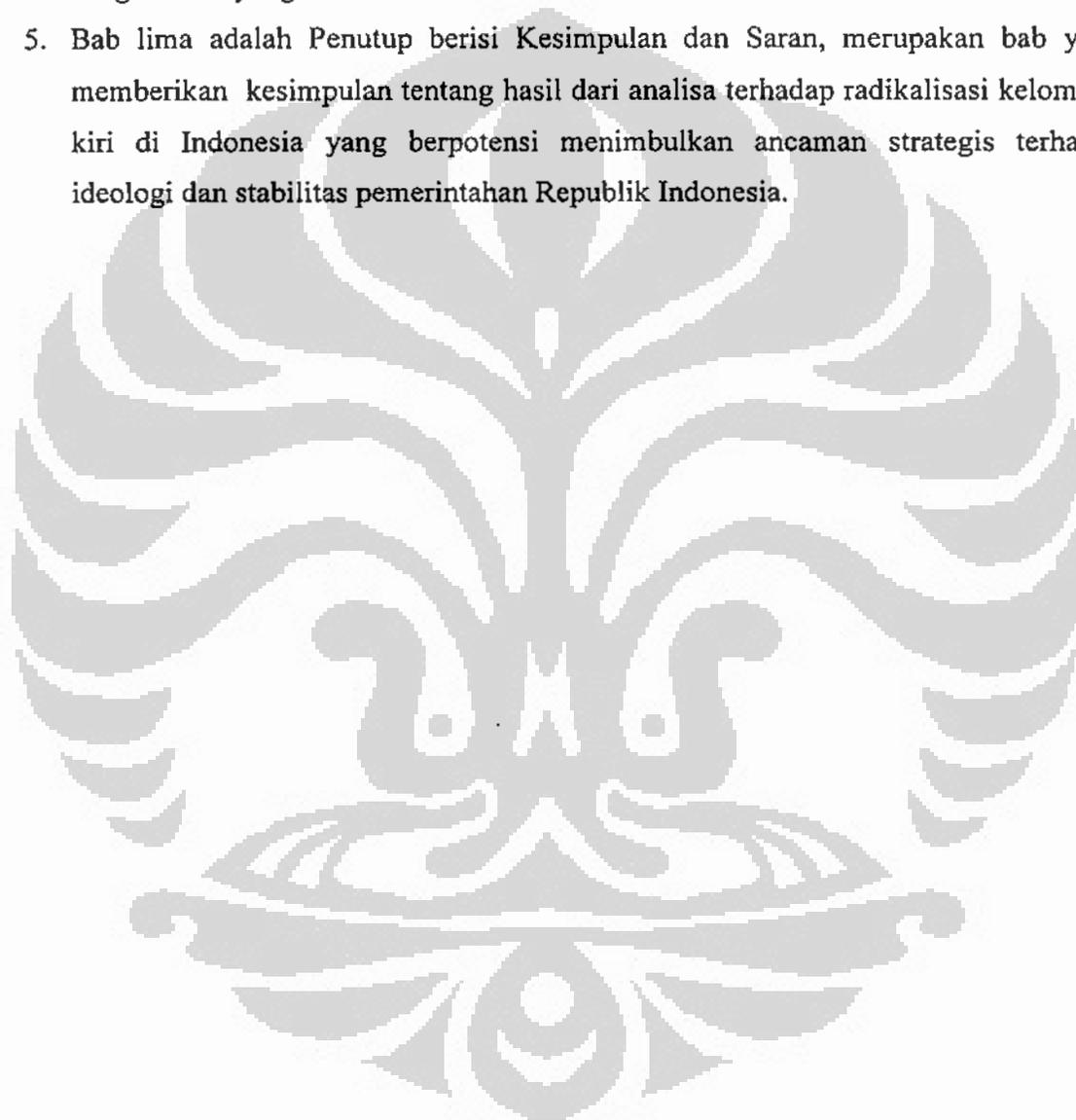
terlibat) di Jakarta dari tahun 2008 sampai sekarang (2010) untuk mengetahui seluk beluk PRD, tokoh-tokoh, dan aktivitas mereka. Hambatan yang dihadapi terkait pada permasalahan narasumber yang benar-benar mengerti soal perpecahan dan perbedaan ideologi yang terjadi dalam tubuh PRD. Selain itu, perpecahan PRD ini menyebabkan mereka tidak mau melakukan aktivitas secara bersama-sama dan cenderung bermusuhan. Penulis menggunakan tiga narasumber utama, yakni Rudi Hartono (KPP-PRD), Zelly Ariane (KPRM-PRD), dan Haris Rusli (FKPI / Mantan Ketua Umum PRD). Hambatan lain yang dihadapi adalah permasalahan perbedaan persepsi ideologi, karena setiap pihak menyatakan bahwa apa yang dianut dan diyakini soal ideologinya adalah yang paling benar. Rudi Hartono adalah seorang aktivis yang lama membidangi Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di KPP-PRD. Zelly Ariane adalah seorang yang terus menyuarakan paham Marxisme-Leninisme dari awal berdirinya PRD, dan kemudian memisahkan diri dari KPP-PRD karena menganggap KPP-PRD telah melenceng dari perjuangan penegakan sosialisme di Indonesia. Dirinya juga beberapa kali pernah melakukan studi banding ke negara lain seperti Venezuela dan Philipina untuk memperdalam masalah sosialisme. Haris Rusli merupakan tokoh aktivis yang sampai sekarang masih eksis dalam demonstrasi dan diskusi di berbagai tempat. Dirinya saat ini menjadi koordinator Petisi 28 yang masih terus mengkritisi semua kebijakan pemerintah.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

1. Bab pertama adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian.
2. Bab dua berisi Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu, meliputi teori radikalisme, teori kepentingan, teori elit, dan teori pergerakan sosial.
3. Bab tiga akan membahas Profil PRD yang berisi latar belakang pembentukan, tokoh-tokoh dan perpecahan yang dialami PRD. Dalam bab ini akan dibahas apa saja faktor yang melatarbelakangi pembentukan PRD dan mengapa di beberapa momentum Pemilu terjadi perpecahan.

4. Bab empat adalah Analisa atau Pembahasan, yang akan menguraikan implikasi aktivitas PRD secara umum maupun secara khusus implikasi perpecahan PRD terhadap radikalisasi kelompok kiri di Indonesia yang akhirnya bisa menjelaskan format radikalisasi kelompok kiri dengan perbedaan pandangan mengenai mazhab dengan teori yang ada.
5. Bab lima adalah Penutup berisi Kesimpulan dan Saran, merupakan bab yang memberikan kesimpulan tentang hasil dari analisa terhadap radikalisasi kelompok kiri di Indonesia yang berpotensi menimbulkan ancaman strategis terhadap ideologi dan stabilitas pemerintahan Republik Indonesia.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang akan diuraikan dalam bab ini terkait dengan konsep-konsep yang akan digunakan dalam tesis ini, teori-teori yang dipakai, serta diakhiri dengan alur pikir tesis ini.

2.1 Konsep-Konsep yang Dipakai

2.1.1 Sosialisme

Sosialisme (*sosialism*) secara etimologi berasal dari bahasa Perancis sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar 1830. Umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam arti tersebut ada empat macam aliran yang dinamakan sosialisme: (1) sosial demokrat, (2) komunisme, (3) anarkhisme, dan (4) sinkalisme. Sosialisme ini muncul kira-kira pada awal abad 19, tetapi gerakan ini belum berarti dalam lapangan politik. Baru sejak pertengahan abad 19 yaitu sejak terbit bukunya Marx, *Manifes Komunis* (1848), sosialisme itu seakan-akan sebagai faktor yang sangat menentukan jalannya sejarah umat manusia.¹⁵

Istilah “sosialis” atau negara sosial demokrat digunakan untuk menunjuk negara yang menganut paham sosialisme “moderat” yang dilawankan dengan sosialisme “radikal” untuk sebutan lain bagi “komunisme”. Hal ini ditegaskan mengingat dalam proses perkembangannya di Negara Barat yang pada mulanya menganut paham liberal-kapitalis berkembang menjadi Negara sosialis (sosialis demokrat).¹⁶ Perbedaan yang

¹⁵ Alfian . *Ideologi , Idealisme dan Integrasi Nasional* , dalam Yahya Muhaimin , Masalah- masalah Pembangunan Politik . Yogyakarta, 1976. Hal 15.

¹⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Sosial* . Jakarta, 1975. Hal 19-21.

paling menonjol antara sosialis-demokrat dan komunisme (Marxisme-Leninisme) adalah sosial demokrat melaksanakan cita-citanya melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan, sebaliknya Marxisme-Leninisme melalui revolusi.

Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan (pandangan hidup) tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata.¹⁷ Dalam membahas sosialisme tidak dapat terlepas dengan istilah Marxisme-Leninisme karena sebagai gerakan yang mempunyai arti politik, baru berkembang setelah lahirnya karya Karl Marx, Manifesto Politik Komunis (1848). Dalam edisi bahasa Inggris 1888 Marx memakai istilah "sosialisme" dan "komunisme" secara bergantian dalam pengertian yang sama. Hal ini dilakukannya sebab Marx ingin membedakan teorinya yang disebut "sosialisme ilmiah" dari "sosialisme utopia" untuk menghindari kekaburan istilah dua sosialisme dan juga karena latarbelakang sejarahnya. Marx memakai istilah "komunisme" sebagai ganti "sosialisme" agar nampak lebih bersifat revolusioner.¹⁸

Dalam perkembangannya, Lenin dan Stalin berhasil mendirikan negara "komunis". Istilah "sosialis" lebih disukai daripada "komunis" karena dirasa lebih terhormat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka menyebut masa transisi dari Negara kapitalis ke arah Negara komunis atau "masyarakat tidak berkelas" sebagai masyarakat sosialis dan masa transisi itu terjadi dengan dibentuknya "Negara sosialis", kendati istilah resmi yang mereka pakai adalah "negara demokrasi rakyat". Di pihak lain Negara di luar "Negara sosialis", yaitu Negara yang diperintah oleh partai komunis, tetap memakai sebutan komunisme untuk organisasinya, sedangkan partai sosialis di Negara Barat memakai sebutan "sosialis demokrat".¹⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisme sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui

¹⁷ Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme*. Bandung, 1986, hal. 309.

¹⁸ Sutarjo Adisusilo. *Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX*. Yogyakarta, 1991. Hal 127.

¹⁹ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bandung, 1984. Hal 5.

jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan. Dalam hal ini, sampai saat ini PRD beserta semua pecahan dan *underbow* nya secara ideologis masih beranggapan bahwa sosialisme harus ditegakkan di Indonesia, yang menjadi perbedaan adalah mahzab dan radikalismenya.

2.1.2 Radikalisasi

Radikalisasi adalah sebuah proses untuk menjadi radikal. Dalam hal ini, radikal yang dimaksud terkait dengan gerakan radikal dalam bidang politik. Gagasan tentang radikalisme politik telah lama dikaitkan, utamanya dengan pemikiran sosialis. Menjadi seorang "radikal" berarti memiliki pandangan tertentu tentang kemungkinan-kemungkinan yang lekat dengan sejarah, dengan kata lain radikalisme berarti melepaskan diri dari cengkeraman masa lalu. Sebagian kaum radikal merupakan kaum revolusioner. Menurut mereka, revolus yang dapat menghasilkan perbedaan tajam yang mereka perjuangkan dengan prestasi dan capaian masa lalu.

Namun, gagasan tentang revolusi tidak pernah menjadi ciri utama radikalisme politik. Ciri ini terkandung dalam progresivismenya. Sejarah hadir untuk dikuasai, untuk dibentuk sesuai dengan tujuan-tujuan manusia, sedemikian rupa sehingga keuntungan-keuntungan dapat dikembangkan dan diorganisasikan demi kemanfaatan bersama.

Radikalisme yang membongkar segala sesuatu hingga ke akar-akarnya tidak hanya berarti menghadirkan perubahan tetapi juga mengontrol perubahan tersebut sehingga dapat mendorong sejarah maju ke depan. Proyek inilah yang kini tampaknya telah luput dan terlupakan. Sebagian pihak mengatakan probabilitas perubahan radikal telah lenyap. Sejarah telah mencapai titik akhir sedangkan sosialisme sudah sangat jauh ketinggalan.

Namun, tidaklah dapat dinyatakan bahwa jauh dari kemungkinan telah tertutupnya perubahan kita justru sedang mengalami kejenuhan oleh kemungkinan-kemungkinan tersebut. Karena sesungguhnya, telah tercapai satu titik ketika perubahan yang tiada henti tidak hanya merisaukan, tetapi juga merusak dalam artian positif dan dalam banyak bidang kehidupan sosial dapat diyakini ternyata titik kerisauan ini benar-benar telah tercapai.

Komunisme merupakan sebuah bentuk dogmatisme otoriterianisme yang bersumber dari pengkhianatan revolusi. Sedangkan sosialisme reformis sejenis yang dijumpai di Eropa Barat beringsut mundur dengan berupaya mengakomodasi kapitalisme, bukannya melampaui dan mengunggulinya. Namun, tesis ini sangat mengada-ada dan kaum sosialis sebagian besar terpojokkan pada sisi defensif. Posisi mereka dalam baris terdepan sejarah pun merosot pada tugas yang lebih mudah, yaitu melindungi institusi-institusi kesejahteraan.

Tentu saja kaum radikal di sayap kiri memang menempuh arah lain yang menjadi incarannya: menuju gerakan-gerakan sosial baru, semisal gerakan-gerakan yang berkaitan dengan feminisme, ekologi, perdamaian atau hak-hak asasi manusia.

Dilihat secara komprehensif, kerangka konseptual politik radikal yang dikembangkan PRD dapat dilihat dari sudut pandang realisme utopia dan dalam kaitannya dengan empat dimensi utama modernitas. Memerangi kemiskinan, baik absolut maupun relatif; memulihkan kerusakan lingkungan; melawan kekuasaan yang sewenang-wenang; mengurangi peran kekuatan dan kekerasan dalam kehidupan sosial. Inilah konteks realisme utopia yang berfungsi sebagai pemandu.

2.1.3 Marxisme

Secara garis besar, Marx menawarkan sebuah teori tentang masyarakat kapitalis berdasarkan citranya mengenai sifat mendasar manusia. Marx meyakini bahwa manusia pada dasarnya produktif. Artinya, untuk bertahan hidup manusia perlu bekerja dengan mengeksploitasi alam. Dengan bekerja seperti itu, mereka menghasilkan makanan, pakaian, peralatan, perumahan, dan kebutuhan lain yang memungkinkan mereka hidup. Produktivitas mereka bersifat alamiah, yang memungkinkan mereka mewujudkan dorongan kreatif mendasar dan yang mereka miliki. Dorongan ini diwujudkan bersama-sama dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, mereka perlu bekerja sama untuk menghasilkan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk hidup.²⁰

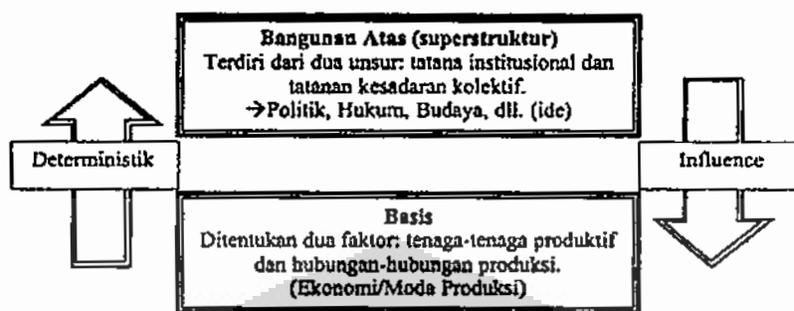
²⁰ Ritzer & Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, 2003. Hal 31-34.

Pendekatan teoritis Marx yang menekankan pada proses konflik, umumnya dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan teori fungsional. Keberadaan subyektif dari masyarakat, menurut Marx, adalah keanggotaan manusia dalam masyarakat, dimana termasuk di dalamnya aparatus teknologi dan budaya yang menunjang masyarakat dan yang memungkinkan masyarakat hidup, serta bermanfaat untuk membedakan pribadi manusia yang memberikan kemanusiaan kepada individu itu. Materialisme Marx dan penekanannya pada sektor ekonomi menyebabkan pemikirannya sejalan dengan pemikiran kelompok ekonomi politik (seperti Adam Smith dan David Richardo).

Pada dasarnya, premis inilah yang menyebabkan Marx merumuskan teori nilai tenaga kerja. Dalam teori ini, Marx menegaskan bahwa keuntungan kapitalis menjadi basis eksploitasi tenaga kerja. Kapitalis melakukan muslihat sederhana dengan membayar upah tenaga kerja kurang dari selayaknya yang mereka terima. Nilai surplus ini, yang disimpan dan diinvestasikan kembali oleh kapitalis, merupakan basis dari seluruh sistem kapitalis. Sistem kapitalis tumbuh melalui tingkatan eksploitasi terhadap tenaga kerja yang terus-menerus meningkat (dan karena itu jumlah nilai surplus pun terus meningkat) dengan menginvestasikan keuntungan untuk mengembangkan sistem.

Perbedaan yang menonjol dari teori Marx adalah mengenai landasan filosofisnya. Teoritis Marx sangat dipengaruhi oleh filsafat Hegel yang lebih menganut dialektika ketimbang menurut pada hukum sebab-akibat. Orientasi filsafat Marx sendiri adalah materialisme dialektika yang menekankan pada hubungan dialektika dalam kehidupan materil. Dialektika dari Marx, antara lain, dapat membiasakan kita membayangkan pengaruh timbal-balik secara terus-menerus dari kekuatan sosial. Dengan demikian, yang sangat diperhatikan oleh Marx adalah masalah penindasan sistem kapitalis yang dilahirkan oleh Revolusi Industri. Secara tegas, Marx ingin mengembangkan teori yang dapat menjelaskan penindasan ini, dan yang dapat membantu meruntuhkan sistem kapitalis itu sendiri. Perhatian Marx tertuju pada revolusi, yang bertolak belakang dengan perhatian sosiolog konservatif yang menginginkan reformasi dan perubahan secara tertib tanpa merubah sistem yang ada.²¹

²¹ Ritzer, G. & Goodman, D.J. 2003. Op. Cit. Hal 31.



Gambar 1. Determinisme Ekonomi

Gambar di atas menunjukkan faktor-faktor yang menentukan susunan masyarakat. Gambar diatas menjelaskan pokok teori Marx: bahwa perubahan masyarakat merupakan akibat dinamika dalam basis dan bukan dalam bangunan atas. Dari sana di ketahui bahwa negara tidak mungkin menjadi *agent of change*. Bangunan atas baru berubah apabila struktur hak milik berubah (basis). Marx berpendapat bahwa setiap perubahan sosial harus bersifat revolusioner. Hal ini karena kelas-kelas atas berkepentingan untuk mempertahankan posisi mereka, dan menentang perubahan. Sehingga, perubahan baru terjadi apabila kelas-kelas bawah memiliki cukup kekuatan untuk dapat memaksakan perubahan kepada kelas-kelas atas.

PRD adalah satu wajah yang paling menonjol dari radikalisme angkatan muda yang saat itu banyak terjadi dalam wadah kelompok-kelompok diskusi. Secara intelektual para aktivis PRD mengambil Marxisme sebagai landasan berpikir, yakni berpikir untuk melawan. Dari segi praksis mereka mengambil semua jalan yang diperkenankan seperti demonstrasi, dan memelopori pemogokan buruh.²²

Dari uraian di atas, PRD dalam hal ini masih menganggap bahwa aliran Marxisme masih relevan untuk diaplikasikan di Indonesia. Mereka menganggap teori ini dapat menjelaskan penindasan yang masih terjadi di Indonesia, dan berusaha meruntuhkan sistem kapitalis yang dianggap masih dianut oleh pemerintahan saat ini. Penganut Marxisme dalam kalangan PRD berasal dari organisasi KPRM PRD yang anti terhadap kegiatan parlementaris.

²² Daneiel Dhakiade, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta. Hal 725.

2.1.4 Leninisme

Lenin adalah pemimpin golongan Bolshevik dari Partai Sosial Demokrat Rusia di tahun 1903. Selain golongan Bolshevik, partai ini juga memiliki golongan Menshevik. Golongan Menshevik adalah golongan yang setia pada ajaran Marx secara total. Bolshevik, golongan Lenin, menghendaki perubahan dalam teori-teori Marx. Perbedaan ini terlihat terutama dalam dua hal.²³ Pertama, dalam hal kepartaian. Menshevik berpendapat bahwa partai komunis harus berstruktur longgar dan berdasarkan pada massa (basis massa yang luas). Sebaliknya, Lenin beranggapan partai itu harus tersentralisasi, berdisiplin kuat dan terdiri atas revolusioner profesional.

Perbedaan kedua adalah dalam hal memandang tahapan revolusi Marx. Menshevik percaya bahwa proletar harus menunggu revolusi *borjuis* terhadap feodal sebelum melakukan revolusi proletar terhadap *borjuis*. Pada masa itu Rusia memang masih dipimpin oleh seorang Tsar (kaisar).

Lenin menganggap hal itu hanya akan melemahkan semangat proletar. Lenin menginginkan sebuah revolusi yang ditujukan untuk menjatuhkan sekaligus *borjuis* dan tsar. Selain itu, Lenin juga menambahkan tentang peran penting petani dalam revolusi tersebut. Marx kurang menekankan pentingnya peran petani dalam revolusi (mungkin karena Marx mendasarkan teorinya pada nasib buruh di Inggris pascarevolusi industri). Kata Lenin, "Revolusi yang dipimpin oleh kelas pekerja itu akan menghasilkan diktatur demokrasi yang revolusioner dari proletar dan petani." Selain itu, berbeda dengan Marx yang menganggap revolusi akan terjadi sebagai akibat melemahnya kapitalisme (akibat perluasan pasar, produksi gila-gilaan yang berujung pada jatuhnya harga), Lenin justru melihat revolusi bisa terjadi kalau partai mau melakukan revolusi.²⁴

Menurut Marx, sistem kapitalisme yang digunakan negara-negara maju akan menyebabkan produksi melimpah. Karena terlalu banyak barang di pasar, maka harganya akan turun. Untuk mengatasinya, menurut Lenin, kapitalisme melakukan penjajahan, kolonialisme, dan pengendalian ekonomi negara lain.

²³ Lenin, Membangun Kontak Mahasiswa dengan Kelas Pekerja, diterjemahkan dari *Establishing Contacts with The Working Class* dalam *Lenin's Student in Revolution*, Moscow, 1982. Hal 13.

²⁴ Lenin, *Ibid.* hal 17.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, kapitalisme mendapatkan tiga keuntungan, yaitu tenaga kerja yang murah, bahan mentah yang murah, dan pasar baru untuk memasarkan produksinya yang melimpah. Akibat dari dilakukannya hal tersebut adalah terjadinya penindasan dari kelompok kecil kapitalis metropolitan terhadap masyarakatan terbelakang yang sebenarnya lebih banyak jumlahnya. Penindasan ini menyebabkan aliran sumber daya dan keuntungan terjadi satu arah ke negara kaya. Pada akhirnya ini menyebabkan jurang antara negara miskin dengan kaya semakin lebar. Penindasan ini hanya bisa dihentikan dengan revolusi dunia.

Dengan demikian, kapitalis telah berhasil memperlambat arus kehancurannya sendiri, dan oleh karenanya revolusi yang dikatakan Marx tidak juga terwujud meskipun kapitalisme Eropa Barat telah demikian maju. Oleh sebab itu, Lenin kemudian melancarkan revolusi yang terkenal, yaitu Revolusi Oktober 1917, langsung kepada tsar (feodal), bukan kepada *borjuis*, dan tidak dibawah komando kaum *borjuis*.

Revolusi itu berhasil menyingkirkan sekaligus dua musuh proletar, yaitu kaum feodal dan *borjuis*. Ternyata setelah revolusi Rusia terlempar ke dalam situasi *chaos*. Roda perekonomian terhenti, dan jika tetap keras kepala tidak melibatkan *borjuis* dalam sistem ekonomi dan pemerintahan, negara akan kolaps. Oleh karena itu pada tahun 1921 Lenin mulai melancarkan Politik Perekonomian Baru. Perusahaan-perusahaan milik pribadi di beberapa sektor dibenarkan, dan orang-orang yang ahli dalam bidangnya kembali dipakai dengan bayaran besar.²⁵

Dalam sebuah pemikirannya, Lenin memosisikan bahwa hak dari setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri tidak berarti terpisah dari Rusia dari penindasan rakyat oleh Kekaisaran Tsar, namun sebaliknya membawa mereka bersama-sama kedalam sebuah perjuangan perlawanan yang revolusioner melawan *landlord*-isme dan kapitalisme. Sepanjang kaum proletar perhatikan, ada hal mutlak yang tidak dipermasalahkan oleh organisasi-organisasi pekerja yang mengenai garis-garis nasional.

Bagi Lenin, hak untuk menentukan nasib sendiri tidak berarti bahwa kaum pekerja "bertugas membawa suara untuk melakukan hal-hal yang separatis" namun semata-mata untuk berposisi terhadap segala bentuk penindasan nasional dan untuk

²⁵ Lenin, *Ibid*, Hal 21

menentang pemaksaan hak pemakaian tetap dari beberapa bangsa dengan batas dari negara lainnya - hal tersebut, untuk membiarkan rakyat memutuskan membebaskan persoalan.²⁶ Yang merupakan bagian dari hak demokratis, yang oleh kaum Bolshevik pertahankan. Namun kemudian secara tetap, hak tersebut tidak pernah betul-betul diperhitungkan sebagai sesuatu yang mutlak, namun selalu mengebelakangkan kepentingan dari perjuangan kelas dan revolusi dunia. Permasalahan Kebangsaan Kebijakan Lenin bukan dalam bentuk melakukan tindakan separatistis, namun sebuah bentuk penyatuan secara sukarela. Program kaum Bolshevik mengenai permasalahan nasional mempunyai maksud sebagai sebuah persatuan kaum pekerja dan tani dari seluruh bangsa-bangsa di ke-Tsar-an Rusia untuk berevolusi menggulingkan Tsarisme. Ketika para pekerja Rusia telah mengambil alih kekuasaan, mereka menawarkan hak untuk menentukan nasib sendiri kepada bangsa-bangsa yang pada mulanya tertindas, dan mayoritas terbesar rakyat memutuskan untuk tetap bersama dan berpartisipasi secara sukarela dalam Federasi Rusia.

Landasan dari Lenin tentang partai itu harus tersentralisasi, berdisiplin kuat dan terdiri atas revolusioner profesional serta revolusi bisa terjadi kalau partai mau melakukan revolusi menjadi panduan bagi PRD untuk menjadikan partai ini revolusioner. Namun, dalam perjalanan PRD, banyak tokoh-tokoh yang menggunakan strategi dengan “menumpang” partai lain dalam Pemilu, dan hal inilah yang menyebabkan konflik internal di tubuh PRD.

2.1.5 Leon Trotsky

Setelah Lenin, Trotsky adalah pemimpin utama Revolusi Rusia. Kontribusinya terhadap gerakan sosialis internasional dan Marxisme sangatlah besar. Kepemimpinan Trotsky dalam Komite Revolusioner Militer pada November 1917 berperan menjamin kemenangan pemberontakan Bolshevik. Karya klasiknya *History of the Russian Revolution* masih merupakan pemaparan terbaik tentang rangkaian peristiwa menjelang dan sesudah kehancuran dinasti Romanov. Sebagai pendiri Tentara Merah, Trotsky memainkan peran vital dalam mempertahankan revolusi dari kekuatan reaksi. Di

²⁶ Lenin, Ibid, Hal 26

kemudian hari, ia memimpin oposisi terhadap degenerasi Stalinis dan memberikan analisis Marxis terhadap rejim birokratis tersebut.²⁷

Namun, beberapa meyakini bahwa kontribusi terbesarnya kepada Marxisme adalah teori revolusi permanennya, yang dikembangkannya bersama-sama dengan seorang Sosial Demokrat Jerman, Adolph, Helphand (lebih dikenal oleh sejarah sebagai "Parvus") sebelum revolusi Rusia 1905. Meskipun teori tersebut awalnya dirancang untuk menjelaskan berjalannya proses revolusioner di Rusia, Trotsky kemudian mengklaim bahwa itu juga berlaku bagi revolusi-revolusi di semua negeri yang belum terindustrialisasi.²⁸

Menurut Trotsky kaum proletar dengan kekuasaan politiknya harus mengambil sejumlah langkah-langkah sosialis yang praktikal (ini berbeda dengan tuduhan segera menuju sosialisme). Trotsky memberikan sebuah contoh di paragraf selanjutnya, yakni "sosialisasi produksi akan dimulai dari cabang-cabang industri yang memberikan kesulitan-kesulitan paling kecil."²⁹

Bagi Trotsky, di sebuah negeri seperti Rusia dan Indonesia—yang tak punya kelas borjuasi yang kuat—revolusi sosialis harus berlangsung tanpa jeda. Trotsky tak setuju dengan teori bahwa dalam masyarakat seperti Rusia dan Indonesia revolusi berlangsung dalam dua tahap: pertama, tahap "borjuis" dan "demokratis"; kedua, baru setelah itu, "tahap sosialis".

Bagi Trotsky, di negeri yang "setengah-feodal dan setengah-kolonial", kaum borjuis terlampau lemah untuk menyelesaikan agenda revolusi tahap pertama: membangun demokrasi, mereformasi pemilikan tanah, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Maka kaum proletarlah yang harus melaksanakan revolusi itu. Begitu tercapai tujuannya, kelas buruh melanjutkan revolusi tahap kedua, "tahap sosialis".³⁰

²⁷ Farid, Hilmar. *Masalah Kelas dalam Ilmu Sosial Indonesia*, dalam V.R. Hadiz & D. Dakhidae (ed.) *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta, 2006. Hal 145.

²⁸ Farid, Hilmar. *Ibid.* Hal 151.

²⁹ Farid, Hilmar. *Ibid.* Hal 156.

³⁰ Goenawan Mohamad, *Majalah Tempo Edisi Khusus Hari Kemerdekaan*. No.11-17 Agustus 2008, hlm. 20-21.

Pemikiran Trotsky menjadi perdebatan sendiri di internal PRD. Beberapa pihak menganggap bahwa pemikiran Trotsky tentang “langkah-langkah sosialis yang praktikal” dianggap sudah menuju ke pragmatisme politik. Namun sebagian pihak lagi menganggap hal tersebut adalah sebuah keharusan kelompok kiri untuk bisa membangun sosialisme di Indonesia. Oleh karena itu, saat PRD mendeklarasikan berafiliasi dengan Partai Persatuan dan Pembebasan Nasional (Papernas) di Kaliurang, Yogyakarta, tanggal 18-20 Januari 2007, terjadi pro-kontra di dalam tubuh PRD. Sebagian tokoh PRD menganggap bahwa dengan berdirinya Papernas dan diikuti dengan intervensi anggota Papernas dan PRD ke tubuh partai lain sebagai bentuk penyimpangan gerakan dan mengikuti aliran Trotsky.

2.1.6 Pragmatisme

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani *pragma* berarti perbuatan (*action*) atau tindakan (*practise*). *Isme* berarti ajaran, aliran, paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran/aliran/paham yang menekankan bahwa pemikiran itu mengikuti tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme berarti kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Sedangkan pragmatis berarti bersifat praktis dan berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan), mengenai/bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Karena itu, pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar jika membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu benar jika berfungsi. Jadi, pragmatisme dapat dikategorikan ke dalam pembahasan mengenai teori kebenaran.³¹

Pragmatisme bersifat destruktif dan menyebabkan inkonsistensi pada penganutnya. Sikap pragmatis cenderung menempuh segala cara untuk mencapai kepentingannya dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran. Walhasil, sikap pragmatis ini tidak akan memberikan kontribusi apapun dalam menyelesaikan

³¹ Santoso, Listiyanto, dkk. *Epistemologi Kiri*, Jakarta, 2007. Hal 261.

problematika kehidupan, justru sebaliknya (akan mendatangkan bahaya laten) yang mampu merusak nilai-nilai kebenaran.³²

Dalam ranah kehidupan publik yang dianut PRD, pragmatisme politik dianggap hanya melihat kepentingan jangka pendek yang menguntungkan diri dan kelompoknya. Beberapa tokoh dari PRD seolah-olah frustrasi dalam menjalankan program dan tujuan PRD, akhirnya mereka melakukan pergerakan pragmatis yakni menggunakan embel-embel sosialisme untuk mendatangkan keuntungan bagi diri dan kelompok-kelompok baru yang didirikannya. Mereka membuat proposal kepada instansi-instansi tertentu untuk memberikan semacam "teror" melawan kebijakan yang dijalankan pemerintah, dan mengharapkan imbal balik berupa jabatan atau finansial terhadap pribadi dan kelompoknya.

2.2 Teori-Teori

2.2.1 Radikalisme

Secara semantik, radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.³³ Dalam Ensiklopedi Indonesia³⁴ diterangkan bahwa "radikalisme" adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Dalam dua definisi ini "radikalisme" adalah upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis dan ekstrim.

Oleh karena itu, pandangan positif dan negatifnya terhadap radikalisme tentunya terletak pada cara merealisasikan dan mengekspresikannya serta dasar pandang para pengamatnya. Biasanya kaum *establishment* sangat alergi dengan isu radikalisme, berhubung kaum radikal amat gigih menuntut adanya perubahan sosial politik yang berarti pula akan sangat tajam mengoreksi kalangan statusquo. Keinginan adanya

³² Farid, Hilmar. Ibid, Hal 265.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, 1995.

³⁴ Ikhtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1984.

perubahan sosial – politik masih dianggap wajar dan positif bila disalurkan melalui jalur perubahan yang benar dan tidak mengandung resiko instabilitas politik dan keamanan. Dalam makna ini, radikalisme adalah wacana sosial – politik yang positif. Adapun perubahan yang cepat dan menyeluruh (revolusi), selalu diikuti oleh kekacauan politik dan anarkhi, sehingga menghancurkan infra struktur sosial – politik bangsa dan negara yang mengalami revolusi tersebut. Dalam makna ini, radikalisme adalah sebagai pemahaman yang negatif dan bahkan dapat pula dikategorikan sebagai bahaya laten ekstrim kiri ataupun kanan.

Teori radikalisme menurut perkiraan Marx berkaitan dengan adanya pemberontakan kaum buruh terhadap kaum majikan dalam industri yang bersistem kapitalisme. Analisis Marxis terhadap teori ini secara umum tampak hanya mengangkat analisisnya dari permasalahan tataran individual majikan-buruh ke tingkat antar negara. Sehingga negara pusat dapat dianggap kelas majikan, dan negara dunia ketiga sebagai buruhnya. Sebagaimana buruh, ia juga menyarankan, negara pinggiran mestinya menuntut hubungan yang seimbang dengan negara maju yang selama ini telah memperoleh surplus lebih banyak (konsep sosialisme). Analisis Neo-Marxis yang digunakannya memiliki sudut pandang dari negara pinggiran.

Gagasan tentang radikalisme politik telah lama dikaitkan, utamanya dengan pemikiran sosialis. Menjadi seorang "radikal" berarti memiliki pandangan tertentu tentang kemungkinan-kemungkinan yang lekat dengan sejarah--radikalisme berarti melepaskan diri dari cengkeraman masa lalu. Sebagian kaum radikal merupakan kaum revolusioner. Menurut mereka, revolusi--dan mungkin hanya revolusi--yang dapat menghasilkan perbedaan tajam yang mereka perjuangkan dengan prestasi/capaian masa lalu.

Dalam kaitan tesis ini, radikalisme yang dimaksud adalah melakukan gerakan-gerakan dalam kerangka mengkritisi kebijakan pemerintahan yang ada, baik dari sisi penjaminan kesejahteraan sampai dengan kebijakan-kebijakan masalah politik. PRD dalam hal ini selalu menyuarakan tentang ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, PRD selalu menginginkan cara-cara radikal dalam merubah sistem di Indonesia menjadi sosialis.

2.2.2 Teori Marxis dan Neo Marxis

Marxisme menawarkan pendekatan ketiga dalam memahami pola hubungan internasional dan ekonomi. Marxisme diyakini muncul sebagai kritik terhadap perekonomian kapitalis yang cenderung eksploitatif daripada kontributif. Dasar pemikiran Marxisme terletak pada tulisan *das Kapital* oleh Karl Marx. Dalam bukunya Karl Marx menguraikan bahwa keberadaan perekonomian yang eksploitatif kapitalis telah menciptakan struktur kelas dalam hubungan internasional yang diidentikkan dengan konflik kelas, antara pemilik modal (borjuis) dan tidak memiliki modal (proletar). Konflik kelas tersebut pada akhirnya akan diakhiri oleh suatu revolusi dengan cita-cita membentuk negara sosialis (Mingst, 2009).

Banyak orang mulai mendiskreditkan Marxisme setelah Uni Soviet runtuh pada akhir tahun 1991 dan seolah membuktikan paham liberal kapitalisme yang dianut oleh Amerika merupakan juaranya. Akan tetapi akar Marxisme masih hadir di beberapa negara isolasionis seperti Korea utara, Kuba, dan China.

Pandangan Marxisme terhadap kapitalisme yang eksploitatif terdiri dari dua. Pertama, kapitalisme adalah segala sesuatu yang melibatkan produksi yang bisa ditukarkan (jual beli) dipertukarkan untuk hal lain. Intinya setiap barang memiliki nilai termasuk jam kerja orang. Kedua, kapitalisme adalah semua hal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi yang dimiliki oleh kapitalis. Ketiga, pekerja adalah orang yang bebas, akan tetapi untuk bertahan hidup mereka harus menyerahkan ketenagakerjaan pada kapitalis, sedangkan kapitalis adalah yang mengatur hubungan produksi sekaligus menentukan laba yang diberikan oleh pekerja (Hobden dan Jones, 2001).

Dengan perekonomian yang terus menerus meluas dengan dalih menemukan pasar baru dan mendapatkan sumber daya alam, negara maju kapitalislah yang memiliki semua teknologi dan faktor-faktor produksi. Terdapat kecenderungan negara kaya akan semakin kaya dan kuat, sementara kekayaan sumber daya alam negara kecil terkuras dan semakin lama semakin miskin. Teori Marxisme mengungkapkan bahwa globalisasi adalah kendaraan kapitalis yang paling modern saat ini dimana globalisasi sebenarnya untuk meyakinkan bahwa kekuatan dan kemakmuran negara besar terus berlangsung sementara yang miskin tetap miskin.

Struktur hubungan internasional antara negara kuat dan negara kecil ini telah dijelaskan oleh sosiolog, Immanuel Wallerstein (1974) dalam bukunya "*the Modern World-system*". Menurutnya negara besar adalah negara yang memiliki kemampuan bergerak dalam industri skala besar, menguasai teknologi, dalam bukunya Wallerstein menggunakan istilah negara *core*. Sedangkan negara yang terbelakang dalam industri menguasai bahan mentah yang nantinya dieksploitasi oleh negara *core* dilabeli dengan negara *periphery*. Klasifikasi ketiga adalah negara *semiperiphery* yang berada di antara keduanya (Wallerstein, 1974).

Aktor-aktor kunci dalam Marxisme adalah kelas sosial, elite entitas non negara yang *transnational*, dan *multinational corporations*. Pandangan terhadap individu ditentukan oleh aksi kelas-kelas ekonomi. Pandangan terhadap negara, negara bukan merupakan agen yang otonom. Negara akan selalu digerakkan oleh kepentingan pemilik modal. Marxisme menilai sistem internasional sebagai suatu sistem yang sangat hierarkis yang mana hierarki-hierarki tersebut didominasi oleh sistem kapital.

Neo-marxis tidak banyak jauh berbeda dari Marxisme yang diusung oleh Wallerstein, Lenin dan Marx. Perbedaan signifikan sehingga terdapat label "neo" di awal, hanyalah sebagai simbol kritik terhadap teori Sistem Dunia Wallerstein dan pandangan kapitalisme Lenin yang menurut Bill Warren tidak lengkap (*incomplete*). Bill Warren dengan neo-marxisme berusaha mengembalikan Marxisme pada pengertian awal tidak semata-mata mengatakan pandangan buruk Marxisme terhadap kapitalis. Warren menyediakan penjelasan disertai oleh data dari Bank Dunia bahwa perkembangan negara-negara *periphery* Wallerstein tidak bersifat negatif. Jika diperbandingkan dengan kemajuan negara-negara Eropa pada era kolonialisme dan imperialisme, maka negara dunia ketiga lebih banyak kemajuannya.

Pandangan Neo-Marxis tidak hanya berupa kritikan terhadap sistem kapitalisme saja, melainkan menyediakan informasi data statistik menjelaskan hubungan kapitalisme dan dunia ketiga yang semata-mata tidak selalu negatif. Pemikiran neo-marxis diwakili oleh dua orang teoritis, yakni Bill Warren dan Justin Rosenberg. Bill Warren menyediakan penjelasan hubungan kapitalisme dan dunia ketiga, sementara Justin Rosenberg menjelaskan hubungan dunia ketiga dan relasi global sosial.

Kapitalisme merupakan perubahan positif mengakhiri feodalisme di Eropa sekaligus menawarkan tiga hal penting, yakni akses sumber daya alam lebih besar, akses edukasi dan kesehatan lebih baik daripada Eropa di abad pertengahan. Secara keseluruhan, meskipun kapitalisme berdampak buruk secara ekonomi, tetapi Warren menyangkal kapitalisme mengakibatkan kemunduran secara signifikan (Hobden dan Jones, 2001).

2.2.3 Teori Elit

Dalam negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat, sedangkan di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Teori Elite membahas bagaimana kepentingan pribadi dan kelompok mendominasi kepentingan masyarakat. Teori elit adalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite. Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak (*massa*) tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. *Elite theory* berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis tetapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektif. Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970) mengatakan sebagai berikut:

- a. Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai *ruling elite* tersebut,
- b. Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas,
- c. Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima *basic elite consensus* yang dapat diterima,
- d. Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan *ruling elite*, dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan *massa*,
- e. Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan tidak revolusioner,
- f. Kelompok elit lebih banyak mempengaruhi *massa*, dari pada sebaliknya.

Teori elit memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori: (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi masyarakat dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elit*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non-elite*).³⁵

Terdapat dua kategori dalam elit, yaitu elit politik lokal dan elit non-politik lokal.³⁶ Elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Contoh Elit politik: gubernur, bupati, walikota, Ketua DPRD, anggota DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik. Elit non-politik adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non-politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

Dari sisi sirkulasi elit dapat dilihat bahwa konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok yang berbeda serta antara kelompok penguasa dengan kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: *pertama*, pergantian terjadi di antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri; dan *kedua*, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Sementara Mosca melihat bahwa pergantian elit terjadi apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas penguasa yang. Atas dasar dua model sirkulasi tersebut, persaingan dan konflik bisa terjadi antar kelompok yang memerintah maupun antar kelompok pemerintah

³⁵ Surbakti, Ramelan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: 1992. Hal. 145

³⁶ Moruto dan Anwar WMK. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala Dan Pejuang Menuju Demokrasi*. Jakarta: 2002. Hal. 120.

dengan kelompok tandingan yang ingin berkuasa. Duverger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik sejumlah alat digunakan seperti: organisasi dan jumlah uang (kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.

Ide dari modernitas Indonesia adalah mengekspresikan negara ini dengan berbagai jalan untuk memperoleh kemerdekaan dari Belanda, dan setelah kemerdekaan, Partai Komunis lah yang mengklaim dirinya sebagai pelopor modernisasi di Indonesia sampai saat rezim Soeharto yang membabat habis Partai Komunis Indonesia (PKI). Seperti diketahui bahwa Suku Jawa di Indonesia mendominasi segala lini kehidupan, sampai akhirnya suku-suku lain menginginkan adanya bahasa pemersatu yakni Bahasa Indonesia, dari sini lah sebenarnya benih-benih minoritas di Indonesia berani melakukan pergerakan revolusioner untuk menciptakan sebuah modernitas baru di Indonesia.³⁷

Ada beberapa kontribusi yang dilakukan oleh PKI dalam menciptakan modernitas di Indonesia, karena PKI adalah perwakilan generasi muda yang kehilangan koneksi dengan elit politik di Indonesia. Partai ini kemudian membentuk sebuah komunitas dan merekrut dari kalangan religius yang bisa disimpulkan bahwa komunisme adalah ungkapan yang sempurna dalam menggagas modernisasi di Indonesia. PKI akhirnya bubar setelah terjadi kudeta yang gagal tahun 1965, namun kemudian anggota dan simpatisannya melebur menjadi satu dengan masyarakat Indonesia lainnya. Geoffrey Robinson berpendapat bahwa pembunuhan terhadap anggota-anggota PKI tidak bisa menghentikan pergerakan komunis di Indonesia, militer dan pejabat-pejabat Indonesia saat itu patut disalahkan.³⁸

Berdasarkan teori di atas kita dapat melihat ketika kebijakan di suatu negara dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka akan muncul gerakan-gerakan yang menentang, dalam hal ini yang akan dibahas adalah PRD. Hubungan ini juga terlihat jelas ketika muncul isu bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap sebagai pengikut paham neoliberalisme, maka perlawanan PRD

³⁷ Crouch, Harold . Making Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 1997. Hal 560.

³⁸ Crouch, Harold . *ibid.* Hal 561.

semakin menguat karena dilihat dari sejarahnya, gerakan ini memang sangat anti dengan neoliberalisme.

2.2.4 Partai Politik

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Dalam rangka memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, yakni :

1. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
2. R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
3. Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
4. Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama

dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Parpol dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori,³⁹ yaitu:

1. Partai Massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, parta jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri;
2. Partai Kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.

Sedangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, menurut Ichlasul Amal terdapat lima jenis partai politik,⁴⁰ yakni:

1. Partai Proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah perbedaan antara kelompok anggota atau "ins" dengan non-anggota "outs". Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologi masyarakat;
2. Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya,

³⁹ Haryanto: dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah; *Mengenal Teori-Teori Politik*. Cetakan I November 2005, Depok. Halaman 567-568

⁴⁰ Ichlasul Amal. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik* Edisi Revisi. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996

ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat;

3. Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya;
4. Partai Diktatorial, sebenarnya merupakan sub tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa;
5. Partai Catch-all, merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali di kemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai "menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya". Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.

Menurut Peter Schroder, tipologi berdasarkan struktur organisasinya terbagi menjadi tiga macam,⁴¹ yaitu;

1. Partai Para Pemuka Masyarakat, berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang pada umumnya tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat-kandidat tertentu untuk memperoleh suatu mandat;
2. Partai Massa, sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar dengan banyak anggota dengan tujuan utama mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan

⁴¹ Peter Schroder : dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah..op cit.,halaman 572

dan mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta “mempertanyakan kekuasaan”;

3. Partai Kader, partai ini muncul sebagai partai jenis baru dengan berdasar pada Lenin. Mereka dapat dikenali berdasarkan organisasinya yang ketat, juga karena mereka termasuk kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas. Mereka berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa cita-cita PRD adalah sesuai dengan Partai Kader seperti yang disampaikan oleh Peter Schroder. Namun, berbagai kepentingan tokoh dan pengikutnya menyebabkan berbagai konflik yang terjadi di dalam organisasi ini.

2.3 Alur Pikir

Penelitian ini akan menggunakan kerangka pemikiran Intelijen Stratejik, yaitu penelitian yang dimulai dari adanya sebuah ancaman. Sehingga, produk atau hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai upaya penyelamatan terhadap ancaman tersebut.⁴² Penelitian Intelijen Stratejik tidak dimaksudkan untuk diri sang peneliti, melainkan diperuntukkan kepada pengambil kebijakan atau *policy maker*. Agar hasil dari penelitian tersebut dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam memutuskan atau mengambil sebuah kebijakan.

Secara spesifik penelitian intelijen menfokuskan pada empat variabel pokok. *Pertama*; struktur atau organisasi atau instansi intelijen. *Kedua*; tingkah laku agen atau aktor yang terkait dengan intelijen. *Ketiga*; kegiatan operasional intelijen. *Keempat*; produk yang dihasilkan dari institusi intelijen.⁴³ Dalam perkembangan mutakhir permasalahan intelijen makin meluas ke wilayah di luar negara dan bersifat interdisipliner. Penelitian intelijen tidak lagi hanya menfokuskan pada empat variabel

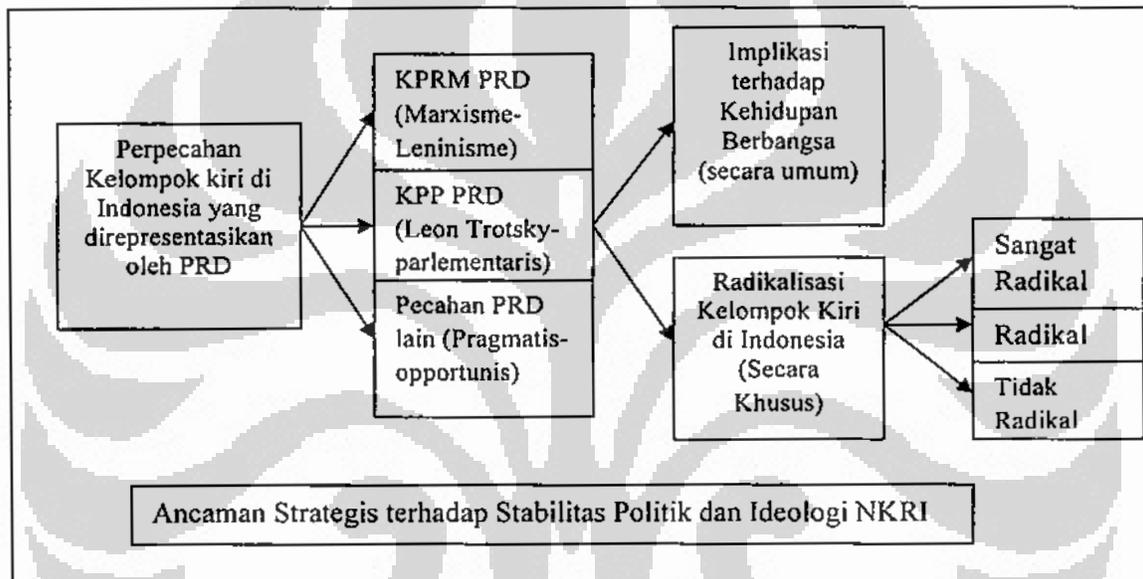
⁴² "Panduan Penulisan Tesis," n.d

⁴³ Ibid, n.d

tersebut. Berbagai hal berkaitan dengan ancaman dan keselamatan suatu negara, korporasi bisnis atau organisasi lainnya dapat menjadi bagian dari penelitian intelijen.

Dalam melakukan studi tentang radikalisme kelompok kiri ini, model analisa yang dipakai adalah dengan menggunakan teori radikalisme, teori kepentingan, dan teori elit, dan teori pergerakan sosial.

Untuk lebih jelasnya peneliti membuat alur pikir seperti gambar dibawah ini.

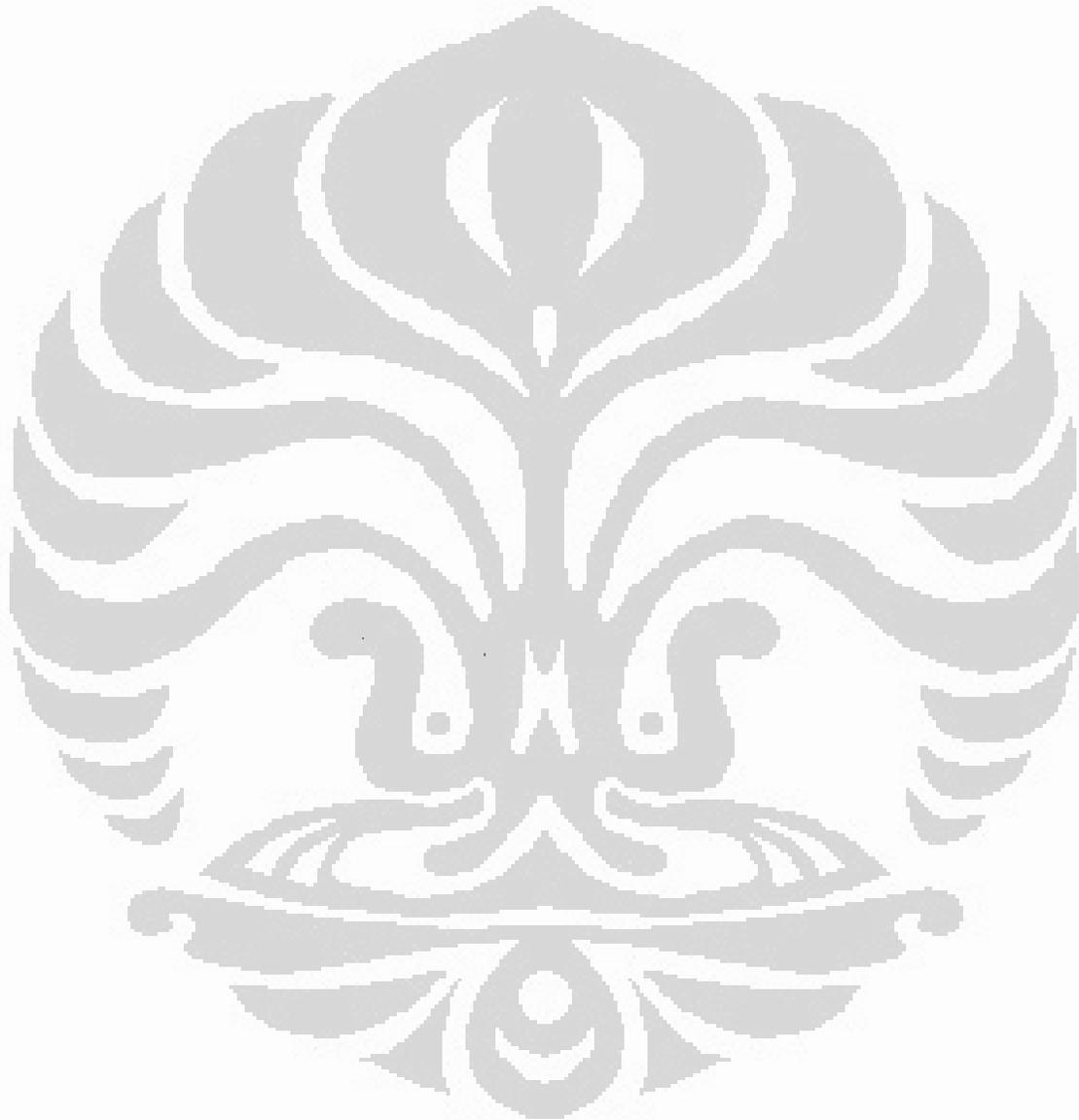


Gambar 2: Alur Pikir

Berdasarkan alur pikir di atas, kita bisa melihat bahwa perpecahan dalam kelompok PRD, secara khusus menyebabkan terjadinya perbedaan format radikalisme kelompok-kelompok kiri di Indonesia. Format radikalisme ini disebabkan karena selain perbedaan ideologi yang menyebabkan konflik internal dalam tubuh PRD, juga sifat dan prinsip yang ada dalam ideologi tersebut. Dalam hal ini alur pikir tidak sepenuhnya memiliki pola seperti di atas, karena banyak faktor di sekitar yang juga bergerak dan berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perbedaan motivasi masing-masing gerakan kiri.

Perjalanan PRD sampai saat ini juga akan terus memiliki potensi ancaman strategis terhadap stabilitas politik dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai

satu-satunya dasar negara akan terancam eksistensinya oleh ideologi lain. Selain itu, gerakan kiri terus-menerus akan melakukan perlawanan politik terhadap pemerintahan yang ada, terkait dengan segala kebijakan di segala bidang yang dianggap tidak berpihak ke rakyat kecil.



BAB 3

PROFIL PRD

3.1 Sejarah Lahirnya PRD

Secara kronologis, penulis membagi sejarah perjalanan Partai Rakyat Demokratik (PRD) ke dalam enam tahapan. Tahap pertama, Perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto. Tahap kedua, penyatuan organisasi perlawanan. Tahap ketiga, pembentukan Persatuan Rakyat Demokratik. Tahap keempat, dideklarasikannya Partai Rakyat Demokratik. Tahap kelima, perjuangan bawah tanah. Tahap keenam, perjuangan parlementer.⁴⁴ Secara lebih rinci, masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

3.1.1 Tahap Pertama: Perlawanan terhadap Pemerintahan Soeharto

Rezim Soeharto pada tahun-tahun 1990-an awal ditandai dengan banyaknya praktik penggusuran dan berbagai tindakan represif lainnya. Di tengah situasi yang demikianlah gerakan mahasiswa muncul sebagai motor perlawanan rakyat. Saat itu hampir di semua kampus muncul komite-komite aksi. Pada saat yang sama rakyat tidak mampu menahan kesabarannya lagi. Para petani di Kedung Ombo, Cilacap, Blanggu, Cimacan, Lampung dan lain-lainya bangkit melawan penggusuran tanah mereka. Demikian pula kaum buruh di berbagai kawasan industri di Medan, Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Semarang, dan Surabaya mulai bangkit. Mereka melakukan aksi pemogokan, menuntut hak mereka yang dianggap telah dirampas oleh pemerintah. Juga masyarakat dari sektor-sektor yang lain, seperti kaum miskin kota, seniman, dan budayawan.⁴⁵

Para tokoh aktivis mahasiswa (yang di kemudian hari membentuk PRD) pada tahun 1990-an awal itu sudah membentuk kelompok gerakan mahasiswa yang disebut komite-komite. Beberapa kelompok gerakan mahasiswa dari berbagai komite aksi

⁴⁴ KPP PRD, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, 1999, hal 12.

⁴⁵ SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), *Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia*, Yogyakarta, 1994. hal 7.

tersebut memandang bahwa sudah saatnya gerakan mahasiswa menyatukan diri dengan rakyat yang sudah bangkit tersebut. Maka dilakukanlah sosialisasi gagasan yang intensif mengenai gagasan ini. Bulan November 1992 diadakanlah pertemuan mahasiswa dari berbagai kota; yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Salatiga dan Surabaya. Pertemuan berlangsung di Megamendung, Jawa Barat. Di akhir pertemuan mereka menyepakati untuk mendirikan sebuah organisasi nasional, yang diberi nama Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).⁴⁶

Orientasi SMID adalah melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru Soeharto, dengan berpihak dan bergabung langsung dengan kekuatan rakyat. Karena itulah, begitu berdiri, aktivis SMID langsung melakukan pengorganisasian rakyat di dua sektor yang sedang bangkit melawan dimana-mana, yakni kaum tani dan kaum buruh. Inilah tahap awal perkenalan politik mahasiswa dengan rakyat untuk mencari suatu bentuk perjuangan melawan penindasan.⁴⁷

Semakin lama dan semakin intens pergumulan mahasiswa dengan berbagai problem rakyat kecil yang tertindas ini, maka dirasakan perlunya satu media yang bisa digunakan untuk saling belajar politik dan organisasi, serta untuk berbagi pengalaman diantara unsur-unsur perlawanan yang sudah muncul itu. Untuk itu lalu diterbitkanlah sebuah majalah perjuangan yang diberi nama 'Progres' pada awal tahun 1992. Majalah ini memuat informasi-informasi mengenai peristiwa perlawanan rakyat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Melalui media yang dicetak sederhana inilah rakyat semakin tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya atau sesamanya di berbagai wilayah lain, yang juga tertindas lalu bangkit melakukan perlawanan. Disengaja atau tidak, 'Progres' telah menjadi media pendidikan dan pengorganisasian sekaligus. Namun sayang, rezim Soeharto melalui Kejaksaan Agung segera melarang terbit dan beredarnya 'Progres' ini. Tetapi sebelum dilarang, dalam waktu yang singkat, 'Progres'

⁴⁶ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/05/09/0004.html>, diakses pada 10 November 2010

⁴⁷ SMID, Op.cit, hal.17

sudah berhasil mendorong terbentuknya jaringan perlawanan antar kota dan lintas sektoral.⁴⁸

Jadi dalam fase awal pembangunan perlawanan yang dikoordinasi SMID (yang merupakan embrio PRD) ini, para aktivis gerakan mahasiswa telah melakukan beberapa hal. Yaitu, pertama, mengorganisir aksi-aksi massa dalam spektrum yang luas, yang tujuannya adalah memberikan pengalaman, keberanian dan kesadaran rakyat akan kekuatan diri mereka sendiri dalam melakukan perubahan dan perjuangan menuntut hak-hak ekonomi dan politik mereka. Kedua, mengorganisir satu media perlawanan yang memberikan panduan perjuangan sekaligus alat untuk membentuk jaringan lintas wilayah dan lintas sektor. Ketiga, memberi gagasan kerakyatan pada aksi-aksi radikal yang dilakukan oleh mahasiswa.

3.1.2 Tahap Kedua: Penyatuan Organisasi Perlawanan

Setelah mengorganisir perlawanan dari berbagai kekuatan lintas wilayah dan lintas sektoral, tahap kedua (dari sejarah PRD) adalah mencoba menyatukan semua pengalaman dan sumber daya perlawanan tersebut dalam suatu organisasi. Perlawanan dirasakan tidak cukup lagi dilakukan secara spontan dan bersifat parsial melainkan harus terorganisir dan terpadu. Beberapa organisasi massa yang dibangun para aktivis kiri pada masa itu, meliputi :

- a. Pembentukan Serikat Tani Nasional (STN), pada tahun 1993. STN adalah sebuah wadah perjuangan kaum tani yang didirikan oleh kaum tani bersama aktivis-aktivis mahasiswa. Program-program STN adalah untuk membela hak-hak kaum tani, juga sekaligus digabungkan dengan upaya memperjuangkan hak-hak politik rakyat, seperti hak untuk berorganisasi, menyatakan pendapat (termasuk dalam bentuk berdemonstrasi), dan menentang kekerasan.⁴⁹
- b. Pembentukan SMID pada tahun 1992. Namun SMID baru dideklarasikan sebagai sebuah organisasi legal dan terbuka pada bulan Agustus 1994. Setelah

⁴⁸ Patria, Nezar, *Memposisikan Kembali Gerakan Mahasiswa : Belajar dari Sejarah*. Yogyakarta, 1998. hal 24.

⁴⁹ Endhiq Pratama, *Merenda Gerak Sejarah : Membangun Gerakan Mahasiswa Kerakyatan*, Yogyakarta, 1999. hal 44.

melalui Kongres Luar Biasa yang dibubarkan aparat tentara, SMID mengubah bentuk organisasinya dari yang semi-legal menjadi organisasi mahasiswa nasional yang terbuka dan legal. SMID dalam program-program politiknya secara tegas menyerang fondasi politik rezim Orde Baru Soeharto seperti menuntut penghapusan Paket 5 UU Politik 1985 dan Pencabutan Dwi Fungsi ABRI.⁵⁰

- c. Pembentukan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) sebagai wadah perjuangan kaum buruh berskala nasional pada bulan Oktober, 1994. PPBI lahir ketika pemogokan buruh memasuki titik-angka (kulminasi) tertinggi dalam sejarah Orde Baru yaitu sekitar 1.130 kali pada tahun itu.⁵¹ PPBI mempunyai program mendesak pemberian upah minimum nasional Rp 7.000/hari, kebebasan berserikat bagi kaum buruh, dan menghentikan campur tangan militer (ABRI) dalam penyelesaian konflik perburuhan. Saat ini PPBI bernama Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)
- d. Pembentukan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker) pada tahun 1994. Para aktivis gerakan mahasiswa saat itu juga menyadari bahwa perjuangan budaya menjadi penting karena selama puluhan tahun rakyat dibisukan dan didominasi oleh budaya feodalisme dan budaya ketakutan terhadap negara. Karena itu, semua budaya yang membuat rakyat pasif dan tidak berinisiatif untuk mengubah nasibnya harus dihilangkan. Jakker adalah alat yang diorientasikan untuk melakukan pembebasan mental itu. Jakker yang diketahui oleh Widji Thukul sadar bahwa perlawanan budaya tidak dapat dipisahkan dari perlawanan kaum tertindas secara keseluruhan.
- e. Pembentukan Sarekat Rakyat Indonesia (SRI) pada tahun 1995. SRI merupakan wadah dari kaum miskin kota untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dan juga perlawanan mereka terhadap ketidakadilan ekonomi dan kekerasan tentara. Kaum miskin kota, dalam pandangan aktivis mahasiswa ini, harus diwadahi dan

⁵⁰ SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), Op.cit, hal 18.

⁵¹ Cahyono, Edi, *Perburuhan dari masa ke masa: Jaman Colonial Hindia Belanda sampai Orde Baru (1998)*, Hasta Mitra, 2005, hal.46

belajar politik. Ini penting karena bila tidak dilakukan, mereka akan dengan mudah dipancing atau diprovokasi untuk mendukung suatu kerusuhan atau anarkisme yang berwatak SARA.

3.1.3 Tahap Ketiga: Pembentukan Persatuan Rakyat Demokratik

Memasuki tahun 1994 situasi politik nasional menunjukkan semakin represifnya Pemerintah Orde Baru. Tetapi bersamaan dengan itu juga tampak bahwa gerakan perlawanan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi; *Pertama*, sentimen anti rezim Soeharto mulai meluas. *Kedua*, keberanian rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya semakin tinggi. *Ketiga*, jaringan dan wadah-wadah perlawanan mulai dibentuk di berbagai tempat dan sektor masyarakat. *Keempat*, watak kerakyatan dalam perlawanan mulai muncul sebagai pendorong utama untuk menuntut keterbukaan dengan mulai terangkatnya isu perburuhan atau tani (pertanahan).

Meski demikian, para aktivis mahasiswa kiri ini melihat ada satu kekurangan mendasar dalam gerakan perlawanan ini. Yaitu, tidak ada satu pun kekuatan oposisi yang mau berdiri di garda depan, dan belum ada wadah politik radikal yang mampu meningkatkan perlawanan massal dalam menumbangkan rezim Soeharto. Karena itu para aktivis gerakan kiri yang selama ini sudah bergerak dalam wadah-wadah yang sudah ada (yaitu SMID, STN, PPBI, Jakker dan SRI) memandang perlunya menggabungkan kekuatan mereka dalam satu payung bersama, untuk bisa menghasilkan daya perlawanan yang lebih besar. Untuk merespons kebutuhan tersebut maka pada tanggal 2 Mei 1994 diadakanlah pertemuan diantara elemen-elemen gerakan tersebut.⁵² Dalam forum tersebut lalu disepakati untuk mendirikan sebuah organisasi payung untuk perlawanan rakyat yang disebut Persatuan Rakyat Demokratik (PRD).⁵³

Sebagai sebuah payung gerakan bersama, PRD mempunyai program politik yang perlu diprioritaskan yaitu menuntut dibukanya ruang demokrasi seluas mungkin. Untuk itu PRD menuntut; Paket 5 UU politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI harus

⁵² Lihat Anggaran Dasar (AD) PRD, Bab 1, Pasal 2.

⁵³ Pada tanggal 2 Mei 1994 di YLBHI Jakarta, PRD secara resmi dibentuk yang diketuai oleh Sugeng Bahagio dan sebagai sekjen Tumpak Sitorus.

dicabut, karena keduanya merupakan tiang utama yang menyangga rezim Soeharto. Paket 5 UU Politik adalah sebuah undang-undang yang mengesahkan otoriterisme negara Orde Baru. Hak-hak rakyat untuk berorganisasi, berkumpul dan menyatakan pendapat hanya boleh disalurkan melalui wadah yang dikontrol, dibuat atau diawasi oleh pemerintah.

Dalam pandangan PRD, partai-partai politik yang ada saat itu pun tidak lebih dari mesin pemilu yang setiap lima tahun sekali mengabsyahkan kekuasaan Soeharto. Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali tidak memenuhi watak demokratik, jujur dan luber. Pemilu, dalam pandangan aktivis mahasiswa ini adalah sebuah pesta yang dibiayai oleh negara untuk merayakan perpanjangan kekuasaan Soeharto. Sementara itu dengan Dwi Fungsi-nya, ABRI telah menjadi tulang punggung kekuasaan Soeharto. Dengan kekuasaan teritorial dan operasi intelijen, ABRI mendudukkan, mengontrol dan mengawasi rakyat untuk menerima segala hal yang dipraktekkan rezim untuk melindungi kekuasaannya. Di dalam parlemen, ABRI menerima hak-hak khusus untuk merusak fungsi parlemen yang sejati sebagai perwakilan rakyat.

Namun program-program radikal berupa tuntutan demokrasi dan kerakyatan PRD ini, tidak bisa berjalan optimal karena menurut dokumen resmi PRD,⁵⁴ para pengurus kurang setia (saat itu yang menjabat sebagai Ketua PRD adalah Sugeng Bahagio) dalam mengemban amanat Kongres Persatuan Rakyat Demokratik (PRD). Beberapa program PRD yang diputuskan oleh Kongres tidak dijalankan. Hal ini mendorong beberapa organ yang sudah memberikan dukungan politik pada PRD serta para Deklatator Kongres untuk mengadakan penggantian pengurus (*reshuffle*) PRD.

Maka dibentuklah Komite Penyelamat Organisasi Persatuan Rakyat Demokratik (KPO-PRD) yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko. KPO-PRD ini mendapat amanat dari para deklarator untuk meluruskan tujuan sejarah PRD sesuai dengan amanat kongres. Fungsi KPO-PRD berakhir setelah kepengurusan yang ada tidak bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban. Lalu dibentuklah sebuah Presidium Sementara Persatuan Rakyat Demokratik (PS-PRD). Tugas PS-PRD yang masih dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko ini adalah menyelenggarakan sebuah kongres

⁵⁴ KPP PRD, Op.cit, hal 18

secepat mungkin untuk memilih kepengurusan harian yang baru sambil tetap menjalankan program dan strategi-taktik yang menjadi amanat Kongres.

Bersamaan dengan masa kepemimpinan harian di tangan PS-PRD, dinamika politik nasional sedang pasang. Saat itu (1996) terjadi aksi perlawanan rakyat terhadap rezim Soeharto yang menyingkirkan Megawati dari kepemimpinan PDI. Rakyat menjadikan PDI sebagai wadah untuk menyalurkan perlawanan. Sentimen yang berkembang kemudian meluas pada tuntutan politik menentang Soeharto. Hal ini menyebabkan ruang perlawanan politik semakin terbuka. Kaum oposisi lalu mendirikan berbagai ormas dan bahkan partai politik. Partai politik yang lahir saat itu adalah PUDI (pimpinan Sri Bintang Pamungkas), Masyumi Baru (pimpinan Ridwan Saidi), dan PNI-Supeni (pimpinan Ny. Supeni).

Menyikapi semua dinamika politik yang semakin terbuka tersebut, PS-PRD merasa perlu untuk mengubah bentuk organisasinya menjadi suatu partai politik yang siap bertarung dalam arena politik. Kesimpulan inilah yang kemudian melahirkan suatu tekad bersama di kalangan para aktivis PRD untuk membuat sebuah partai politik.⁵⁵

3.1.4 Tahap Keempat: Deklarasi Partai Rakyat Demokratik

Pada bulan Mei 1996, diadakan Kongres I Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Sleman, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh ratusan delegasi yang mewakili berbagai ormas sektoral, serta peninjau (*observer*) dari *Democratic Social Party* (DSP, Partai Sosial Demokrat) Australia. Kongres pertama mengambil beberapa keputusan penting dalam hal program-program, strategi-taktik perjuangan, organisasi, AD/ART partai, slogan dan memilih pengurus pusat. Inti dari semua keputusan Kongres I PRD disimpulkan dalam "Manifesto PRD". Manifesto ini dibacakan sebagai Deklarasi Partai Rakyat Demokratik di gedung YLBHI pada tanggal 22 Juli 1996. Dalam pembukaan Manifesto PRD tersebut antara lain dikatakan;

Tidak ada demokrasi di Indonesia. Demokrasi dalam makna kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan suatu kekuasaan negara. Selama kedaulatan rakyat masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan ekonomi, politik dan budaya sebuah

⁵⁵ Majalah Gatra Nomor 05/III, 21 Desember 1996, diakses dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/12/26/0021.html>, pada 12 November 2010.

bangsa dan masyarakat, selama itu pula sejarah akan memberikan alat-alat perlawanan untuk menegakkannya. Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang penting, di masa depan, membangun suatu masyarakat sipil modern yang menghormati kedaulatan rakyat dan pembenahan praktek demokrasi dengan trias-politiknya secara sejati, sepenuh-penuhnya, sesetia-setianya. Pembangunan demokrasi yang sejati, sepenuh-penuhnya dan sesetia-setianya, harus diabdikan pada kedaulatan rakyat, demos kratos. Untuk itu suatu pemerintahan koalisi-demokratik kerakyatan haruslah dibentuk di masa depan, untuk menyalurkan partisipasi rakyat dengan saling menghormati aliran ideologi dan alat-alat politiknya masing-masing secara damai, tanpa kekerasan.

Dalam kongres itu dirumuskan pula program-program partai menyangkut ideologi, organisasi dan politik. Landasan program PRD adalah realitas sejarah Indonesia yang memang tidak bisa disetarakan, diparalelkan dengan masyarakat Rusia, Cina, Amerika Latin, Filipina dan Eropa pada masa-masa revolusi. Karena, dilihat dari cara produksi masyarakatnya, masyarakat Indonesia sekarang tidak memberikan pemaknaan lagi terhadap masalah pertentangan (kontradiksi) antara kaum tani dengan kaum feodal. Sebagian besar kaum tani kini hanya menjadi petani gurem dengan petak kecil tanah, walaupun, jika dilihat dari problem politik dan budayanya, masih terdapat sisa-sisa feodalisme.⁵⁶

3.1.5 Tahap kelima: Perjuangan Bawah Tanah

Hanya lima hari setelah PRD dideklarasikan, meledaklah peristiwa 27 Juli, yaitu penyerbuan terhadap kantor DPP PDI, di Jalan Diponegoro Jakarta. Oleh pihak aparat, PRD dituduh sebagai dalang kerusuhan, para pengurus dan anggota PRD diburu. Sejak Januari hingga Juni 1997, Ketua Umum PRD dan 13 pengurus/anggota PRD disidang di berbagai pengadilan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Surabaya. Budiman Sudjatmiko divonis 13 tahun. Sedangkan yang lainnya dijatuhi hukuman antara 1,5 tahun hingga 12 tahun.⁵⁷

⁵⁶ Lihat pidato Budiman Sudjatmiko dalam Deklarasi PRD, di Gedung YLBHI, Jakarta, 22 Juli 1996.

⁵⁷ Majalah Gatra, 31 Agustus 1996, 27 Juli: Sebuah Pandangan Retrospektif. Diakses dari <http://www.oocities.com/capitolhill/2566/retro.html> pada 14 November 2010.

Setelah terjadi serangkaian perburuan, penangkapan, penyiksaan, pengadilan dan pemenjaraan atas pimpinan dan anggotanya, ruang gerak PRD dalam titik terendah. Propaganda rejim Soeharto bahwa PRD komunis tampak berhasil menghancurkan PRD. Puncaknya adalah dikeluarkannya SK Mendagri yang menyatakan PRD beserta ormas-ormasnya yang berafiliasi sebagai partai terlarang.⁵⁸ Pelarangan ini membawa PRD ke tahapan baru dalam sejarah: perjuangan bawah tanah.

Untuk melanjutkan perjuangan, Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko dan pengurus lainnya di penjara memberikan mandat kepada anggota PRD di luar penjara untuk terus memimpin perjuangan melawan rejim Soeharto. Dengan mandat tersebut dibentuklah sebuah kepemimpinan kolektif Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD). Tugas dari KPP-PRD yang paling mendesak saat itu adalah melakukan reorganisasi atas PRD yang telah dihancurkan oleh rejim. Seluruh anggota PRD yang tersebar dalam persembunyian di berbagai kota mulai dikumpulkan, lalu membagi kerja untuk tetap membangun kekuatan.

KPP-PRD lalu menerbitkan media yang diberi nama '*Pembebasan*'. Media ini berfungsi sebagai alat propaganda, koordinasi dan pengembangan organisasi. Sementara itu aksi-aksi politik tetap dilakukan dengan mengembangkan komite-komite aksi yang non-permanen. Agenda utama partai masih tetap yaitu; gulingkan Soeharto, cabut Dwifungsi ABRI, cabut 5 UU Politik dan referendum untuk rakyat Maubere.

Pada masa perjuangan bawah tanah ini PRD turut terlibat dalam menggerakkan aksi massa bagi munculnya gerakan Mega-Bintang-Rakyat selama kampanye Pemilu 1997, yang didahului oleh gerakan Mega-Bintangnya Mudrick Sangidu di Solo. Para anggota PRD memanfaatkan kesempatan politik ini untuk membangun gerakan massa yang demokratik dan radikal. Ratusan ribu selebaran Mega-Bintang Rakyat (MBR) disebar di seluruh kota Jakarta selama masa kampanye.

PRD kemudian juga membentuk Komite Nasional Perjuangan Demokrasi (KNPD) dengan Sekretaris Jendralnya Nur Hikmah yang aksinya menyebar di beberapa kota, seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Surabaya,

⁵⁸ Lihat SK Menteri Dalam Negeri No. 210-221/1997 tanggal 29 September 1997 tentang pembubaran dan pelarangan PRD karena tidak berazaskan Pancasila dan kegiatannya dianggap melawan UUD 45.

Malang, Manado, Palu, Lampung dan Medan. KNPD bersama buruh, mahasiswa, tani dan kaum miskin perkotaan, mempelopori aksi massa menentang kediktatoran Soeharto.

Pada bulan Agustus 1997, melalui pertemuan tertutup di Hotel Central, Jakarta, PRD memutuskan untuk memanfaatkan SU MPR 1998 untuk menggelar *people power* menggulingkan Soeharto. Saat itu dipetakan, bahwa untuk menggerakkan massa Jakarta yang terdiri dari atas 150 kelurahan, paling tidak diperlukan 150 anggota. Karena itu lalu diputuskan seluruh anggota PRD di seluruh Indonesia ditarik ke Jakarta. Bulan September, Oktober dan November, seluruh anggota PRD praktis sudah beroperasi di seluruh wilayah Jakarta.⁵⁹ Namun hingga Desember, belum juga ada perkembangan yang menggembirakan. Bahkan rasa pesimisme sempat merasuki anggota PRD. Apalagi kemudian SU MPR di bulan Maret ternyata kembali memilih Soeharto sebagai Presiden RI untuk ketujuh kalinya. Maka dalam satu pertemuan PRD lalu memutuskan untuk membuat stimulasi gerakan rakyat melalui gerakan mahasiswa. Setelah melalui proses singkat terbentuklah Forkot (Forum Kota), yang lalu menggelar sejumlah aksi. Tetapi belakangan PRD memandang Forkot telah menyeleweng dari arahan semula, yaitu bersifat eksklusif tidak menyatu dengan rakyat. Karena itu PRD membentuk Komrad (Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi).⁶⁰ Stimulasi ini rupanya berhasil, karena sejak itu aksi mahasiswa terus bergulir, dan semakin lama semakin menjamur dan semakin menguat, hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998.

Pada 21 Mei 1998 Soeharto akhirnya jatuh, peran aktivis PRD dan para aktivis mahasiswa lainnya dalam bergulat melawan Soeharto sejak tahun 1994 sangat besar dan beresiko. Seperti mengalami penyiksaan dan penculikan sepanjang bulan Maret 1997. Belakangan diketahui operasi intelijen ini dilakukan oleh pasukan elit Kopassus yang tergabung dalam "Tim Mawar" dan dipimpin langsung oleh menantu Soeharto, Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Prabowo Soebianto. Enam orang diantaranya, setelah mengalami penyiksaan yang keji, dibebaskan (Andi Arief, Nezar Patria, Rahardjo Waluyo Jati, Faisol Reza, Aan Rusdianto, dan Mugiarto), tiga orang

⁵⁹ Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*, 2004. hal. 86

⁶⁰ *Ibid*, hal 88.

lainnya masih berada diculik (Herman Hendrawan, Petrus Bimo Anugrah dan Suyat), dan seorang ditemukan mayatnya di Madiun (Gilang).⁶¹

3.1.6 Tahap Keenam: Perjuangan Parlementer

Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto ditumbangkan oleh gerakan massa yang dipelopori oleh mahasiswa. Tumbangnya Soeharto sedikit banyak telah membuka katup-katup politik yang selama 32 tahun dikekang. PRD memandang penting untuk memanfaatkan keterbukaan politik ini untuk memunculkan diri secara terbuka.⁶² Pada bulan Juni 1998 atas mandat yang diberikan oleh Budiman Sudjatmiko dan Petrus Hari Harijanto, pimpinan pusat PRD di penjara, dan anggota-anggota lainnya dibentuklah Komite Persiapan Legalisasi PRD (Kepal-PRD) dengan Ketua Hendri Kuok dan Sekretaris Ida Nasim Mh. Di kemudian hari, karena Hendri Kuok lebih banyak tugas luar, maka posisi Hendri digantikan oleh Faisol Reza.⁶³

Tugas Kepal-PRD adalah memanfaatkan ruang politik untuk menuntaskan proses reformasi dengan program utama pencabutan Dwi Fungsi ABRI, penolakan terhadap pemerintahan Habibie, dan pengadilan terhadap Soeharto beserta kroni-kroninya melalui sebuah pemerintahan transisi. Selain bertugas mengurus legalisasi PRD, Kepal-PRD juga menjadi juru bicara partai (yang masih dilarang) baik kepada sesama kaum oposisi, maupun kepada pemerintahan Habibie.

Demikianlah, tahapan-tahapan yang cukup menggambarkan PRD dalam waktu yang singkat telah mengalami perubahan sosok (*metamorfose*) beberapa kali, sebagai upaya mempertahankan eksistensi organisasi. Sejarah PRD adalah sejarah pembangunan dan pengembangan perlawanan terhadap bentuk penindasan penguasa. Dari pengalaman tahun 1980-an, tahun 1994-1996 hingga kini, PRD yakin bahwa kekuatan rakyat yang memiliki kesadaran pentingnya demokrasi dan terorganisir, yang

⁶¹ Lihat selengkapnya dalam Nugroho, Bimo, *Dicari Orang Hilang*, Jakarta: Institut Arus Informasi dan LBH Ampera, 1999.

⁶² Lihat Pernyataan Sikap Resmi KPP PRD, ditandatangani oleh Budiman Sudjatmiko, di LP Cipinang 21 Maret 1999

⁶³ Miftahuddin, *Op.cit*, hal 88.

merdeka-independen, bebas dan mandiri, merupakan satu-satunya energi yang mampu membebaskan umat manusia dari penindasan tersebut.

Tahun 1999, PRD ikut tampil sebagai kontestan dalam pemilu. Saat itu PRD mendapat suara sekitar 78.000. Tetapi anggota PRD sendiri, paling banyak pada tahun 1999 ketika mencapai angka 1.000 orang. Setelah itu menurun hingga kini tinggal 500 orang, yang tersebar di dalam 15 KPW (Komite Pimpinan Wilayah), 152 KPK (Komite Pimpinan Kota) di seluruh Indonesia.⁶⁴ Meski demikian, dengan semangat tinggi, PRD tetap mencanangkan program-program besar yang meliputi:⁶⁵

- a. Program jangka pendek, menggulingkan pemerintahan Mega-Hamzah dan mengganti dengan pemerintahan rakyat miskin, yaitu pemerintahan yang dibangun di atas koalisi atau persatuan gerakan rakyat atau kekuatan demokratik.
- b. Program Internasional: Membubarkan IMF dan *World Bank*, menghapuskan hutang luar negeri negara miskin, memperjuangkan kemerdekaan untuk rakyat Palestina, menolak agresi militer negeri-negeri imperialis.
- c. Program politik dan hukum: menuntut penangkapan dan pengadilan para jenderal pelanggar HAM, pengadilan Partai Golkar, penangkapan dan pengadilan koruptor pada masa Orde Baru sampai pada masa pemerintahan Mega-Hamzah, penyitaan dan nasionalisasi aset-aset koruptor untuk subsidi rakyat miskin, menolak RUU dan UU yang anti demokrasi (RUU anti teroris, RUU penyiaran, UU Parpol, UU PPHI, dan lain-lain), referendum untuk rakyat Aceh, menarik militer dari Aceh dan Papua, dialog yang luas dan demokratis bagi rakyat Papua, pencabutan Dwi Fungsi (Pembubaran Kodam, Korem, Fraksi TNI/Polri di DPR/MPR, dan lain-lain), stop diskriminasi terhadap SARA dan kaum perempuan.
- d. Program Ekonomi PRD: menuntut penghapusan hutang luar negeri, turunkan harga kebutuhan pokok, naikkan upah/gaji seratus persen (termasuk gaji prajurit

⁶⁴ Lelita Yunia; "Sosialisasi Politik Mahasiswa : Partisipasi Politik Forum Kota (Forkot) dalam Gerakan 1998"; Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Depok, tahun 2002; hal 46-47.

⁶⁵ Pernyataan Sikap KPP PRD, 1 Juli 2002, ditandatangani oleh Ketua Umum Haris Rusli.

tamtama, bintang), tolak kenaikan BBM (Bahan Bakar Migas), TDL (Tarif Dasar Listrik), telepon, tolak privatisasi, stop PHK, lapangan pekerjaan untuk rakyat, pendidikan gratis untuk rakyat, kesehatan gratis untuk rakyat, tolak penggusuran rakyat miskin, perumahan murah untuk rakyat, tolak liberalisasi impor pangan, teknologi murah dan modern untuk petani dan nelayan, tanah untuk penggarap, pupuk murah untuk petani.

3.2 Para Tokoh PRD

3.2.1 Budiman Sudjatmiko

Budiman Sudjatmiko lahir pada 10 Maret 1970 di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia tumbuh sebagai remaja dengan dua latar belakang yang berbeda: Desa Pahonjean dan Bogor.⁶⁶

Setelah tamat SMA, Budiman masuk ke Fakultas Ekonomi UGM. Tetapi kuliah pun hanya dijalannya sekitar dua semester saja. Sebagai mahasiswa baru pada tahun 1989, perhatian dan konsentrasi Budiman tersedot oleh aksi mahasiswa, yang memang marak pada saat itu. Salah satu peristiwa dramatis yang cukup monumental ketika itu adalah peristiwa bentrokan antara mahasiswa dan tentara di Jalan Kusumanegara yang kemudian dikenal sebagai "*Peristiwa Kusumanegara Berdarah*". Mahasiswa yang melakukan aksi damai dibalas dengan pukulan, tendangan, dan popor senjata aparat keamanan. Aksi itu adalah aksi solidaritas untuk aktivis Bambang Isti Nugroho, Bambang Subono, dan Bonar Tigor Naipospos yang diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta karena mendiskusikan dan menjual buku-buku karya Pramudya Ananta Toer. Ketiga aktivis itu dikenai tuduhan melakukan tindakan subversif karena kegiatan mereka tersebut.

Sekitar akhir 1989 terjadi pergeseran orientasi di kalangan gerakan mahasiswa. Dari yang semula hanya mengkonsentrasikan kekuatan di kalangan mahasiswa sendiri, menjadi bersatu langsung dengan kekuatan rakyat. Budiman termasuk salah seorang yang memainkan peran organisator sejak dimulainya proses peletakan dasar-dasar pola

⁶⁶ Lihat FX Rudi Gunawan, *Budiman Sudjatmiko Menolak Tunduk*, Catatan Anak Muda Menentang Tirani, Jakarta: PT. Grasindo, 1999.

perjuangan ini. Pola interaksi ini intinya adalah melakukan proses penguatan posisi politik rakyat dengan cara mengorganisir mereka, merancang format organisasi perjuangan kaum tani, melatih kemampuan untuk berkampanye dan melakukan tekanan terhadap pemerintah, dan akhirnya melahirkan kader-kader perjuangan dari kalangan kaum tani itu sendiri.⁶⁷ Tentu saja pilihan strategi ini tidak timbul begitu saja. Ada proses penggodokan gagasan, interaksi lapangan, dan eksplorasi teoritis terlebih dahulu. Keterlibatan Budiman dalam proses itu cukup besar karena selain sebagai organisator petani, Budiman juga dipercaya untuk melakukan pendidikan politik bagi aktivis-aktivis mahasiswa.

Sebagai organisator petani, tugas pertama Budiman adalah membuka daerah pengorganisasian baru untuk kaum tani di Cilacap. Kasus yang terjadi di kawasan ini soal penggusuran tanah petani yang akan digunakan untuk pembangunan proyek *Olefine* atau pabrik serat plastik yang merupakan proyek gabungan modal asing (Jepang) dan korporasi Bimantara milik Bambang Trihatmojo. Tugas ini sejalan dengan tekad Budiman sendiri yang sejak tahun 1990 sudah memutuskan untuk terjun total sebagai organisator rakyat. Dalam masa-masa pengorganisasian itu, ia melewatkan empat hari dalam seminggu untuk tinggal bersama petani Cilacap. Dan hal ini dijalannya selama berbulan-bulan.

Ketika Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) terbentuk pada tahun 1994 yang merupakan organisasi payung bagi SMID, PPBI, STN, SRI dan Jakker, Budiman ikut bergabung di dalamnya. Tetapi PRD di bawah kepemimpinan Sugeng Bahagio dipandang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Maka pada tahun 1996 dilakukanlah reorganisasi dan nama PRD berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan dideklarasikan pada 22 Juli 1996. Budiman dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum PRD. Di bawah Budiman, PRD tampil sebagai partai yang secara tegas melancarkan gerakan-gerakan yang radikal dan revolusioner, dengan program utama; 'Cabut Dwi Fungsi ABRI', 'Cabut Paket 5 UU Politik', 'Turunkan Soeharto', Referendum untuk Rakyat Maubere' (Maubere, istilah aktivis PRD untuk menyebut Timor Timur), 'Naikkan upah buruh seratus persen'.

⁶⁷ <http://www.tempo.co.id/ang/min/02/09/nas4.html>, Wawancara Budiman Sudjatmiko, diakses pada 14 November 2010.

Akibat aktivitas-aktivitas ini-dengan tuduhan sebagai dalang kasus 27 Juli-Budiman akhirnya ditangkap, dan diadili. Pada 28 April 1997, oleh hakim PN Jakarta Pusat Budiman dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, dengan dakwaan telah bermaksud memutarbalikkan, merongrong, atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara. Tetapi penjara tidak membuat budiman takluk. Ia terus menjalankan kepemimpinan partai dibalik jeruji besi. Jiwa Budiman telah menyatu dengan partai yang dipimpinnya. Bagi Budiman, PRD adalah jawaban atau sebuah kesimpulan dari seluruh sepak terjangnya sejak ia memutuskan untuk terjun di dunia gerakan mahasiswa. Atau bila dianggap sebagai sebuah proses, maka PRD adalah hasil yang konkret dari seluruh proses intraksi Budiman dengan realitas sosial-politik masyarakat. Dalam sebuah pidato pertanggungjawaban politik PRD, Budiman mengatakan;

“Banyak diantara kami adalah aktivis-aktivis di kampus atau para organisator buruh pada dekade 1980-an maupun awal dekade 90-an. Pertemuan-pertemuan kami dengan realitas masyarakat bahwa inilah-yakni alas tempat oligarki ini berpijak-yang membantu kami tetap setia hingga akhir.”

Segera setelah keluar dari LP Cipinang pada tanggal 10 Desember 1999 berdasarkan amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Budiman kembali memimpin PRD. Pada tahun 2002 Budiman meninggalkan Indonesia untuk belajar di Inggris, yaitu di SOAS (*School of Oriental and African Studies*), di University of London, dan kemudian mengambil studi hubungan Internasional University of Cambridge, London. Sekarang Budiman Sujatmiko aktif di Presidium Pergerakan Indonesia bersama sejumlah tokoh seperti Faisal Basri, MA (Alm), Dr.Arief Arryman, dan Dr.Thamrin Amal Tomagola. Saat ini Budiman menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

3.2.2 Dita Indah Sari

Dita Indah Sari lahir pada tahun 1973, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Ayahnya adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Karya Pembangunan (Golkar), periode 1973-1977. Sementara ibunya adalah seorang pekerja diperusahaan minyak, tetapi kemudian berhenti, dan menjadi pengusaha swasta.⁶⁸

⁶⁸ Pembebasan, No.1/tahun I/Mei 2002, hal.2.

Selepas SMA Dita masuk ke Fakultas Hukum UI pada tahun 1991. Dita mulai mengenal dunia pergerakan pada tahun 1992, saat ia berkenalan dengan mahasiswa Fakultas Sastra UI. Dalam pandangan Dita saat itu sastra merupakan kampus yang sangat dinamis dengan banyaknya kegiatan yang mereka gelar. Forum yang diberi nama *Forum Belajar Bebas (Independent Study Forum)*, anggotanya tidak hanya dari Sastra, tetapi juga dari Hukum dan Fisip.

Sejumlah tokoh penting pernah diundang dalam FBB ini. Diantaranya adalah Adnan Buyung Nasution. Buyung saat itu dipandang sebagai lokomotif demokrasi. Kehadiran Buyung sempat membuat pro kontra dikalangan birokrat kampus. FBB juga pernah mengundang Pramudya Ananta Toer (tetapi dicekal) dan juga Widji Thukul. FBB pernah bekerjasama dengan Kelompok Studi Humaniora mendirikan Solidaritas Mahasiswa Jakarta (SMJ). Dalam SMJ ini berabung pula mahasiswa luar UI, yaitu ISTN (Institut Sains dan Teknologi Nasional).

Masuknya mahasiswa ISTN dalam FBB membawa warna tersendiri karena amereka ini termasuk anak-anak yang paling progresif. Di kampus ISTN Srengseng Sawah ini pernah terjadi insiden 'Subuh Berdarah'. Saat itu mereka menyandera rektor, karena rektor menaikkan SPP yang dirasa memberatkan mahasiswa. Karena itu kemudian tentara turun tangan untuk membebaskan rektor. Dalam pengambilalihan kampus tersebut terjadi tindak penganiayaan, dan banyak mahasiswa yang terluka. Dita bersama SMJ lalu menggelar solidaritas 'Subuh Berdarah' ke gedung DPR/MPR.

Tahun 1993, Dita mengadakan perjalanan ke Yogya. Di situlah untuk pertama kalinya Dita bertemu dengan Budiman Sujatmiko. Di Yogyakarta waktu itu sudah terbentuk Solidaritas Mahasiswa Yogya (SMY), disamping Komite Rakyat (KR), yang lebih banyak melakukan advokasi petani.⁶⁹ Kemudian setelah kembali ke Jakarta, aktivitas Dita pindah ke buruh. Keputusan ke buruh bukan pilihan Dita, tetapi organisasi (SMJ dan FBB). Organisasi saat itu memandang bahwa gerakan tidak cukup hanya mengorganisir mahasiswa saja, tetapi elemen masyarakat yang lain juga harus diorganisir, antara lain buruh. Begitulah kemudian ada pembagian kerja. Saat itu Jacobus (yang pernah dipenjara) tetap di mahasiswa, sementara Dita ke buruh.

⁶⁹ Lihat, dokumen KPP PRD, *Pergerakan Mahasiswa Yogyakarta*, 1994.

Buruh yang terorganisir di beberapa tempat, antara lain Tangerang, Pluit dan Bogor. Tahun 1994 Dita bersama kawan-kawannya merasa bahwa sudah saatnya dibentuk serikat buruh. Pada saat itu para mahasiswa Solo, Surabaya, Semarang, Yogya, Jakarta dan Bandung yang juga mengorganisir buruh merasakan hal yang sama. Kemudian dibentuklah jaringan antar organisasi-organisasi ini. Lalu kualitasnya ditingkatkan tidak sekedar jaringan antar organisasi yang permanen. Karena itu kemudian lahirlah Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI). Bulan September 1994 PPBI mengadakan kongres di Bandung, yang dihasiri sekitar 75-80 orang dari 5 propinsi. Saat itu Dita terpilih sebagai Sekjen, dan tidak ada ketuanya. Tetapi tak lama kemudian, yaitu pada bulan Februari 1995 PPBI melakukan reorganisasi menjadi sebuah organisasi yang lebih solid, dan Dita terpilih sebagai Ketua Umum.

Di bawah kepemimpinan Dita, PPBI menjalin hubungan dengan negara-negara lain yang mempunyai perhatian pada nasib buruh di Indonesia. Waktu itu ada dua negara yang konsen, yaitu Filipina dan Australia, yang pada akhir 1996 mendapat hadiah Wertheim Award, dari Yayasan Werheim Belanda.

Setelah berkali-kali menggerakkan massa buruh dalam jumlah besar di berbagai kota, akhirnya Dita ditangkap pada tahun 1995, setelah memimpin aksi pemogokan 5.000 buruh di PT. Indoshoes Inti Industry, yang memproduksi sepatu Reebok dan Adidas. Pada saat itu Buruh yang dipimpin Dita menuntut kenaikan upah dan cuti hamil. Pada 23 April 1997 bersama dua kawannya, Coen Husen Ponto dan Mohmmad Sholeh, Dita dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh PN Surabaya. Begitu terbebas Dita kembali menjalani tugas lamanya, yaitu memperjuangkan hak-hak buruh dengan membangun lembaga yang baru yang diberi nama Front Nasional Pejuang Buruh Indonesia (FNPBI).

Pada 4 Desember 2001 Reebok Human Right Foundation mengumumkan para penerima penghargaan Reebok Human Right Foundation Award. Salah satunya diberikan untuk Dita Indah Sari. Tetapi Dita menolak penghargaan tersebut, karena menurutnya Reebok belum memberikan penghargaan yang layak kepada para buruhnya.⁷⁰ Dalam pernyataan sikapnya, FNPBI menyatakan,

⁷⁰ Miftahuddin, Op.cit, hal 100.

“Di Indonesia terdapat lima perusahaan yang memproduksi sepatu Reebok yang 80 persen buruhnya perempuan. Semua perusahaan tersebut merupakan perusahaan sub-kontraktor dari Reebok, sebagian dimiliki oleh perusahaan Korea Selatan seperti Dung Jo dan Ton Yang. Para buruhnya hanya diupah sebesar Rp 15 rubi (\$ 1,5) per hari. Sehingga mereka terpaksa tinggal di pemukiman kumuh yang murah. Sedang pada saat yang sama Reebok mengantongi keuntungan jutaan dollar setiap tahunnya yang diambil dari hasil keringat buruh.”

Dalam perkembangannya, Dita Indah Sari pada Pemilu 2009 mengikuti ajang Pemilu 2009 dengan mendaftar sebagai Calon Legislatif dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Namun, usaha ini gagal karena PBR tidak mencapai 7 persen suara di tingkatan nasional.

3.2.3 Faizol Reza

Faizol Reza; lahir di Madura, 1 Januari 1973. Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan H.Helmy dan Zubaidah. Reza memiliki latar belakang pendidikan pesantren saat SMA, dan disini pula ia mengenal protes. Di pesantren ia berkenalan dengan para mahasiswa lalu ikut terlibat dalam diskusi ilmiah yang mereka gelar. Bersamaan itu ia aktif ikut teater, dan lewat teater ini ia membangun spirit kritis, baik itu kepada sekolah, kepada pesantren dan juga kepada lingkungan sekitar.⁷¹

Setelah lulus SMA Pada tahun 1992 ia melanjutkan ke Yogya karena mendengar dunia teater di Yogya sangat bagus. Saat itu aksi mahasiswa di Yogya sudah marak. Reza langsung mendaftar di dua kampus sekaligus; IAIN Sunan Kalijaga dan UGM. Reza mengikuti perkembangan kedua kampus ini. Karena banyak aksi demonstrasi, akhirnya Reza ikut terlibat juga dalam aksi-aksi itu. Aksi pertama yang mereka ikuti, aksi menentang pemberlakuan undang-undang lalu lintas. Reza sejak itu mulai aktif menghadiri berbagai diskusi yang digelar aktivis mahasiswa, antara lain yang digelar Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) IAIN Yogya, yang bermarkas di tepian sungai Gajah Wong. Sebelumnya Reza juga ikut pelatihan di PMII dan HMI, tetapi tidak tertarik untuk ikut disana, karena PMII dan HMI tidak memiliki fokus perhatian yang jelas.

⁷¹ KPP PRD, *Satu Dekade PRD: Demi Demokrasi dan Sosialisme*, 2004. hal 30.

Tahun 1994, sewaktu Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) terbentuk Reza ditugaskan oleh SMID untuk menjadi koordinator Yogya. Waktu itu terpilih menjadi Ketua PRD Sugeng Bahagio, Sekjen Tumpak, Aris Arif Mindayat Litbang. PRD diharapkan menjadi corong politik, harus berbicara dan bersikap oposisi terhadap rezim Soeharto. Tetapi fungsi itu macet. Di pengurus pusat terjadi perdebatan, apakah membangun cabang-cabang lebih dulu, atau menjadi corong terlebih dahulu. Pertentangan itu semakin tajam, lalu membuahkan Komite Penyelamat Organisasi (KPO) PRD, yang diketuai Budiman Sujatmiko (lihat hal. 49).

Tahun 1996, ketika kawan-kawannya diadili Reza bertanggungjawab atas PRD di wilayah Semarang, Yogya dan Solo. Meski dinyatakan terlarang, PRD terus mengadakan konsolidasi dan gerakan bawah tanah di bawah komando KPP (Komite Pimpinan Pusat) yang dipimpin tiga orang; Andi Arief, Nezar Patria dan Reza. Untuk menyembunyikan identitas Andi memakai nama "Mirah Mahardika", dan Nezar pakai nama "Rizal Ampere". Secara definitif Budiman tetap menjabat sebagai Ketua Umum PRD. Tetapi karena dipenjarakan dia tidak leluasa bergerak, maka Budiman membuat surat pelimpahan mandat ke KPP.

Bulan November 1996, Reza ditarik ke Jakarta penuh. PRD mempersiapkan struktur yang semi militer, struktur komando, untuk menghadapi Pemilu 1997. Saat itu ada beberapa opsi PRD; boikot pemilu, Golput atau partisipasi dalam bentuk lain. Pilihannya; Boikot Pemilu. Tetapi karena tidak mendapat sambutan rakyat, lalu diubah menjadi; Mega-Bintang yang merupakan lanjutan anti kuningisasi Mudrik Sangidu di Solo, hanya ditambahkan 'rakyat' dibelakangnya; Mega-Bintang-Rakyat (MBR). Lalu dicetaklah sekitar 500 ribu selebaran 'MBR' yang ditambahi "Gulingkan Soeharto", "Bentuk Pemerintahan Sementara". Selama musim kampanye Pemilu 1997, PRD terus berusaha mempersatukan berbagai macam masa (MBR) untuk membangun sentimen anti-Golkar, sehingga setiap Golkar kampanye selalu diserang.

Reza kemudian ditangkap pada 12 Maret 1998, sehari setelah Sidang Umum MPR digelar. Begitu juga kawan-kawannya yang lain, seperti Jati, Andi, Nezar semuanya diculik. Setelah disekap selama satu bulan 20 hari, pada 28 April, Reza dibebaskan. Begitu keluar dari penculikan, situasi baru sudah terhampar. PRD lalu

menempuh proses hukum menggugat pemerintah di PTUN, dan menang, Keputusan Mendagri yang melarang PRD dibatalkan.⁷²

Pada November 1998, Reza ikut aksi menolak Habibie dalam SI MPR. Waktu itu Reza bersama Matori Abdul Jalil dan Andi Arief menghadap Gus Dur (Alm.) untuk meminta kesediaannya memimpin gerakan rakyat yang sudah turun ke jalan. Seusai Pemilu 1999, PRD mengadakan Kongres. Dalam forum itu Reza tidak mau dicalonkan lagi sebagai ketua.

3.2.4 Haris Rusly Moti

Haris lahir di Ternate 16 April 1975. Ia pernah menjabat Ketua Pimpinan Daerah Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Ternate, tahun 1992-1993. Setelah lulus SMA ia melanjutkan kuliah di UGM Yogyakarta, karena ingin menjadi seorang aktivis Muhammadiyah. Di samping kuliah Haris ikut Jamaah Tabligh yang mengadakan pengajian keliling (daurah), dari mesjid ke mesjid. Tetapi kemudian ia keluar dari jamaah ini ketika mendengar pernyataan Ja'far mar Thalib bahwa jamaah ini kafir.

Haris lalu berguru kepada Ja'far Umar Thalib, yang membuka kelompok pengajian 'Ath-Thurats', yang kebetulan sekretariat Ath-Turats ini berada di samping kos-nya, di Masjid Swakarya, di sekitar kampus UGM. Tetapi beberapa bulan kemudian ia merasa tidak cocok lagi dengan kelompok ini ketika dirinya dianjurkan keluar dari kuliah, lalu disuruh menikah oleh Ja'far. Bahkan disuruh memelihara jenggot dan memakai jubah. Sebagai orang Muhammadiyah tulen Haris tidak suka Arabisasi, karena itu ia menolak anjuran Ja'far dan memilih keluar.

Pada tahun 1995, Haris masuk HMI. Pada saat *basic training* (Batra) HMI diberikan pandangan-pandangan HMI, yang antara lain merujuk gagasan Nurcholis Madjid. Setelah ikut Batra HMI, ia merasa terdorong untuk membuka diri. Karena itulah ia merasa harus membaca buku-buku lain. Salah satu buku yang ia baca adalah buku Wahib, yang diantaranya mengatakan bahwa kebenaran sejati itu adanya hanya

⁷² Pada 10 Agustus 1998, PRD melakukan gugatan PTUN terhadap SK Menteri Dalam Negeri No. 210-221/1997 tanggal 29 September 1997 dan dalam pengadilan tersebut menyatakan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri 1997 yang melarang PRD adalah tidak sah.

Allah. Tidak semua yang kita yakini sebagai kebenaran itu pasti benar juga di sisi Allah. Harus ada pencarian terus menerus.

Tahun 1995 Haris ikut kursus politik yang diadakan SMID. Yang mengisi materi adalah Budiman Sudjatmiko dan Andi Arief. Tetapi Haris tidak sepenuhnya bisa menerima apa yang disampaikan para mentor SMID ini. Bahkan kemudian Haris lari dari forum, karena tidak bisa menerima pernyataan bahwa ICMI kolaborator Soeharto dan HMI ikut membantai rakyat tahun 1965. Meski demikian intensitas pergaulan Haris dengan SMID semakin tinggi karena kampus Sastra itu merupakan tempat berkumpulnya anggota SMID seperti Faisol Reza, Yul Amrozi, Andi Arief, dan Nezar patria.

Ketika baru masuk PRD, Haris diberi tugas untuk mengorganisir kekuatan mahasiswa di UGM dan Yogya, untuk aksi menggulingkan Soeharto. Untuk itu kemudian dibentuklah Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), dimana Haris ditunjuk sebagai koordinatornya. 27 Juli 1997 untuk pertama kalinya Haris terlibat serius dengan gerakan mahasiswa. Ketika PRD menginstruksikan kepada semua kadernya untuk berangkat ke Jakarta (untuk persiapan menggelar People Power 1998), Haris menolak, karena masih banyak mata kuliah yang belum dia selesaikan. Tetapi di Yogya, Haris tetap menggalang aksi, yaitu dengan membentuk Komite Boikot Pemilu. Waktu komite melakukan aksi, sekitar 32 orang ditahan, termasuk Haris, yang sempat ditahan selama enam hari di Kodim.

Saat ini Haris masih terlibat dalam gerakan di lapangan dengan menjadi koordintor Forum Kepemimpinan Pemuda Indonesia (FKPI) dan Petisi 28, setelah sebelumnya pada Pemilu 2009 dirinya gagal menjadi caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN).

3.2.5 Natalia Scholastika Ch.

Natalia lahir di Bandung, 1977, sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Dari tingkat dasar hingga SMA dilalui di Bandung. Selepas SMA pada tahun 1996 ia melanjutkan kuliah di Universitas Parahyangan (Unpar) jurusan Teknik Arsitektur. Ketika terjadi gelombang aksi mahasiswa 1998 Natalia ikut bergabung di dalam Komite

Mahasiswa Unpar. Menjelang Pemilu 1999, Natalia diberi tugas oleh PRD untuk memasang poster pemilu di sekitar rumahnya di Kopo.

Pada bulan Desember 1999 Natalia terpilih sebagai Ketua KPW PRD Jawa Barat. Jabatan sebagai Ketua Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) dia tinggalkan. Ini merupakan perjalanan karier yang sangat cepat karena Natalia mengikuti pendidikan PRD Agustus 1999, dan resmi dilantik sebagai anggota PRD September 1999. Pada tahun 2000 hingga 2001, ketika terjadi pemogokan total pengemudi angkutan di Jawa Barat, dan pembakaran mobil dalam aksi besar-besaran di DPRD Jawa Barat, Natalia bersama para aktivis PRD menjadi sasaran penangkapan.

3.2.6 Kelik Ismunanto

Kelik Ismunanto (Ismu) lahir di Notoyudan, Yogyakarta 1970 sebagai anak ke-5 dari enam bersaudara. SD di Notoyudan, Sekolah SMPN 5 Kotabaru, lalu SMA 2 Yogyakarta, lulus tahun 1989, setelah itu dirinya pindah ke Solo. Di Solo Ismu sempat ikut HMI.

Pada tahun 1993, Ismu sudah banyak terlibat dalam jaringan nasional gerakan mahasiswa. Meski masih menjabat Ketua Umum Kalpadruma, Ismu sering berada di Jakarta, mengikuti aksi-aksi di Jakarta. Ketika di kampus ISTN terjadi 'Insiden Subuh Berdarah', Ismu ikut Aksi Solidaritas untuk ISTN di DPR/MPR. Ismu juga ikut dalam aksi penolakan kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kota.

Pada tahun 1996, ketika meletus kasus 27 Juli, Ismu merupakan target. Sebagai salah seorang target aparat, Ismu berusaha menyelamatkan diri dengan berpindah-pindah tempat tinggal. Di SMID Pusat, Ismu menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi. Beberapa saat sebelum meletus kasus 27 Juli, sebenarnya Ismu sedang mendapat tugas ke Purwokerto untuk membangun gerakan di sana. Tetapi dengan meletusnya kasus 27 Juli, akhirnya Ismu mengkoordinasi kawan-kawannya di Solo dan mereka sepakat *cooling down*, menyelamatkan diri dulu, sambil tetap menjaga kontak.⁷³

⁷³ KPP PRD, Op.cit, hal 37

Sebulan kemudian, setelah para anggota PRD mulai disidangkan, Ismu sudah berani muncul lagi. Dalam waktu singkat konsolidasi berhasil dilakukan. PRD lalu mengadakan pertemuan bawah tanah tingkat nasional di Jakarta. Ketika pertemuan memutuskan untuk menarik semua kader PRD ke Jakarta, Ismu sudah di Jakarta penuh.

Ismu mengkritik rezim Soeharto yang selalu mengagungkan Pancasila, tetapi memberangus sikap kritis. Pilihan Ismu untuk bergabung secara total di PRD, karena PRD mengabdikan diri pada perjuangan rakyat.

Di luar para tokoh PRD yang sudah disebut di atas, sebenarnya masih banyak lagi aktivis PRD yang memiliki kisah perjalanan hidup yang perih, bahkan lebih perih dari semuanya. Sebut saja Bima Petrus (Bimpet), Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Suyat, Gilang, Temu, dan Saddam Husein. Empat nama yang pertama, hilang pada musim penculikan pada tahun 1997-1998 mengiringi jatuhnya rezim Soeharto, dan hingga sekarang tak tentu rimbanya. Sementara Gilang, pengamen yang memiliki nama asli Leonardus Nugroho Iskandar, ditemukan tewas sehari setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Jasadnya ditemukan teronggok diantara semak hutan Saradan, Madiun, Jawa Timur dalam kondisi yang memprihatinkan. Visum dokter menyebutkan, selain luka tembus pada tulang iga nomor lima, ia juga mengalami pendarahan di rongga jantung sebanyak satu liter, tepi kanan paru-paru kirinya robek sepanjang tiga sentimeter, dan bilik jantung kiri terdapat luka iris.⁷⁴

3.3 Underbow PRD

Dalam melaksanakan cita-cita perjuangan seperti yang tercantum dalam AD/ART PRD, PRD memiliki sayap-sayap gerakan (*underbow*) yang melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

3.3.1 Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi - *National Student League For Democracy* (LMND), merupakan organisasi mahasiswa radikal yang didirikan bersamaan dengan gelombang perjuangan menggulingkan rejim orde baru hingga pada

⁷⁴ KPP PRD, Op.cit, hal 44.

tuntutan penuntasan agenda reformasi; penghancuran sisa-sisa kekuatan orde baru, demokratisasi dalam segala aspek politik, ekonomi, dan budaya, serta pembentukan Pemerintahan Rakyat.

Pada pertengahan tahun 1998 dibentuk Front Nasional untuk Reformasi Total (FNRT). akan tetapi, FNRT tidak sanggup mengkonsolidasi kesatuan gerakan mahasiswa, menyebabkan front ini bubar. Setelah itu, beberapa komite aksi yang pernah mengambil inisiatif pendirian FNRT membentuk aliansi baru, yaitu Aliansi Demokrasi (ALDEM) pada Agustus 1998. ALDEM berhasil menerbitkan sebuah majalah "ALDEM" satu kali dan sukses menggalang aksi nasional pada tanggal 14 September dengan isu Cabut Dwifungsi ABRI. Upaya berikutnya adalah pembentukan Front Nasional untuk Demokrasi (FONDASI) pada pertengahan Februari 1999.

Kebuntuan konsolidasi RMNI II di Surabaya, terutama mengenai respon terhadap pemilu 1999, mendorong FONDASI melakukan konsolidasi lanjutan pada tanggal 9-12 Juli 1999 di Bogor. konsolidasi yang diikuti sekitar 20 komite aksi mahasiswa dari berbagai kota bersepakat mendirikan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). sejak berdiri, LMND bersama komite aksi yang dipayunginya aktif dalam perjuangan menuntaskan reformasi; Menolak SI MPR, Pengadilan terhadap Soeharto, hingga penolakan terhadap RUU PKB.

Pada tahun 2001, sebuah pertikaian di DPR melahirkan kompromi politik dengan naiknya Abdul Rahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presidennya. Gusdur merupakan seorang demokrat-reformis yang bersikap gradual, terutama dalam bersikap terhadap manuver-manuver politik yang dilakukan sisa-sisa kekuatan orde baru, maupun poros tengah yang dirancang oleh sayap oportunist di parlemen (PAN, Partai Keadilan, PBB, PPP, dll). beberapa kali Gus Dur hendak memperlihatkan sikapnya membersihkan sisa-sisa orde baru, dengan mengadili Soeharto, merespon tuntutan pembubaran Golkar, serta menghapuskan dwi-fungsi ABRI. Langkah ini mendapat perlawanan dari kelompok reaksioner; sisa-sisa orde baru dan poros tengah yang oportunist. Pada saat Gus Dur bergerak menghadapi sisa-sisa orde baru dan berupaya mendemokratisasikan kehidupan politik mendapat tantangan dari koalisi besar sisa-sisa orde baru dan poros tengah, maka LMND bersama beberapa kelompok radikal dari gerakan mahasiswa, buruh, dan petani berada di garis depan

pendukung Gus Dur. Akan tetapi, sikap gradual Gus Dur menyebabkan ia tidak dapat mengendalikan situasi, dan akhirnya tergulingkan. reformasi akhirnya dipukul mundur, dan kekuatan lama (sisa-sisa orde baru) merestorasi diri. Megawati-Hamzah Haz naik menggantikan Gus Dur.

Selain mengakomodir kekuatan lama (orba dan tentara) dan restrukturisasi kekuasaan barunya, megawati juga melanjutkan negosiasi dengan IMF dan WTO, terutama untuk implementasi resep-resep neoliberal di Indonesia. berbagai struktur LMND bergerak di berbagai kota menentang kenaikan harga BBM, privatisasi, dan kebijakan liberalisasi impor perdagangan. akibatnya, aktifis LMND di berbagai kota banyak yang ditangkap, kantor-kantor LMND diserbu oleh milisi dan preman, dan aksi-aksi massa kami dibubarkan. Perlawanan yang dilakukan LMND bersama sektor-sektor sosial lainnya menyebabkan rejim mega-haz kehilangan kredibilitasnya di hadapan rakyat. akan tetapi, mereka masih dapat bertahan dan menyelenggarakan pemilu 2004.

Di tengah sengit perlawanannya terhadap Rezim yang ada, dengan pertimbangan ekonomi-politik yang tajam, pada tahun 2003 LMND berani mengambil tindakan politik yang berbeda dari kegamaan umum Gerakan Mahasiswa (yang masih disekap jargon Moral Force maupun Social Movement) saat itu, yaitu: bertemu dan berdiskusi dengan gerakan lintas sektoral (tani, buruh, kaum miskin kota) yang progresif lain, sampai menghasilkan keputusan politik untuk bersama-sama saling membahu, membentuk sebuah partai politik elektoral ber-platform kerakyatan untuk mersepon Pemilu Parlemen 2004. Nama persatuan mereka saat itu adalah Partai Oposisi Rakyat (POPOR). Meski gagal akibat sempitnya waktu untuk memenuhi verifikasi pemilu (hanya sekitar 3 bulan), tindakan tersebut telah LMND anggap tepat sebagai sebuah taktik politik 'termungkin' pada saat itu.

Gagal mengintervensi pemilu 2004, tidak menurunkan peran aktif LMND dalam menghalau kemunculan kekuatan lama, terutama Tentara, dalam proses pemilu 2004. LMND aktif melakukan aksi menentang militerisme dan berkampanye kepada rakyat agar tidak memilih capres militer. kendati demikian, kampanye populis yang dirancang Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla mengantarkan mereka memenangkan pemilu.

LMND menilai, SBY-JK berhasil memenangkan pemilu karena dukungan dari kekuatan asing, terutama negara2 imperialis dan korporasinya. Hal tersebut memang terbukti benar; baru saja SBY-JK memulai pemerintahannya, ia sudah memutuskan menaikkan harga BBM. gelombang protes dan perlawanan kembali muncul, dan LMND bersama organisasi-organisasi mahasiswa lain, serta sektor-sektor organisasi rakyat, bekerjasama membangun komite/aliansi-aliansi bersama. Lahirlah Barisan Oposisi Bersatu (BOB), yang berjangkauan multi sektor dan cukup pluralistik. SBY-JK berkali-kali menaikkan harga BBM, disamping getol menjual BUMN (privatisasi) kepada pihak asing, dan menyerahkan penguasaan mayoritas sumber daya alam kepada cengkeraman imperialisme.

Pada tahun 2006, LMND bersama beberapa sektor sosial dan organisasi radikal membuka perdebatan untuk merumuskan strategi-taktik menghadapi pemilu 2009. Akhirnya, LMND menjadi inisiator pendirian Komite Persiapan Partai elektoral, yakni KP-Papernas. Januari 2007, akhirnya partai elektoral baru berdiri, yaitu Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas).

Terhadap penjajahan asing (imperialisme) yang begitu nyata dalam penguasaan kekayaan alam Indonesia, terutama sektor pertambangan. sejak ratusan tahun, kekayaan tambang indonesia (migas, batubara, mineral, dll) dijarah oleh asing, melalui korporasi-korporasi raksasa mereka yang beroperasi di Indonesia. segelintir elit yang berdiri dibalik kepentingan korporasi asing tersebut, menikmati dan mendapatkan jatah dari hasil tambang ini sekaligus merupakan jaminan untuk mereka tetap berkuasa. menghadapi ini, LMND memperjuangkan nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia. berkali-kali LMND mendatangi kantor-kantor korporasi asing tersebut, diantaranya Exxon (jakarta), Inco (Makassar), Newmont (NTB), Chevron (Riau). aksi serupa juga digelar di kota-kota lain dengan tema yang sama; nasionalisasi perusahaan tambang asing.

Sebagai salah satu organisasi kiri di mahasiswa, LMND jelas anti kapitalisme dan memperjuangkan pergantian tatanan kapitalisme yang serakah ini, dengan sebuah tatanan yang lebih demokratis, lebih humanis, dan ekologis. Hal ini menjadi nafas dalam azas perjuangan LMND, yakni Demokrasi Kerakyatan (Dem-kra). Saat ini,

LMND berdiri di 24 propinsi, 80 kota, dan ratusan kampus di seluruh Indonesia.

3.3.2 Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI)

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Adalah organisasi sipil (Ormas) yang konsen memperjuangkan perubahan bagi masyarakat miskin di DKI Jakarta melalui metode aksi demonstrasi dan Technical Asistance dilapian bawah untuk memperkuat kapasitas masyarakat itu sendiri. Dalam perjalanannya SRMI DKI telah memperjuangkan 2.500 Rumah Tangga Miskin (RTM) DKI dalam mendapatkan Kartu Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2006, 1.000 KK miskin di tahun 2007 untuk mendapatkan Kartu JPK - Gakin dan melakukan advokasi kesehatan Gratis terhadap 1.500 pasien miskin di 40 rumah sakit di Jakarta.

Hal utama atas problem kemiskinan bukanlah pada terletak atas penggunaan barang dan jasa, namun lebih banyak kepada Pengabaian Hak Dasar dan Penentuan Dalam Pengambilan Kebijakan. Yang dimana masyarakat selaku konsituen tidak mempunyai kesempatan dalam mengakses sumber daya strategis demi kepentingan dirinya sendiri. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta merupakan salah satu daerah subur dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Meskipun daerah ini tidak mempunyai kekayaan alam yang melimpah ruah, namun sejak tahun 2005 – 2009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta terus meningkat tiap tahunnya dan menembus angka yang fantastis Rp 20 Triliun pada tahun 2008 lalu, diperkirakan pada tahun 2009 akan mencapai Rp 22,5 Triliun meningkat sekitar 1% dibandingkan tahun lalu atau sekitar Rp 1,6 Miliar. Namun sayangnya juga daerah ini memiliki indeks ketimpangan yang sama tinggi juga, salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah bagaimana mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan diantara para anggota warganya. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan musuh utama manusia dan dapat mengancam kesinambungan pembangunan (perputaran modal). Saat ini SRMI DKI Jakarta memiliki 3.000 anggota di 84 RT/RW di 5 Kotamadya DKI Jakarta dan membangun Posko Perjuangan Rakyat Miskin sebagai tempat belajar poliuk bagi masyarakat.

3.3.3 Sukarelawan Pembela Tanah Air (Spartan)

Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) merupakan organisasi yang menghimpun relawan seluruh aktivis/pejuang kerakyatan, yang juga adalah masyarakat biasa, petani, pekerja/buruh, mahasiswa, seniman, penulis, pegawai, wiraswasta, tokoh agama dll. Keanggotaan SPARTAN bersifat terbuka dan demokratis (egaliter), yaitu tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin, agama, etnis, dan strata sosial.

Maksud dibentuknya organisasi SPARTAN adalah untuk mengawal proses pemilihan umum 2009, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden khususnya, dan keseluruhan proses politik umum, agar berjalan sesuai kehendak rakyat menuju satu perubahan ekonomi, politik serta sosial budaya dengan target bangsa Indonesia memiliki landasan serta identitas sebagai sebuah bangsa yang mandiri, demokratik serta modern.

Pemilu, dalam sistem politik liberal, merupakan satu-satunya mekanisme politik legal bagi rakyat untuk merebut kekuasaan politik, maka bagi rakyat yang sadar harus membangun partainya sendiri atau bersatu dengan partai lain selama tidak melanggar prinsip-prinsip garis politik dalam bentuk program perjuangan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, berlandaskan persoalan pokok dan mendesak yang harus segera diselesaikan.

Rakyat Indonesia haruslah terlibat aktif, kritis, partisipatif dalam proses Pemilu, tidak semata-mata menjadi pemilih pasif, tetapi partisipasi rakyat harus ditujukan untuk mengontrol proses Pemilu, dengan melakukan kampanye, pengorganisasian massa, menggalang sekutu, serta memimpin massa agar memilih partai politik dengan calon legislatifnya maupun calon presiden yang memiliki garis politik serta program politik yang mengabdikan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan selama lima tahun sekali, bisa dimaknai bagi rakyat sebagai penyerahan nasib hidupnya selama lima tahun, sangat wajar jika rakyat berdaulat untuk memilih para wakilnya, agar wakil yang dipilih benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi kehendak rakyat, serta mendorong maju para wakilnya melalui program serta mengawal maupun mengawasi dengan gerakan massa ekstra parlementer.

3.3.4 Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)

Ide tentang perlunya persatuan kiri ini telah muncul beberapa waktu sebelumnya. Beberapa kelompok yang waktu itu sepakat untuk mengadakan peleburan kemudian memutuskan untuk mengambil inisiatif memulai proses peleburan secara resmi. Selain keuntungan adanya komitmen tertulis, juga bisa membuat sebuah struktur yang akan memungkinkan adanya kesatuan tindakan dan keserasian gerak dalam mewujudkan persatuan ini.

Oleh karena itulah kemudian diadakan sebuah Pertemuan Nasional Unifikasi pada tanggal 13 - 15 Mei 2004 di Surakarta. Pertemuan ini didahului oleh pembentukan Kolektif di berbagai kota. Ada sepuluh (10) kota dimana proses ini telah mulai berjalan yakni Medan, Padang, Jabotabek, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Palu, Banjar, Makassar. Melalui kolektif inilah Pertemuan Nasional Unifikasi diadakan, dan persis pada pukul 22.45 WIB, tanggal 13 Mei 2004, seluruh peserta Pertemuan Nasional Unifikasi menyepakati secara aklamasi terbentuknya sebuah Komite Persiapan Unifikasi yang bekerja secara nasional. Komite Persiapan ini diberi nama Komite Persiapan Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP).

Pertemuan ini menyepakati satu isu mendasar, yakni keprihatinan bahwa di tengah semakin menguatnya politik kelas yang dilancarkan oleh penguasa modal, rakyat pekerja malah semakin kehilangan identitasnya dan tidak mampu mengenali kepentingannya sendiri ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan politik pemerintah yang berpihak pada pemilik modal. Dengan kata lain, Pertemuan Nasional Solo menyimpulkan bahwa pembangunan kembali politik kelas bagi rakyat pekerja adalah satu tugas mendesak yang harus diemban oleh organisasi yang dihasilkan oleh Pertemuan Nasional tersebut.

Dalam perjalanannya, KP-PRP mengalami pasang-surut seperti halnya semua organisasi lainnya. Terlebih lagi, "persatuan" nampaknya merupakan satu fatamorgana, yang dicanangkan oleh hampir semua kelompok di sayap kiri, namun selalu lenyap tak berbekas ketika didekati. Tekanan kelas borjuis yang memunculkan watak-watak sektarian, oportunistis maupun apatis di kalangan kelompok-kelompok kiri nampaknya masih terlalu berat untuk diatasi.

3.3.5 Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)

NPBI sendiri terbentuk melalui kongres yang diselenggarakan di Lembang, Jawa Barat pada tanggal 14-16 Mei 1999. Ini merupakan suatu langkah maju dalam membangun gerakan buruh di Indonesia. FNPBI yang awalnya merupakan gabungan 7 serikat buruh lokal, berusaha semaksimal mungkin dalam memanfaatkan ruang demokrasi yang mulai sedikit terbuka. Ruang tersebut semakin terbuka saat pemerintahan Habibie melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 87 dan dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 05 tahun 1998 tentang Kebebasan Berorganisasi, sekalipun dalam prakteknya intimidasi dan represif dari pengusaha maupun aparatatus negara masih tetap saja berlangsung secara sistematis.

Proses terbentuknya FNPBI dimulai dengan beberapa kali pertemuan dan kesepakatan untuk melakukan aksi bersama antara serikat-serikat buruh lokal tersebut. Di antaranya adalah kesepakatan untuk melakukan aksi memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 1999 secara serentak, yang didahului dengan program selebaran dan poster bersama. Dari beberapa kali koordinasi dan program aksi serentak dirasakan adanya kebutuhan untuk membentuk satu organ payung bagi serikat-serikat buruh lokal ini. Organ payung yang berfungsi untuk memimpin organisasi-organisasi buruh lokal yang diharapkan menjadi pelopor untuk menyatukan kaum buruh di Indonesia. Walaupun masih belum sempurna, namun berjalannya aksi 1 Mei 1999 dapat menjadi tolak ukur kesiapan organisasi lokal untuk berada dalam satu koordinasi. Ini yang kemudian mendasari kesepakatan untuk mengadakan Kongres pada bulan Mei 1999. Kongres ini diikuti enam organisasi buruh lokal yaitu KOBAR Jabotabek, PPBS Surabaya, PBS Semarang, PPBS Surakarta, DBSU Medan dan SBI Bandung. Sementara itu kawan-kawan di PPBB (Pusat Perjuangan Buruh Bitung) tidak dapat hadir dalam kongres tersebut namun menyatakan siap bergabung dan bersedia mematuhi serta menjalankan segala keputusan Kongres.

Dalam Kongres tersebut disepakati untuk membentuk wadah di tingkat Nasional dengan nama Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) yang merupakan organ untuk persiapan menjadi satu serikat buruh yang kuat dan berbasiskan massa. Tugas utama dari organ nasional ini adalah memimpin perjuangan kaum buruh yang sebelumnya masih lokalis menjadi perjuangan dengan perspektif nasional dan

internasional. Berarti FNPBI juga harus menjadi corong propaganda tingkat Nasional maupun Internasional. Selain itu kongres juga menghasilkan rumusan program perjuangan pada tiga level yaitu program pada level organisasi, level politik, dan level teori.

Seperti dijelaskan diatas, pada awal pembentukannya FNPBI hanya beranggotakan tujuh serikat buruh lokal. Hingga Sekarang, FNPBI telah memiliki wilayah pengorganisir di 13 propinsi — dengan 30 lebih kota di seluruh Indonesia. Secara saat ini jumlah anggota FNPBI mencapai lebih dari 50.000 buruh.

3.3.6 Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER)

Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker) adalah jaringan pekerja seni budaya yang bergerak di bidang daya cipta dan kreativitas. Minat utama jaringan ini adalah sastra, seni, filsafat, agama, dan budaya populer, baik dalam bentuk pemikiran-cipta atau karya-cipta. Agenda utama Jaker adalah membentuk jaringan kebudayaan terkecil pada sanggar seni di basis buruh dan petani di kampung-kampung yang belum terjamah oleh dewan-dewan kebudayaan yang menjadi elitis di kota besar sehingga tak menjamah kebutuhan kekaryaan pekerja seni lapisan bawah.

Pertama kali terbentuk pada tahun 1993 oleh nama-nama Widji Thukul, Moelyono, Semsar Siahaan, Raharjo Waluyo Djati, Hilmar Farid, Linda Christanty dan masih banyak lagi. Jaringan Kerja Kesenian ini “ada” untuk menjawab tuntutan dialektika sejarah sebagai counter dari kesenian yang dikendarai oleh neokolonialis dalam penetrasi budaya melalui dewan-dewan kesenian milik rezim ORBA serta seniman-seniman “besar” kubu humanisme universal untuk kepentingan penanaman modal kapitalis-imperialis Amerika dan negara imperialis lainnya.

BAB IV

AKSI-AKSI DAN PERPECAHAN PRD

4.1 Aksi-aksi PRD

Aksi-aksi yang dilakukan PRD dari masa pembentukannya hingga saat ini terus menuntut masalah-masalah kesejahteraan rakyat, kebijakan pemerintahan serta upaya-upaya mendeskreditkan pemerintahan yang berjalan. Berikut adalah rangkuman aksi-aksi yang dilakukan PRD dari tahun 1993.⁷⁵

4.1.1 Tahun 1993

Dalam sejarahnya yang singkat, para aktivis PRD telah banyak sekali melakukan aksi perlawanan, baik terhadap rezim Soeharto maupun rezim yang menggantikannya. Meski secara organisatoris PRD (sebagai Partai Politik) baru dideklarasikan pada 22 Juli 1996, tetapi para aktivis yang tergabung dalam PRD telah melakukan aksinya sekitar tahun 1993, dengan menggunakan organ yang bermacam-macam, seperti SMID, PPBI, Jaker, STN, dan SRI. Pada bulan Januari 1993, misalnya, SMID melakukan aksi pembelaan terhadap petani Blangguan Jawa Timur, yang tanahnya diambil paksa oleh aparat dan hendak dijadikan markas pertahanan angkatan udara. Pada peristiwa ini, 18 orang aktivis ditangkap dan disiksa oleh Bakorstanasda Kodam Brawijaya, termasuk Budiman Sudjatmiko.

4.1.2 Tahun 1994

Memasuki tahun 1994 tingkat radikalisasi buruh untuk melakukan perlawanan terlihat mengalami kemajuan pesat. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan angka pemogokan buruh yang mengalami kenaikan tajam dari 313 kali menjadi 1.130 kali. Dari sekian banyak pemogokan itu, hanya sekitar 100 saja yang diorganisir oleh gerakan mahasiswa (PPBI). Para aktivis mahasiswa yang terjun memberikan advokasi terhadap buruh ini selalu berfikir untuk meningkatkan skala perlawanan. Setelah melakukan konsolidasi, mereka lalu mempersiapkan suatu aksi pemogokan buruh dalam jumlah besar, di daerah Jakarta Utara dan di Tangerang. Tetapi rencana ini gagal. Pada

⁷⁵ Sumber: diolah dari berbagai data Deputi II, Badan Intelijen Negara.

saat itu beberapa organ aktivis mahasiswa, seperti SMID, PPBI, STN, Jaker, dan SRI mengadakan pertemuan untuk membahas pembentukan sebuah payung bersama. Hasilnya, pada 2 Mei 1994, dideklarasikanlah berdirinya Persatuan Rakyat Demokratik (PRD), di kantor YLBHI, Jakarta.

4.1.3 Tahun 1995

Keinginan untuk menyatukan mahasiswa-buruh semakin kuat ketika para aktivis mahasiswa mendapat inspirasi gerakan buruh-mahasiswa di Korea Selatan. Sehingga banyak anggota PRD dikirim ke kantong-kantong buruh untuk melakukan pengorganisasian. Saat itu PRD mendapat kiriman bahan-bahan informasi dari mahasiswa Korea, di samping secara rutin juga mendapat buletin dari ASA (*Asia Student Association*) yang menginformasikan perjuangan mahasiswa dan buruh di Korea. Para aktivis PRD dengan serius mempelajari dan mendiskusikan isi bahan-bahan tersebut, dan mengambil inspirasi dari peristiwa yang terjadi di Korea.

Upaya menggabungkan aksi buruh dan mahasiswa dalam sebuah aksi bersama yang sudah dirancang cukup lama, akhirnya terealisasi pada 15-23 Juli 1995. Dimana saat itu terjadi aksi pemogokan 13.000 buruh di pabrik Great River Industry, di Cibinong, Bogor. Aksi itu dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari. (Dita sebagai ketua PPBI, Budiman sebagai Ketua KPO PRD dan Munif Laredo sebagai Ketua SMID). Sementara anggota SMID, PPBI, PRD, STN dan Jaker dari berbagai daerah, diantaranya dari Yogya dan Semarang mengirimkan tenaga untuk membantu aksi itu.

Gabungan mahasiswa dan buruh ini mengadakan aksi selama 10 hari. Aksi ini mendapat publikasi luas dari media, tetapi tidak mendapat dukungan dari NGO. Aksi ini dilanjutkan dengan 'kunjungan' sekitar 8.000 hingga 9.000 buruh ke gedung DPR/MPR. Sebelumnya mereka sudah melakukan *long march* dari pabrik Great River ke gedung DPRD. Tetapi gagal karena dihandang aparat keamanan. Meski terjadi sejumlah penangkapan, namun secara umum aksi ini berhasil, karena tuntutan buruh diterima, meski beberapa orang yang diketahui telah mengorganisir terjadinya aksi pemogokan buruh dipecat. Aksi di Bogor ini monumental bagi sejarah PRD. Karena ini

merupakan aksi terbesar yang berhasil diorganisir oleh PRD dengan baik. Peristiwa ini juga berhasil memperkuat kepercayaan diri para aktivis mahasiswa.

Sebelum peristiwa pemogokan buruh di Bogor, pada bulan Januari 1995, SMID dan PPBI mengadakan aksi gabungan di halaman pabrik PT Ganda Guna Indonesia Tangerang, untuk mendukung tuntutan kenaikan upah buruh. Dalam aksi ini 14 aktivis SMID dan PPBI ditangkap aparat dan dibawa ke Makodim Tangerang. Dua bulan berikutnya, aktivis dari PPBI, SMID dan STN bersama para pemuda pejuang Maubere dari Renetil dan AST, sepakat mendirikan Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere (SPRIM). Dan yang terpilih sebagai koordinator SPRIM saat itu adalah Wilson. Dua bulan berikutnya, 1 Mei 1995, SMID dan PPBI bersama elemen masyarakat lainnya menggelar aksi memperingati hari buruh sedunia di Semarang dan Jakarta. Ini merupakan aksi buruh pertama setelah 30 tahun dilarang oleh rezim Soeharto. Di Semarang aksi ini dibubarkan oleh aparat keamanan dengan tindak kekerasan, 60 aktivis mahasiswa dan buruh ditangkap.

Bulan Agustus 1995, terjadi konsolidasi internal dalam tubuh Persatuan Rakyat Demokrastik (PRD). Organ-organ yang ada di bawah payung PRD merasa tidak puas atas kepemimpinan Sugeng Bahagio, yang mereka nilai tidak mampu menjalankan amanat Kongres. Para deklarator PRD lalu membentuk Komite Penyelamat Organisasi PRD yang dipimpin Budiman Sudjatmiko. Sebulan berikutnya, September, KPO PRD diubah menjadi Presidium Sementara (PS) PRD, dipimpin Budiman Sudjatmiko.

Pada 12 November 1995, SPRIM mengadakan aksi memperingati pembantaian Santa Cruz oleh ABRI pada tahun 1991 di Universitas Indonesia. Aksi ini juga dihadiri oleh beberapa korban pembantaian yang selamat. Pada tanggal 7 Desember, ratusan pemuda Timor Timur dan PS-PRD mengadakan aksi 'loncat pagar' di kedutaan Rusia dan Belanda, sebagai upaya menarik publikasi pers dalam memperjuangkan referendum untuk rakyat Timor Timur dan penegakan demokrasi di Indonesia. Setelah memperoleh perhatian pers dan masyarakat, para aktivis ini segera membentangkan dua spanduk; "Referendum untuk Timor Timur", dan Demokrasi untuk Indonesia".

Pada tanggal 11 Desember pimpinan PS-PRD (Budiman Sudjatmiko) dan pimpinan PPBI (Dita Indah Sari) memimpin aksi 14.000 buruh PT Sritek, Solo yang sahamnya dimiliki Tien Soeharto dan Harmoko. Dalam aksi ini buruh memperoleh

tindakan represif dari aparat. Sejumlah aktivis ditangkap, termasuk Budiman Sudjatmiko dan Dita. Tindak kekerasan aparat juga diterima Wiji Thukul (pimpinan Jaker), yang terkena popor senjata sehingga salah satu matanya tidak bisa melihat lagi.

4.1.4 Tahun 1996

Pada tanggal 14-15 April 1996, diadakan Kongres I Partai Rakyat Demokratik (PRD), di Sleman, Yogyakarta. Dalam kongres yang dihadiri utusan dari berbagai kota dan sektor masyarakat ini, terpilih Budiman Sudjatmiko sebagai Ketua Umum PRD dan Petrus H Harianto sebagai Sekjen. Bulan Juni 1996, sekitar 3.000 buruh PT Indoshoes, mengadakan aksi di DPR RI, dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko dan Dita. Bulan berikutnya, 8 Juli, berlangsung aksi gabungan 10 pabrik di Tandes, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 20.000 buruh bergabung dalam aksi yang dipimpin oleh Budiman dan Dita ini. Dalam aksi ini tiga orang ditangkap dan diadili, mereka adalah; Dita Indah Sari, Coen Husein Pontoh dan Muhammad Sholeh.

Pada tanggal 22 Juli 1996, dideklarasikan berdirinya Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Kantor YLBHI, Jakarta. Lima hari kemudian, 27 Juli terjadi kasus penyerbuan kantor DPP PDI. Tanggal 29 Juli Menko Polkam Faisal Tandjung mengumumkan bahwa PRD adalah pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan, dan memberikan instruksi tembak di tempat untuk semua perusuh. Tanggal 11 Agustus, Budiman ditangkap oleh Badan Intelijen ABRI di rumah Beny Sumardi (kakak Romo Sandyawan Sumardi), di Bekasi bersama 7 aktivis PRD lainnya. Mereka dibawa ke kantor BIA dengan kedua mata ditutup kain hitam. Tanggal 12 Agustus, Garda Sembiring dan beberapa anggota PRD ditangkap di Depok oleh BIA dengan disiksa dan kedua matanya ditutup. Tanggal 10 September, Wilson (SPRIM dan PPBI) dan Anom Astika (Departemen Pendidikan dan Propaganda PRD) ditangkap oleh kesatuan intel Polwil Ungaran, Poltabes Semarang dan Kodam Diponegoro.

4.1.5 Tahun 1997

Bulan Januari 1997, persidangan terhadap Budiman Sudjatmiko, Jacobus Kurniawan, Ignatius Prabowo, Bortholemeus Garda Sembiring dan Suroso dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semua didakwa dengan pasal-pasal subversif.

Sementara pada saat yang sama, di PN Jakarta Selatan juga dilakukan persidangan terhadap Petrus H. Harianto, Ken Budha Kusumandaru, Victor da Costa, Putut Arintoko, Anom Astika dan Wilson.

Bulan Februari 1997, sejumlah anggota PRD, Petrus Bimo Anugrah, Herni dan Ilham ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena menyebarkan selebaran koalisi Mega-Bintang-Rakyat. Ketiganya ditahan hingga akhir bulan April dengan status tahanan luar dan wajib lapor ke Polda. Pada bulan April 1997, PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada para pimpinan PRD; Budiman 13 tahun; Garda Sembiring 12 tahun; Iganatius Prabowo 9 tahun; Jacobus Kurniawan 8 tahun; Suroso 7 tahun. Semuanya ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pada saat putusan vonis dibacakan majelis hakim, para anggota PRD menggelar aksi di halaman keamanan. Dua orang anggota PRD, Anom Winanto dan Harris Musi Akbar ditangkap, keduanya kemudian diadili dan divonis 5 bulan penjara.

Sementara itu, hampir dalam waktu yang bersamaan (April) di PN Surabaya, Dita Indah Sari divonis 6 tahun, Coen Husein Pontoh 4 tahun, dan Moh. Sholeh 4 tahun penjara. Bulan berikutnya (Mei), PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada para aktivis PRD; Petrus Harianto 6 tahun; Ken Budha Kusumandaru 4 tahun; Victor da Costa 1,5 tahun, dan Putut Arintoko 1,5 tahun. Semuanya ditahan di LP Cipinang.

Sementara sejumlah pimpinan PRD dijebloskan ke dalam penjara, para anggota PRD yang berada di luar penjara terus mengadakan konsolidasi di bawah kepemimpinan Komite Pimpinan Pusat (KPP) PRD. KPP PRD 'bawah tanah' saat itu ikut menyukseskan agenda politik dalam pemilu dengan membuat Koalisi Mega-Bintang-Rakyat. Pada bulan Juni, PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Wilson 5 tahun penjara, dan Anom Astika 4 tahun penjara. Keduanya ditahan di LP Cipinang. Tanggal 27 Juli, bersamaan dengan peringatan setahun 'Kasus 27 Juli', anggota PRD Joni Fadli ditangkap Polres Jakarta Pusat ketika menyebarkan selebaran Koalisi Mega-Bintang-Rakyat di Jalan Diponegoro. Ia disidang di PN Jakarta Pusat, dan divonis 7 bulan penjara. Ia ditahan di Rutan Salemba dan dibebaskan pada 23 Februari 1998. Bulan September 1997, PRD menggugat SK Mendagri yang menyatakan PRD sebagai organisasi terlarang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

4.1.6 Tahun 1998

Tanggal 8 Februari 1998, dua anggota PRD Victor da Costa dan Putut Arintoko dibebaskan dari LP Cipinang, karena masa hukumannya sudah habis. Tanggal 12 Maret, Faisol Reza, Waluyo Jati dan Herman Hendrawan diculik oleh Kopassus ketika baru saja keluar dari kantor YLBHI. Ketiganya mengalami penyiksaan yang luar biasa. Jati dan Reza dibebaskan pada tanggal 5 Juni 1998, sementara Herman Hendrawan tidak diketahui nasibnya hingga sekarang.

Tanggal 13 Maret 1998 tiga anggota PRD yaitu; Nezar Patria, Aan Rusdianto dan Mugiyanto ditangkap pasukan penculik dari Kopassus, di Klender, Jakarta Timur. Ketiganya mengalami siksaan yang berat, dan dibebaskan pada 5 Juni 1998. Pada bulan Maret ini pula, anggota PRD, Petrus Bimo Nugroho diculik oleh Kopassus, dan sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Tanggal 28 Maret 1998, Ketua KPP-PRD bawah tanah, Andi Arief diculik oleh Kopassus di rumah kakaknya di Bandar Lampung. Ia kemudian disekap dalam satu tempat bersama aktivis PRD lainnya yang sudah diculik terlebih dahulu. Setelah mengalami penyiksaan ia dibebaskan pada bulan Juni 1998.

Pada bulan September 1998, PTUN Jakarta memenangkan gugatan PRD terhadap Mendagri, sehingga SK tentang pelarangan PRD dinyatakan batal demi hukum. Pada bulan Oktober, berlangsung Kongres II PRD di Yogyakarta yang dihadiri oleh utusan dari berbagai wilayah dan sektor. Kongres memutuskan pembentukan Komite Pimpinan Pusat PRD (KPP-PRD). Terpilih sebagai pengurus KPP PRD adalah; Ketua Faisol Reza, Sekretaris: Ida Nasim Mh; Departemen Pendidikan dan Propaganda: Wilson; Departemen Organisasi: Ken Budha Kusumandaru; Departemen Perjuangan Rakyat: Wignyo; Departemen Kerja sama: Nur Hiqmah; Departemen Dana dan Usaha: Victor da Costa.

4.1.7 Tahun 1999

Tanggal 13-15 Februari 1999 berlangsung Rapat Kerja Nasional PRD, di Jakrta yang dihadiri utusan 12 wilayah/provinsi. Rakernas memutuskan bahwa PRD akan berpartisipasi dalam Pemilu bulan Juni 1999. Tanggal 22 Februari, PRD mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman untuk mengikuti Pemilu. 24 Februari, PRD dinyatakan lulus semua persyaratan administratif dan mendapat pengakuan legal melalui SK

Menteri Kehakiman. 27 februari, PRD mendaftarkan diri ke LPU untuk diverifikasi oleh tim-11. Dalam pendaftaran PRD menyerahkan daftar 12 KPW (komite Pimpinan Wilayah) PRD. Tanggal 1-3 Maret Tim-11 melakukan verifikasi atas KPW di Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan NTB. Tanggal 4 Maret Tim-11 mengumumkan PRD lolos dari verifikasi dan berhak untuk mengikuti Pemilu 1999. Pada tanggal 5 Maret, PRD mendaftarkan Hendri Kuok untuk duduk sebagai wakil PRD di dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diketuai oleh Rudini. Tanggal 12 Maret, KPU mengumumkan nomor peserta Pemilu 1999 PRD, mendapatkan nomor 16.

4.1.8 Tahun 2000

Pada tanggal 21 Februari 2000, dipimpin langsung oleh ketua umum Budiman Sudjatmiko, 700 anggota PRD dari berbagai wilayah dan kota se Indonesia, melakukan aksi di depan Istana Negara. Aksi menentang pemotongan subsidi BBM/listrik ini merupakan aksi nasional kedua pasca 1 Juli yang menuntut didiskualifikasinya Golkar dalam Pemilu. Dalam aksi ini tiga orang wakil PRD masing-masing Budiman Sudjatmiko, Petrus Harianto dan Faisol Reza menemui Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Negara. Sementara aksi di depan istana terus berlangsung. Setelah melakukan pembicaraan selama 30 menit, ketiga wakil PRD kembali ke tengah massa. Budiman Sudjatmiko menyampaikan sikap Gus Dur. "Saya sendiri sebenarnya sependapat dengan PRD. Tapi kalau pemerintah tidak melakukan pemotongan subsidi maka tidak memperoleh kucuran dana dari IMF," demikian ucap Gus DUR yang disitir oleh Budiman.

Dalam kesempatan itu pula PRD menyerukan kepada rakyat untuk menentang kebijakan ini. Sebeb, menurutnya, rakyatlah yang paling merasakan dampak buruknya. Rakyat harus membentuk wadah perjuangan dan melakukan aksi massa yang terorganisir dengan tertib. Seruan ini juga ditujukan kepada kaum oposisi demokratik untuk menggalang front perjuangan.

Menindaklanjuti aksi nasional PRD menolak kenaikan BBM/Listrik, pada 21 Februari, 50 anggota PRD Sumatera Utara dipimpin oleh ketua KPW PRD Sumatera Utara Benhard Nababan mengadakan aksi di gedung DPRD I Sumatera Utara. Setelah

menggelar mimbar bebas di depan gedung DPRD mereka diterima oleh Komisi VII (Perdagangan dan Investasi). Dalam dialog dengan 8 delegasi PR, anggota DPRD dari fraksi PDIP Robinson Sitepeu mengatakan, "Pencabutan subsidi tidak berpengaruh pada rakyat bawah, justru ini untuk membantu kesejahteraan rakyat." Dalam aksi ini turut bergabung pula buruh PT Intan yang kebetulan juga sedang melakukan aksi menuntut kenaikan upah, dan juga beberapa organ mahasiswa diantaranya Forso dan GMNI Cabang Medan.

22 Februari, di kampus Universitas Lampung, PRD bersama 100 petani dari Serikat Tani Nasional (STN) Lampung, LP3T, Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Lampung (KMPPL) mengadakan aksi gabungan dengan sasaran kantor DPRD I Lampung. Tuntutan dari TP3T adalah agar pemerintah dan Perusahaan Tambak Udang PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) Tulang Bawang mengembalikan Biaya Hidup Bulanan. Sedang tuntutan dari STN Lampung adalah agar pemerintah khususnya Pemda dan BPN Tingkat II Lampung Selatan bertanggungjawab atas penyelesaian kasus Land Reform Rawa Sragi II. Aksi ini diwarnai mogok makan aktivis TP3T.

23 Februari, di Bandung, PRD melakukan aksi menolak kenaikan BBM dan listrik. Aksi ini diikuti oleh 700 tukang becak yang tergabung dalam Paguyuban Becak Bandung (PBB), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Selain menolak kenaikan BBM dan listrik, mereka juga menuntut diadakannya pendidikan gratis untuk rakyat. Mereka mengadakan pawai menuju gedung DPRD I Jawa Barat. Dalam Aksi ini Ketua KPW PRD Natalia menyatakan menolak kebijakan kenaikan BBM, dan menuntut pemutihan hutang luar negeri. Massa aksi ini ditemui lima anggota dewan dari Komisi D. Mereka berjanji akan menyelesaikan tuntutan pencabutan Perda Walikota tentang becak dalam lima hari. Sementara tentang tuntutan penolakan kenaikan BBM hanya ditampung.

28 Februari di Jakarta. Sekitar 100 massa petani Bakahuni Lampung bersama dengan Serikat Tani Nasional (STN) mengadakan aksi di Istana Negara. Mereka menuntut penyelesaian kasus perampasan tanah adat seluas 106 hektare yang dilakukan Brigjen Schahrudin Zaenal. Mereka juga menuntut pengadilan Zaenal yang telah memalsukan sertifikat. Konflik tanah ini sebenarnya sudah berlangsung lama, dan rakyat telah mengalami represi, termasuk pembunuhan terhadap lurah Bakahuni, Cholid

Ch pada tahun 1983. Hal ini pulalah yang melandasi tuntutan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Aksi yang dipimpin Imam Budi Sanyoto, Ketua STN, tidak berhasil menemui Presiden, hanya ditemui Sekretaris Negara.

Memperingati empat tahun Tragedi 27 Juli, PRD bersama sekitar 1.000 massa dari berbagai organisasi massa antara lain Eksponen 27 Juli, FKK 27 Juli, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK), Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker), Partai Nasional Indonesia (PNI) 1927, Serikat Tani Nasional (STN) yang tergabung dalam Front Rakyat anti Rezim Orba (Frarob) mengadakan long march mendatangi beberapa tempat penting di Jakarta Kamis (27/7).

Aksi dimulai dari kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba dilanjutkan dengan long march menuju Jalan Diponegoro, lokasi bekas kantor DPP PDI Pusat tragedy 27 Juli 1996. Di depan gedung bekas kantor DPP-PDI tersebut, massa aksi bergabung dengan rakyat sekitar, mendengarkan berbagai orasi, diantaranya dari Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko. "Gedung ini adalah simbol perlawanan rakyat. Orang-orang yang melakukan penindasan atas rakyat Indonesia belum satupun diadili termasuk dalam sesungguhnya atas peristiwa 27 Juli 1996. Mereka Soeharto, Golkar dan Militer, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya."

Di Palu, 10 Agustus, puluhan petani yang terabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) dari Kecamatan Batui, Kabupaten Baggai, Sulawesi Tengah mendatangi kantor DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah, memprotes kebijakan pemerintah yang tetap saja tidak memperhatikan kehidupan petani. Mereka menuntut tanah yang dirampas oleh PT BSS yang bekerjasama dengan pemerintah. Sebelumnya, sekitar 600 petani STN di Palembang berdemonstrasi di kantor Pemda menuntut hal yang sama. Aparat menghadapi dengan berondongan senapan, hingga puluhan korban jatuh terluka.

Tanggal 18 Agustus, sekitar 1.000 massa yang terdiri dari PRD, FNPBI dan LMND melakukan aksi di pintu gerbang utama gedung DPR/MPR. Dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari, mereka menuntut dicabutnya Dwi Fungsi TNI/Polri. Mereka juga menyerukan agar mahasiswa, buruh dan kaum miskin kota bergandengan tangan menyusun kekuatan untuk menghancurkan sisa-sisa Orde Baru.

Masih pada hari yang sama (18/8), ratusan buruh PT Berdikari Sari Utama Flors Mills Makassar melakukan mogok kerja selama dua hari mulai tanggal 18 Agustus.

Perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat pelabuhan ini menuntut kenaikan upah sebesar 100 persen. Aksi ini sepenuhnya didukung berbagai kelompok gerakan di Makassar seperti : SMM-LMND, FNPBI, GPK, GMKI, KONTRA, FORUM KILO 4 dan PRD yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Tertindas (APRT). Karena pengusaha bersikeras menolak memenuhi tuntutan buruh, aksi berlanjut keesokan harinya. Reaksi aparat bertambah keras, ratusan polisi dari Poltabes Makassar mengepung dan menyerang massa buruh. Beberapa orang mengalami cedera, seorang buruh bernama Syamsul, patah tulang kaki. Dalam orasinya diserukan tentang pentingnya perjuangan rakyat secara bersama-sama.

Tanggal 4 September, PRD bersama sekitar 400 massa dari berbagai organisasi seperti LMND dan KAM Jakarta, melakukan aksi di tempat diadilinya mantan presiden Soeharto, di Gedung Departemen Pertanian, Jakarta Selatan. Aksi ini bukan hanya menuntut Soeharto diadili hanya sebagai pelaku KKN, tetapi juga sebagai pelaku pelanggaran HAM. Pada sore harinya massa bertambah banyak, lalu mereka melanjutkan aksinya di seputar Taman Suropati, berdekatan dengan kediaman Soeharto. Aksi ini berakhir dengan bentrokan, antara massa aksi dengan pendukung Soeharto.

Tanggal 28 September, PRD bersama sekitar 4.000 massa yang berasal dari berbagai kelompok seperti LMND, Forkot dan FRAROB, melakukan aksi di dekat gedung Pertanian, Jakarta Selatan tempat diadilinya Soeharto. Aksi ini menuntut supaya pengadilan Soeharto bukan hanya sebagai pelaku KKN, tetapi juga pelaku pelanggaran HAM. Sekitar pukul 11.00 pendukung Soeharto datang ke lokasi menuntut diberhentikannya sidang. Massa yang berjumlah 200-an orang tersebut langsung dihajar oleh masa yang marah. Aksi ini berakhir dengan bentrokan antara aparat dengan massa. Banyak pengunjukrasa terluka, sebagian yang lain ditangkap.

Tanggal 2 Oktober, lebih dari 1.000 massa rakyat bergerak menuntut pembatalan pencabutan subsidi BBM. Kenaikan harga BBM sebesar dua persen yang ditetapkan pemerintah pada 1 Oktober. FRAROB, yang di dalamnya tergabung PRD, menolak pencabutan subsidi tersebut. Menurut mereka pemerintah masih memiliki sejumlah alternatif, anggaran untuk utang luar negeri, alokasi penyehatan perbankan yang nilainya jauh lebih besar dari pencabutan subsidi BBM tersebut, dan menyarankan kepada seluruh massa rakyat untuk menolak kenaikan tersebut.

Tanggal 1 Oktober, di Surabaya, PRD bersama kelompok-kelompok lain seperti FNPBI, KOSEK, dan LMND, mendukung aksi buruh PT Mepoly yang menentang pemecatan terhadap sejumlah buruh. Aksi ini berakhir dengan bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat. Ketua KPK PRD Surabaya, Roni, beserta 8 buruh PT Mepoly ditangkap dan ditahan di Mapolresta Surabaya.

4.1.9 Tahun 2001

Tanggal 29 Januari, bertepatan dengan berlangsungnya Sidang Pansus, PRD bersama FNPBI, Front Kota, Famred, GPK, API, LMND, FPPI, FAMPI, STN, Jaker, melakukan aksi di Gedung DPR/MPR. Dalam aksi yang diikuti sekitar 2000 massa ini, mereka menuntut pembubaran Partai Golkar dan penghancuran sisa-sisa Orde Baru lainnya. Aksi ini terulang kembali pada 1 Februari 2001.

Tanggal 7 Februari, PRD bersama sekitar satu juta massa yang terdiri dari berbagai elemen rakyat yang tergabung dalam Front Reformasi Total (FRT), menggelar aksi menuntut pembubaran dan pengadilan terhadap Partai Golkar. Dalam statemennya FRT antara lain menyatakan; "Sisa-sisa Orde Baru kekuatannya tidak hanya di Jakarta melainkan sampai ke daerah tingkat II dan mereka akan memanfaatkan otonomi daerah yang sekarang ini sudah diberlakukan. Upaya menghancurkan sisa-sisa orde baru tidak cukup hanya dilakukan di pusat melainkan sampai ke daerah."

4.1.10 Tahun 2002

Tanggal 7 Januari, 100 massa PRD dan Aliansi Anti Pencabutan Subsidi (A2PS) berdemonstrasi menentang kenaikan BBM, tarif listrik dan telepon, di depan istana negara. "Menko Perekonomian (Dorodjatun Kuntjoro Jakti) adalah mafia Berkeley yang kebijakannya cenderung memihak IMF," ujar Natalia Scholastika, Sekjen KPP PRD.

Dua bulan kemudian, 7 Maret, PRD bersama FNPBI, HMI-MPO dan BEM se-Jawa, melakukan demonstrasi menuntut pengadilan Partai Golkar dan penahanan Akbar Tandjung karena terlibat korupsi dana Bulog sebesar Rp 54 Milyar. Dalam aksi yang diikuti sekitar 500 massa ini, mereka juga menuntut Akbar untuk mundur dari Ketua DPR.

Tanggal 10 April, di Kampus UGM Yogyakarta, PRD bersama LMND, SPI, Lingkar Diskusi Perempuan yang bersatu dalam Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM) melakukan demonstrasi untuk menyatakan dukungan penuh bagi kemerdekaan rakyat Palestina. Dalam aksi yang diikuti sekitar 50 massa ini mereka melakukan *long march* dari Kampus Fakultas Filsafat UGM menuju Monumen Serangan Umum 1 Maret di Jalan Malioboro.

Tanggal 19 April, di Jakarta, puluhan massa PRD melakukan demonstrasi di depan Kedubes AS, menuntut penarikan mundur tentara Israel dari Palestina, dan mendukung kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

Tanggal 25 Maret, di Makassar, 26 orang dari Aliansi Perjuangan Rakyat tertindas yang terdiri dari HMI-MPO, PRD, FNPBI, LSPP dan GPK melakukan demonstrasi di Kantor Kejati Sulawesi selatan. Mereka mendukung pembentukan Pansus Buloggate II, pengunduran Akbar dari ketua DPR, dan pembentukan Mahkamah Rakyat untuk mengadili Golkar. Aksi ini berakhir dengan bentrokan antara demonstran dengan para pendukung Golkar. Sementara pada hari yang sama di Jakarta, sekitar 50 orang dari PRD, GPK, FNPBI berdemonstrasi di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuntut pengadilan Partai Golkar dengan pengadilan *ad hoc*, dan pengunduran Akbar dari Ketua DPR.

Pada tanggal 20 April 2002, di Yogyakarta sekitar 50 massa dari front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM) berdemonstrasi menyatakan dukungan penuh bagi kemerdekaan rakyat Palestina. FPRM yang terdiri dari PRD, LMND SPI, Lingkar Diskusi Perempuan menggelar aksi rally dari Fakultas Filsafat UGM menuju Monumen Serangan Oemoem 1 Maret di Jalan Malioboro. Dalam orasinya, FPRM menyatakan bahwa tidak benar pendukung perjuangan rakyat Palestina mengobarkan sentiment agama dan ras. "Dukung Penuh perjuangan pembebasan nasional rakyat Palestina!" begitu mereka menyeru. Aksi tentang tema yang sama kembali digelar PRD di Jakarta, yaitu pada tanggal 19 April. Puluhan massa PRD berdemonstrasi di depa Kedutaan besar (Kedubes) AS menuntut penarikan mundur tentara Israel dari Palestina dan mendukung kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Tiga hari kemudian, 22 April, di Palu sekitar 250 massa dari Forum Rakyat Miskin Sulawesi Tengah berdemonstrasi di gedung DPRD I. Mereka mengecam pemerintah dan legislative baik di pusat maupun

daerah, yang tidak mengutk serangan Israel terhadap bangsa Palestina serta mendukung perjuangan pembebasan nasional rakyat Palestina.

Pada tanggal 22 April, di Surabaya, PRD bersama sejumlah organ mahasiswa seperti LMND, PAM Unitomo, GMNI dan PMKRI, mendukung aksi ratusan warga Semampir Surabaya. Mereka menolak untuk direlokasi karena tidak ada jaminan dari pemerintah tentang bagaimana lokasi lingkungan, air bersih di tempat yang baru. Warga menutup jalan dengan kayu dan menghalangi petugas yang jendak merusak tenda-tenda warga. Suasana histeris terasa ketika di Kawasan Medokan Semampir Jalan Nginden Intan, sekitar 150 petugas berusaha merelokasi 35 kepala keluarga.

Tanggal 1 Mei merupakan hari buruh sedunia. Memperingati hari buruh ini, di Yogyakarta sekitar 200 massa dari PRD dan organ lain yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM) dan Komite Mahasiswa Yogyakarta (KMY) berdemonstrasi menuntut agar 1 Mei dijadikan hari libur nasional. Aksi yang sama juga dilakukan PRD di Surabaya dan Jakarta. Di Surabaya sekitar 200 massa dari PRD dan organ lain yang tergabung dalam Komite Pemogokan Rakyat Miskin (KPRM) berdemonstrasi mengajukan 12 tuntutan, diantaranya kenaikan upah 100 persen, stop PHK, pendidikan, dan kesehatan gratis, dan buka lapangan pekerjaan untuk rakyat. Dalam aksi ini terjadi bentrokan antara massa dengan petugas di Jalan Semarang, ketika polisi hendak membubarkan aksi ini dengan kekerasan. Akibat dari bentrokan ini puluhan massa mengalami luka-luka, dan 7 orang ditangkap.

Pada 8 Mei 2002, di Jakarta sekitar 50 massa PRD berdemonstrasi di depan Istana Negara menentang pemerintahan Mega-Hamzah yang mereka nilai sebagai anti terhadap pemerintahan rakyat miskin. Massa PRD membawa boneka Megawati yang rencananya akan dibakar, namun sebelum api menyentuhnya, boneka tersebut dirampas aparat kepolisian, hingga sempat terjadi aksi rebutan boneka. Aksi serupa juga digelar PRD bersama organ mahasiswa lainnya di beberapa kota seperti di Yogyakarta, Surabaya, Semarang dan Purwokerto. Di Yogyakarta, ratusan massa dari FPRM, KAMMI, dan KM UGM secara terpisah berdemonstrasi mengecam pemerintahan Megawati yang tak mampu menuntaskan KKN, malah sebaliknya menjadi agen IMF. Mereka juga menolak kenaikan BBM dan TDL (tarif dasar listrik).

Memperingati jatuhnya rezim Suharto, pada 21 Mei di Palu, sekitar 1000 massa dari PRD dan HMI-MPO Palu, FNPBI dan lain-lain, berdemonstrasi menuntut agar Megawati dan Hamzah Haz segera turun dari tampuk kepemimpinan nasional. Aksi dimulai di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dilanjutkan ke DPRD dan Mapolda Sulteng. Di Jalan Sam Ratulangi, massa membakar dua patung Megawati dengan gantungan papan triplek bertuliskan "Mega antek IMF, Mega-Hamzah turun".

Masih dihari yang sama, 21 Mei, sekitar 5000 massa gabungan dari Forum Kota (Forkot), FNPBI, Famred, Jaringan Kota, HMI-MPO, PRD, Forum Betawi, Gerakan Betawi 27 Juli, Gerakan Revolusi 2002 dan lain-lain berdemonstrasi bersama menolak kenaikan BBM dan kebutuhan pokok, mengajak melakukan perlawanan terhadap rezim Mega-Hamzah, serta menuntut pengadilan para pelanggar berat HAM TNI-Polri. Massa ini mengadakan long march dari Istana Negara, DPR RI, dan sepanjang jalan Sudirman-Thamrin. Di tengah aksi besar-besaran tersebut, kepolisian RI menurunkan sekitar 7.000 personilnya untuk berjaga-jaga di berbagai sudut kota. Di tengah aksi tersebut, sekitar 200 massa mahasiswa dari Jaringan Kota berdemonstrasi menuntut agar Soeharto dan kroninya diseret ke Mahkamah Rakyat. Aksi ini berakhir dengan terjadinya bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian di dekat Jalan Cendana. Polisi menyerang dengan pentungan dan tembakan peluru karet, mahasiswa melawan dengan melemparkan bom molotov. Puluhan mahasiswa mengalami luka-luka, dan 17 ditangkap.

Tanggal 11 Juli 2002, dalam acara peluncuran Tabloid "Pembebasan", KPP PRD mengundang sejumlah tokoh dan ratusan aktivis di Gedung Jakarta Media Center (JMC). Hadir dalam acara ini antara lain KH Abdurahman Wahid, Jeffry Winters, Max Lane, Revrison Baswir, Aristides Katoppo, Dita Indah Sari dan Natalia Scholastika. Dalam acara tersebut PRD menjajaki kemungkinan untuk segera membentuk Front Demoratik dengan melibatkan elemen masyarakat yang lebih luas. Meski belum menentukan bentuk yang pasti, tetapi gagasan ini disambut banyak kalangan yang hadir saat itu, dan disepakati untuk dibicarakan secara intersif di forum berikutnya.

Tanggal 2 Oktober 2002, PRD bersama sejumlah organ mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Poros Mahasiswa Jakarta Raya menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta dianulir, karena

akan terus dilakukan sampai tuntutan dipenuhi. Mereka juga berencana akan menggelar aksi penolakan atas kedatangan Megawati yang akan hadir di Palu pada tanggal 15 Januari.

Pada 14 Januari 2003, PRD bersama ribuan massa di Palembang berkumpul di kantor DPRD Sumatera Selatan untuk menggelar aksi memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, TDL dan telepon. Dalam kesempatan itu sejumlah mahasiswa bahkan sempat menyandera dua mobil tangki minyak. Selain PRD, massa yang terlibat dalam aksi itu antara lain LMND, SPSI, massa PNBK, mahasiswa Universitas Taman Siswa dan IBA, Universitas Muhammadiyah, Universitas Sriwijaya, Universitas Bina Dharma dan Universitas PGRI.

1 Mei 2003, di Bandung PRD bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi memperingati hari buruh sedunia. Aksi memperingati Hari Buruh dipusatkan di Lapangan Gasibu Bandung. Selain PRD, massa yang tergabung dalam aksi ini antara lain dari Federasi Persatuan Perjuangan Buruh (FPPB), Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) dan Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI). Aksi yang sebenarnya berlangsung damai ini diwarnai dengan penangkapan tujuh aktivis buruh. Mereka adalah Hilman (19), Hilmi (24), Ikhsan (20), Dede Firman (17), Dian (23), Mira (20) dan Indra (20). Ketujuh orang tersebut tergabung dalam Forum Diskusi Pemuda dan Jaringan Mahasiswa Demokratik (JMD). Aksi yang sama juga dilakukan massa PRD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 12 Mei, di Makassar massa PRD kembali menggelar demo di DPRD Sulawesi Selatan. PRD menyatakan menolak Operasi Militer di Aceh, dan menyeru agar dilakukan dialog antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh. Dalam aksinya, selain membawa panji-panji PRD, massa juga menggelar berbagai spanduk, antara lain bertuliskan "Tolak Operasi Militer di Aceh", "Bubarkan Parlemen" dan Gulingkan Rezim Mega-Hamzah". Menurut Ketua PRD Kota Makassar, Arsoni, persoalan Aceh harus diselesaikan dengan jalan dialog. Yakni dialog yang melibatkan tiga kekuatan dasar, yakni; rakyat Aceh yang terdiri dari kaum agamawan, akademisi, tokoh masyarakat, GAM, mahasiswa dan pemuda Aceh. Yang kedua, LSM, baik luar maupun dalam negeri dan yang ketiga pemerintah pusat. Arsoni juga melihat adanya Henry Dunant Center (HDC) yang memfasilitasi dialog Aceh tidak obyektif dan tidak

demokratis. “Karena HDC tidak melibatkan kelompok lain dari lapisan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, PRD Makassar mengeluarkan pernyataan sikap, yaitu adakan dialog masyarakat Aceh secara obyektif dan demokratis, tarik mundur pasukan TNI dan Polri dari Aceh, dan bekukan institusi militer”, tegas Arsoni.

4.1.12 Tahun 2004

Memasuki tahun 2004, situasi Indonesia diwarnai oleh menghangatnya persaingan antar kekuatan politik untuk memperebutkan kekuasaan dalam pemilihan umum. PRD merespons situasi ini dengan mengusung isu bahwa Pemilu 2004 bukan jalan keluar bagi rakyat Indonesia. Dalam pandangan PRD, Pemilu 2004 adalah upaya penyegaran legitimasi formal bagi jalannya kekuasaan partai-partai sisa Orde Baru dan Reformis Gadungan. Di mata PRD, partai-partai yang selama ini berkuasa telah berkhianat terhadap rakyat. Karena mereka tidak konsisten menghapuskan dwi fungsi TNI, menjual harta negara dan rakyat, mencabut subsidi dan menjalankan pasar bebas tanpa berupaya melindungi/mematikan tenaga produktif di sektor pertanian, tidak konsisten mengadili para koruptor. Ini semua bagi PRD, cukup menjadi alasan untuk melawan kekuasaan yang sekarang ini ada, termasuk menentang agenda mereka untuk menyelenggarakan Pemilu 2004.

Pada bulan Januari 2004, PRD pun bersama dengan sejumlah organisasi lain, lalu menggelar aksi serentak di Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari dan Palu. Di Samarinda kader-kader PRD melakukan aksi membagi selebaran yang membongkar kebusukan Pemilu 2004. Aksi serentak ini membuktikan bahwa kekompakan dan militansi para aktivis PRD masih terjaga dengan baik di semua lini.

Memasuki akhir bulan Januari, perhatian masyarakat Indonesia tersedot ke sidang Mahkamah Agung yang mengadili kasus korupsi yang dilakukan oleh Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar. Berbagai elemen rakyat, termasuk PRD, menggelar aksi besar-besaran di berbagai tempat untuk menuntut agar MA berlaku adil dengan menghukum Akbar Tanjung. Besarnya tuntutan masyarakat untuk memenjarakan Akbar Tanjung ini membuat majelis menunda untuk tidak membacakan keputusan yang

seharusnya dibacakan pada hari itu, Kamis 29 Januari 2004. Keputusan baru akan dibacakan seminggu kemudian.

Menjelang pembacaan keputusan MA terhadap kasasi Akbar Tanjung, gelombang demonstrasi terus meningkat. Di Jakarta (4/2) Aksi Bersama Anti Orde Baru membuat situasi di MA panas. Ratusan massa dari berbagai elemen gerakan berhadapan dengan sejumlah massa pendukung Akbar Tanjung. Aksi Anti Orde Baru antara lain diikuti oleh FAM UI, KAMMI, LMND, BEM UI, JMD, JAMUR, dan tentu saja PRD dan FNPBI. Selain menuntut pengadilan Akbar Tanjung, para demonstran Anti Orde Baru juga menuntut pengadilan Partai Golkar dan meminta pertanggungjawaban dari partai-partai penguasa (PDIP, PKB, PAN, PBB, PPP dan PKS) yang dianggap melindungi Golkar. Aksi di depan gedung MA ini juga diikuti puluhan sopir bajaj yang berkonvoi mulai dari Monas hingga ke Jalan Medan Merdeka Utara. Para sopir bajaj tersebut menuntut agar Akbar Tanjung dihukum, dengan menempeli bajaj mereka dengan foto Akbar Tanjung yang bertuliskan "Akbar Tanjung Buronan Rakyat", "Koruptor", "Gantung Akbar" dan lain-lain.

Aksi serupa juga dilakukan PRD bersama organ-organ kemasyarakatan lainnya di berbagai kota, seperti di Yogyakarta, Solo, Lampung, Palembang, dan Palu. Tetapi semua aksi ini tidak membuat para hakim agung yang bersidang di MA terbuka mata hatinya. Mereka, seperti sudah diduga banyak pengamat sebelumnya, akhirnya memutus bebas Akbar Tanjung.

Memperingati hari Perempuan sedunia, 8 Maret 2004, di Palu PRD bersama ratusan aktivis lainnya menggelar aksi menggugat UU Perkawinan (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), terutama soal poligami. Dalam aksi ini turut bergabung, selain para aktivis LSM, ibu rumah tangga, mahasiswi, dan juga para pelacur. Mereka menggelar aksinya di Bundaran Hasanuddin I, Pusat Pertokoan di Palu. Ako Arianto, Ketua KPW PRD Sulawesi Tengah yang memimpin aksi massa itu menegaskan, PRD dan perempuan di Palu menolak kriminalisasi pelacuran. "Kami meminta agar Negara memberikan jaminan kepada para pekerja perempuan untuk mendapatkan gaji sesuai hasil dan waktu kerja mereka, bukan seperti pekerja part time," kata Eko.

Memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei, para aktivis PRD bersama organ-organ massa yang lain menyelenggarakan aksi di Jakarta, Yogyakarta, Bandung.

Surabaya, dan Semarang. Di Jakarta, selama 15 menit, sekitar 3000 massa berhasil memaksa RRI mengumandangkan pernyataan sikap mereka. Lewat corong RRI, Dita Sari, Ketua FNPBI dan Arief Minardi Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PTDI yang tergabung dalam Barisan Oposisi Bersatu, menyatakan, militer lewat pencalonan para bekas jendralnya (Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono) merupakan ancaman terhadap demokrasi dan perjuangan buruh serta rakyat yang tertindas lainnya. Menurut Dita, pemerintahan Megawati telah memfasilitasi/memberi ruang naiknya kembali militer dalam politik. Karena itu mereka menyerukan agar masyarakat tidak ikut pemilu dan bersatu menghadang militerisme.

Tanggal 4 Mei, kembali Jakarta diramaikan oleh berbagai aksi massa mahasiswa untuk menolak militerisme. Mereka yang turun ke jalan menggelar aksi itu, selain PRD adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Barisan Muda PAN, Kontras, Walhi, Laskar Pemuda Rakyat Miskin. Berbagai elemen itu bersatu dalam Barisan Oposisi Bersatu. Pada saat yang sama HMI se-Jakarta, Front Rakyat untuk HAM dan Liga Mahasiswa Islam Indonesia juga menggelar aksi menuntut diadilinya para pelaku, pelanggar HAM dalam peristiwa kekerasan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dan proses penangkapan kembali Ustadz Abubakar Ba'asyir. Mereka juga menuntut agar Kapolri Jendral Polisi Da'i Bachtiar dipecat dan diadili saat itu juga.

4.1.13 Tahun 2005-2009

Selama periode ini, dalam aksi-aksinya PRD masih terus menyerang kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. PRD menganggap semua kebijakan yang dijalankan pemerintahan adalah perpanjangan tangan dari kepentingan asing. Dalam sebuah aksi di bulan Mei 2006, PRD dalam pernyataan sikapnya menyatakan:

Ternyata pemerintah SBY-JK menganggap karakter bangsa telah cukup terbangun, hingga berani mengizinkan negara-negara maju berinvestasi dalam pendidikan nasional. Jika memang demikian, sudah cukup banyak negara yang bersiap. Paling tidak ada tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari bisnis pendidikan, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Pada tahun 2000 ekspor jasa

pendidikan Amerika mencapai US \$ 14 milyar. Di Inggris sumbangan ekspor pendidikan mencapai 4 persen dari total penerimaan sektor jasa negara tersebut. Demikian juga dengan Australia, yang pada tahun 1993, ekspor jasa pendidikan dan pelatihan telah menghasilkan AUS \$ 1,2 milyar. Tidak mengherankan tiga negara tersebut yang amat getol menuntut sektor jasa pendidikan melalui WTO.

Pemerintah SBY-JK tampaknya kurang ber-istighfar. Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Dalam tahun 2008 angka tersebut meningkat, karena terjadi penambahan putus sekolah sekitar 841.000 siswa sekolah dasar dan 211.643 siswa SMP/madrasah tsanawiyah. Jadi, total kepala yang tak mampu dididik oleh Negara hingga tahun 2009 adalah sebesar 13 juta jiwa. Bisakah dibayangkan? Tiga belas juta pemuda pemudi di seluruh pelosok nusantara bekerja di bawah usia kerja, berkeliaran mencari kerja, melacurkan diri di lorong-lorong, atau bergeletakkan di jalanan mengemis.

Sejak awal tahun pemerintahannya, SBY-JK sebenarnya sudah cukup menghadapi situasi sulit. Depdiknas (2004) menyebutkan: jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi hanya 45,8%; dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun. Tentu dapat diduga situasi apa yang terjadi pada perguruan tinggi. Pada tahun ajaran 2003/04 angka melanjutkan ke perguruan tinggi baru mencapai 14,25%, hanya meningkat menjadi 15,0% pada tahun ajaran 2005/06.⁷⁶

Dari pernyataan sikap di atas, terlihat bahwa PRD tetap mengkritisi kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak berhasil menyejahterakan masyarakat luas. Aksi-aksi yang mereka lakukan berjalan dengan memanfaatkan momentum-momentum peringatan hari-hari besar nasional maupun menyikapi kebijakan-kebijakan yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti pada tanggal 12 Juni 2009, PRD melakukan aksi unjuk rasa dalam menentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam pernyataan aksinya mereka menyatakan:

Sejak awal program BLT telah mengundang kontroversi. Ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dua kali pada Maret dan Oktober 2005, jaring pengaman pun dibuat sebagai kompensasi untuk warga miskin lewat program BLT. Sekitar 19,1 juta kepala keluarga diberi uang Rp100 ribu per bulan selama setahun. Namun, pelaksanaan program itu tidak berjalan mulus. Bukan hanya dananya banyak yang tidak utuh

⁷⁶ Naskah ini dibacakan oleh Agus Jabo Priyono (Ketua Umum KPP-PRD) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2006, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

sampai ke tangan warga miskin, melainkan juga telah meminta korban jiwa karena kelelahan mengantre atau terinjak-injak.

Program BLT juga dinilai tidak mendidik masyarakat dan hanya mengentalkan mental pengemis warga miskin. Pemerintah dituding hanya menyodorkan ikan, bukan kail. Rakyat miskin tidak diberdayakan agar mampu keluar dari kemiskinan. Meski kritik bermunculan dan hasil survei menyebutkan bahwa efektivitas BLT hanya sekitar 55%, pemerintah tetap saja 'ngotot' menggulirkan BLT. Untuk tahun ini saja, program yang kini bernama BLT plus--karena selain uang warga miskin juga memperoleh gula dan minyak goreng-- pemerintah menyediakan anggaran hingga Rp28 triliun.

Yang menjadi persoalan, mengapa program BLT harus dari utang? Padahal, utang pemerintah terus menggelembung hingga mencapai Rp1.600 triliun. Itu sama artinya, setiap penduduk Indonesia harus menanggung sekitar Rp12 juta utang pemerintah. Tidak efektifnya program BLT juga bisa dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Meski APBN 2009 jauh meningkat hingga Rp1.034 triliun dari sebelumnya Rp380 triliun pada 2004, anggaran untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan juga ikut naik tajam. Bila pada 2004 anggaran kemiskinan baru mencapai Rp18 triliun, pada 2008 melompat hingga Rp70 triliun. Itu sama artinya, jumlah orang miskin dan pengangguran kian bertambah.⁷⁷

Pada saat yang sama, banyak organisasi buruh dan tani yang menolak pemilu 2009 dan menyerukan boikot karena semua partisipan pemilu ini adalah partai-partai pro-kapitalis. KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), KPRM-PRD, PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja), dan sejumlah serikat buruh dan organisasi mahasiswa lainnya melakukan aksi bersama pada tanggal 14 Maret 2009 menyerukan boikot pemilu 2009 dan menuntut:

- a. Bangun organisasi politik yang melibatkan kaum buruh, tani, mahasiswa dan rakyat tertindas lainnya.
- b. Nasionalisasi asset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak di bawah kontrol rakyat.
- c. Industrialisasi yang kuat dan mandiri.
- d. Hapus dan tolak hutang luar negeri.

⁷⁷ Pernyataan sikap ini disebarakan saat aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia pada 12 Juni 2009.

- e. Sita harta koruptor untuk subsidi pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat.

Isu yang muncul dalam aksi-aksi mereka dalam periode ini juga seputar isu “neoliberalisme” yang dianggap dianut oleh pemerintahan dan pejabat-pejabat negara. Menjelang dan setelah Pilpres 2009, isu ini santer dilontarkan dalam aksi-aksi PRD menyikapi kebijakan pemerintah yang dianggap perpanjangan tangan dari kepentingan negara asing.

4.1.14 Tahun 2010

Tahun ini sudah terlihat perpecahan gerakan dalam tubuh PRD. Aksi-aksi antara KPP-PRD dan KPRM PRD sudah sangat sporadis dan tidak mau bergabung dalam sebuah front. Walaupun KPP-PRD yang saat 2009 gagal dalam memasukkan wakil-wakilnya dalam parlemen serta gagal dalam mendukung pasangan JK-Wiranto, KPRM PRD tetap menganggap hal tersebut adalah sebuah penghianatan terhadap kepentingan masyarakat miskin. KPRM PRD dan underbownya seperti kelompok Pembebasan terus melancarkan aksi-aksi memanfaatkan momentum yang menyangkut masalah kesejahteraan rakyat, sedangkan KPP-PRD lebih sering melakukan diskusi internal serta lebih aktif melakukan propaganda di internet.⁷⁸

4.2 Perpecahan Internal PRD

Dalam perjalanannya, PRD memiliki beberapa kali fase perpecahan yang mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan baru hasil pecahan dari PRD. Berikut ini adalah beberapa kali konflik internal dalam PRD.

4.2.1 Kedekatan Budiman Sujatmiko dengan Presiden Abdurahman Wahid

Dalam periode tahun 2000, perpecahan dalam tubuh PRD muncul setelah beberapa tokoh PRD seperti Ir. Coen Husuein Pontoh (Departemen Pendidikan KPP-PRD), Hendrianto Kuok, SH (Departemen Pendidikan dan Kolektif HI KPP-PRD),

⁷⁸ KPP PRD memiliki situs resmi berdikarionline.com serta group di situs jejaring sosial Facebook bernama "Hentikan!!!" yang sampai saat ini masih aktif menyampaikan protes-protes terhadap kebijakan pemerintah.

Mugiyanto (Departemen Pendidikan dan Kolektif HI KPP-PRD), Ida Nasim Mh (Departemen Perjuangan Rakyat KPP-PRD), Dyta Caturani (Departemen Perjuangan Rakyat dan Kolektif HI KPP-PRD), dan Muhamad Ma'ruf (Departemen Bacaan KPP-PRD) menyatakan keluar dari PRD dan mendirikan Perhimpunan Demokratik Sosialis (PDS), pada tanggal 14 Nopember 2000.⁷⁹ Tokoh-tokoh PRD tersebut menganggap bahwa sikap PRD di bawah kepemimpinan Budiman Sujatmiko pada saat itu tidak kritis dan tidak tegas terhadap pemerintahan Gus Dur (Alm).

Beberapa tokoh PRD di atas menganggap bahwa PRD telah mendukung kebijakan Presiden Gus Dur (Alm) ketika berencana membubarkan parlemen dan membacakan dekrit. Mereka menganggap PRD di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko menginginkan Gus Dur tetap memerintah sampai 2004.

4.2.2 Wacana PRD dalam Mengikuti Pemilu 2004 dan 2009

KPP-PRD sangat berharap menjadikan ajang pemilu sebagai ruang politik untuk mendorong maju kesadaran rakyat dan sekaligus menawarkan tradisi berpolitik baru kepada rakyat. Tujuan PRD bukan persaingan pemilu untuk mendulang suara, melainkan untuk menjalankan aksi politik yang permanen, yakni menawarkan tradisi dan bentuk politik baru kepada rakyat.⁸⁰ Namun hal ini disangkal oleh beberapa tokoh PRD lainnya, seperti Zely Arine (saat ini menjadi jubah KPRM PRD) yang menyatakan bahwa:

KPP-PRD telah gagal membuat alat persatuan yang riil untuk Pemilu karena persatuan tersebut bukanlah hasil dari hidupnya atmosfer perlawanan dan mobilisasi radikal melawan hambatan-hambatan pemilu yang tidak demokratik, melawan negara penindas dan penyebab kemiskinan rakyat. Pertentangan inilah yang menyebabkan konflik internal di dalam PRD terus terjadi.⁸¹

⁷⁹ Keluarnya tokoh-tokoh tersebut dinyatakan dalam Presidium Nasional PRD ke VI (sejenis Rapim), yang diselenggarakan dari tanggal 11-14 Nopember 2000 di Jakarta. Presidium Nasional tersebut merupakan forum rapat yang dihadiri Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.

⁸⁰ Rudi Hartono (KPP-PRD) dalam artikel PRD dan Strategi Elektoral (2004 dan 2009), Indoprogress.blogspot.com, diakses pada 15 November 2010.

⁸¹ Wawancara dengan Zely Ariane, pada 24 Oktober 2010.

Dalam perjalanannya, PRD telah beberapa kali melakukan usaha melalui jalur Pemilu, usaha pertama dari kelompok kiri untuk mengintervensi pemilu paska Soeharto adalah partisipasi PRD di pemilu 1999. Walaupun PRD memainkan sebuah peran yang cukup signifikan dalam membangun gerakan sampai kejatuhan Soeharto, kekuatan mereka masih terlalu kecil untuk bisa meraih kemenangan di Pemilu ini. Berbagai perdebatan internal di dalam tubuh PRD mengenai bagaimana merespon pemilu juga mengalihkan dasar dan tujuan organisasi ini. Secara umum, ada tiga posisi yang didebatkan di dalam PRD: 1) Boikot pemilu sepenuhnya, 2) Pilih PRD atau boikot pemilu, 3) Pilih partai reformis manapun. Karena faktor-faktor ini, PRD saat itu hanya mampu memperoleh sekitar 80 ribu suara.

Pada tahun 2004, PRD kembali mencoba berpartisipasi di dalam pemilu. Pada tanggal 27 Juli 2003, PRD dengan lebih dari 50 organisasi kiri lainnya membentuk sebuah partai elektoral dengan nama Partai Persatuan Oposisi Rakyat (Popor). Dita Indah Sari saat itu terpilih sebagai ketua umumnya. Akan tetapi UU pemilu yang baru menyebabkan POPOR tidak memenuhi kualifikasi pemilu. Di lain pihak, debat di dalam tubuh PRD mengenai masalah boikot menghambat perkembangan partai ini seperti pada Pemilu tahun 1999. Pada waktu yang sama, banyak aktivis saat itu menyerukan sebuah boikot pemilu secara total.

Selanjutnya pada tahun 2007, PRD berinisiatif membentuk sebuah partai untuk berpartisipasi pada pemilu 2009 dengan nama Partai Persatuan dan Pembebasan Nasional (Papernas). Pada tanggal 17 Januari 2007, kongres pembentukan Papernas diserang oleh kelompok anti-komunis. Dengan menggunakan sentimen anti-komunis yang masih ada di masyarakat, tripanji Papernas: "Tripansi Persatuan untuk Kesejahteraan Rakyat": Nasionalisasi sektor pertambangan (termasuk minyak dan gas), hapus utang luar negeri Indonesia, dan bangun industri nasional, diserang dan dianggap sebagai sebuah program komunis. Pada akhirnya, UU pemilu juga tidak meloloskan Papernas untuk ikut serta pemilu. Untuk bisa berpartisipasi di dalam pemilu, sebuah partai harus memiliki cabang di lebih dari 50% propinsi yang ada, dan di setiap propinsi dimana partai tersebut memiliki anggota mereka harus memiliki cabang di lebih dari 50% distrik, dan di setiap distrik lebih dari 30% sub-distrik. Oleh karena aturan tersebut, Papernas kembali gagal mengikuti Pemilu 2009 secara kepartaian.

4.2.3 Pro-Kontra Keikutsertaan Beberapa Tokoh PRD dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

PRD melihat Pilkada langsung sebagai medan baru perjuangan. Taktik intervensi Pilkada disusun, diprioritaskan di daerah-daerah tertentu. Sejumlah kader diterjunkan untuk membantu kampanye dan penggalangan front. Strategi ini tidak ada yang berhasil, justru di Sulawesi calon kepala daerah yang sepakat dengan program yang ditawarkan PRD justru datang dari Partai Golkar.

PRD memutuskan lebih awal membentuk partai untuk mengikuti Pemilu 2009. Komite persiapan dibentuk, struktur-struktur wilayah dan kota dibenahi, dan dikumpulkan dalam ajang Kongres di Yogyakarta yang dibayang-bayangi teror anti-komunis. Acara-acara deklarasi terbuka dan aksi Papernas (partai yang disponsori PRD) terus menjadi sasaran serangan kelompok sayap kanan anti-komunis.

Akhirnya, dari hasil pengecekan oleh pimpinan Papernas ke daerah-daerah tidak memenuhi target untuk didaftarkan ke Depkumham. Diputuskan untuk menjajaki koalisi dengan partai-partai lain, proses itu masih terus berlanjut, tapi sudah membuat gonjang-ganjing di tubuh PRD. Strategi PRD dan Papernas tersebut akhirnya gagal karena tidak lolos uji persyaratan Partai Politik di Depkumham.⁸²

Mereka lalu mulai menyusun strategi dengan mengikutsertakan beberapa tokoh KPP-PRD dalam pemilihan calon legislatif melalui partai lain, yakni Partai Bintang Reformasi (PBR). Hal inilah yang lalu mempertajam konflik internal dalam tubuh PRD. Untuk memperkuat dukungan rakyat terhadap keikutsertaan KPP-PRD dalam Pemilu Legislatif, mereka lalu medeklarasikan berdirinya Sukarelawan Perjuangan rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) pada 22 Februari 2009. Beberapa tokoh PRD yang mengikuti pemilihan Caleg antara lain Benediktus Adu (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), Marlo Sitompul (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), Dita Indah Sari (Serikat Rakyat Miskin Indonesia), serta Muhammad Anshar (KPW PRD Sulawesi Selatan). Strategi ini juga mengalami kegagalan karena tidak ada satupun Caleg dari PRD yang lolos menjadi anggota dewan

⁸² Wawancara dengan Rudi Hartono (Litbang KPP-PRD) pada 10 November 2010.

BAB 5

IMPLIKASI GERAKAN PRD TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN RADIKALISASI GERAKAN KIRI DI INDONESIA

5.1 Implikasi Pergerakan dan Perpecahan PRD terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia

PRD sampai saat ini masih terus membangun kekuatan untuk terus berusaha mendelegitimasi pemerintahan yang dianggap menganut paham neoliberal dan kapitalisme yang menyengsarakan rakyat. Mereka berkeyakinan untuk bisa terus bergerak dengan sandaran utamanya adalah gerakan massa yang sadar (*bewuste massa-actie*).⁸³ Untuk itu, dalam rangka mendorong politik massa ini, PRD menganjurkan penggalangan konsultasi-konsultasi umum dengan massa rakyat, misalnya menggalang tanda-tangan rakyat Indonesia untuk mosi tidak percaya terhadap rejim neoliberal sekarang ini. Ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke kampung-kampung, pemukiman, pabrik-pabrik, desa-desa, dengan mendatangi satu persatu rumah masyarakat dan menawarkan petisi untuk mosi tidak percaya kepada pemerintah. Implikasi dari gerakan PRD ini tidak terbatas dalam bidang ideologi dan politik saja, namun meluas ke seluruh bidang ekonomi dan sosial budaya.

5.1.1 Implikasi di bidang Ideologi

Istilah “ sosialis” atau negara sosial demokrat digunakan untuk menunjuk negara yang menganut paham sosialisme “moderat” yang dilawankan dengan sosialisme “radikal” untuk sebutan lain bagi “komunisme”. Hal ini ditegaskan mengingat dalam proses perkembangannya di Negara Barat yang pada mulanya menganut paham liberal-kapitalis berkembang menjadi Negara sosialis (sosialis demokrat).⁸⁴ Perbedaan yang paling menonjol antara sosialis-demokrat dan komunisme (Marxisme-Leninisme) adalah sosial demokrat melaksanakan cita-citanya melalui jalan evolusi, persuasi,

⁸³ Diperoleh dari wawancara dengan Agus Jabo Priyono pada 10 Agustus 2010, di Sekretariat KPP-PRD, Jl. Tebet Dalam 2 nomer 1, Jakarta.

⁸⁴ Fans Magnis Suseno. *Etika Sosial*. Jakarta: 1995. hal. 19-21

konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan, sebaliknya Marxisme-Leninisme melalui revolusi.

Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan (pandangan hidup) tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata.⁸⁵ Dalam membahas sosialisme tidak dapat terlepas dengan istilah Marxisme-Leninisme karena sebagai gerakan yang mempunyai arti politik, baru berkembang setelah lahirnya karya Karl Marx, Manifesto Politik Komunis (1848). Dalam edisi bahasa Inggris 1888 Marx memakai istilah “sosialisme” dan “komunisme” secara bergantian dalam pengertian yang sama. Hal ini dilakukannya sebab Marx ingin membedakan teorinya yang disebut “sosialisme ilmiah” dari “sosialisme utopia” untuk menghindari kekaburan istilah dua sosialisme dan juga karena latarbelakang sejarahnya. Marx memakai istilah “komunisme” sebagai ganti “sosialisme” agar nampak lebih bersifat revolusioner.⁸⁶

Dalam perkembangannya, Lenin dan Stalin berhasil mendirikan negara “komunis”. Istilah “sosialis” lebih disukai daripada “komunis” karena dirasa lebih terhormat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka menyebut masa transisi dari Negara kapitalis ke arah Negara komunis atau “masyarakat tidak berkelas” sebagai masyarakat sosialis dan masa transisi itu terjadi dengan dibentuknya “Negara sosialis”, kendati istilah resmi yang mereka pakai adalah “negara demokrasi rakyat”. Di pihak lain Negara di luar “Negara sosialis”, yaitu Negara yang diperintah oleh partai komunis, tetap memakai sebutan komunisme untuk organisasinya, sedangkan partai sosialis di Negara Barat memakai sebutan “sosialis demokrat”.⁸⁷

Dengan demikian dapat dikemukakan, sosialisme sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan. Dalam hal ini, PRD

⁸⁵ Walter Ode J. “Socialism” dalam *The Encyclopedia Americana*. Volume 25. Connecticut : Glolier Incorporated

⁸⁶ Sutarjo Adisusilo. *Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX*. Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma. Hal 127.

⁸⁷ Soemardjo. *Sejarah Sosialisme di Eropa Dari Abad ke-19 Sampai 1914*. hal 5.

yang secara jelas beraliran kiri sampai saat ini terus mempropagandakan kegagalan pemerintah disebabkan karena pemerintah cenderung menganut paham kapitalisme dan menyerukan sosialisme sebagai jalan keluarnya.

5.1.2 Implikasi di Bidang Politik

Pertalian antara demokrasi dan sosialisme merupakan satu-satunya unsur yang paling penting dalam pemikiran dan politik sosialis. Ditinjau dari segi sejarah sosialisme, segera dapat diketahui gerakan sosialis yang berhasil telah tumbuh hanya di negara-negara yang mempunyai tradisi-tradisi demokrasi yang kuat, seperti Inggris, Selandia Baru, Skandinavia, Belanda, Swiss, Australia, Belgia.⁸⁸ Hal ini disebabkan karena pemerintahan yang demokratis dan konstitusional pada umumnya diterima, kaum sosialis dapat memusatkan perhatian pada programnya yang khusus, meskipun program itu tampak terlalu luas yakni: menciptakan kesempatan yang lebih banyak bagi kelas-kelas yang berkedudukan rendah mengakhiri ketidaksamaan yang didasarkan atas kelahiran dan tidak atas jasa, membuka lapangan pendidikan bagi semua rakyat, memberikan jaminan sosial yang cukup bagi mereka yang sakit, menganggur dan sudah tua dan sebagainya.

Semua tujuan sosialisme demokratis ini mempunyai persamaan dalam satu hal yaitu membuat demokrasi lebih nyata dengan jalan memperluas pemakaian prinsip-prinsip demokrasi dari lapangan politik ke lapangan bukan politik dari masyarakat. Sejarah menunjukkan, masalah kemerdekaan merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Kemerdekaan memeluk agama-kepercayaan, mendirikan organisasi politik dan sebagainya merupakan sendi-sendi demokrasi. Jika prinsip demokrasi telah tertanam kuat dalam hati dan pikiran rakyat, maka kaum sosialis dapat memusatkan perhatian pada aspek lain. Sebaliknya, di Negara yang masih harus menegakkan demokrasi, partai sosialis harus berjuang untuk dapat merealisasikan ide tersebut. Misalnya di Jerman masa kerajaan kedua (1870-1918) yang bersifat otokratis, partai sosialis demokratis senantiasa bekerja dengan rintangan yang berat. Lembaga parlementer hanya sebagai selubung untuk menutupi pemerintahan yang sebenarnya bersifat diktator. Pada masa

⁸⁸ William Ebenstein. *Isme-Isme Dewasa Ini*. Jakarta : Erlangga. Hal 213.

Bismarck berkuasa, kaum sosialis demokrasi dianggap sebagai "musuh-musuh Negara", dan pemimpin partai yang lolos dari penangkapan melarikan diri ke Inggris dan Negara Eropa lainnya. Demikian pula pada masa republik Weimer (1919-1933), partai sosial demokratis Jerman juga tidak berdaya karena tidak ada pemerintahan yang demokratis.⁸⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sosialisme hanya dapat berkembang dalam lingkungan masyarakat dan pemerintahan yang memiliki tradisi kuat dalam demokrasi dan ini sebenarnya cocok di Indonesia. Pada saat kaum sosialis berhasil memegang kekuasaan, pemerintahan masih tetap diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut ambil bagian (sebagian oposisi) dan mereka juga menyadari bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak bersifat permanen.

PRD dalam hal ini tetap mempropagandakan kepada masyarakat Indonesia bahwa saat ini politik di Indonesia telah cocok untuk menganut sosialisme berdasarkan beberapa kenyataan di lapangan politik. Pertama, mulai terbongkarnya persekongkolan rejim neoliberal di dalam negeri dan pihak asing dalam penyusunan puluhan Undang-Undang yang berbau neoliberal. Kedua, ketidakmampuan atau ketidakcakapan pemimpin negara dalam memimpin bangsa mulai dikritik secara luas, termasuk dari kalangan internal kekuasaan itu sendiri. Ketiga, munculnya gesekan-gesekan yang bersifat etnik, kedaerahan, antar-agama yang berpotensi memicu konflik horizontal dan mendisorientasikan perjuangan nasional melawan imperialisme.

Mereka menganggap bahwa pemerintahan saat ini masih berusaha menggunakan politik pencitraan, dengan dukungan media dan sejumlah intelektual kanan, untuk menjaga kekuasaan politiknya dan mengaburkan berbagai persoalan-persoalan besar. Hanya saja, politik pencitraan ini mengalami keterbatasan dalam menghadapi sejumlah isu krusial dan membutuhkan ketegasan, seperti sengketa perbatasan dengan Malaysia, kasus penyerangan HKBP, dan sebagainya.

Dalam bidang politik ini, PRD terus memperjuangkan pencabutan seluruh UU yang dianggap pro-neoliberal serta pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Hal ini

⁸⁹ William Ebenstein, Op.cit. hal 215.

dilakukan selain dengan aksi-aksi massa juga dengan berbagai propaganda di berbagai media.

5.1.3 Implikasi di Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, PRD menganggap pelaksanaan ekonomi saat ini terus mengarah kepada paham neoliberal yang menyengsarakan rakyat. Hal ini ditunjukkan di beberapa sektor ekonomi yang penting, modal asing telah mengambil porsi yang lebih besar dibanding modal dalam negeri, misalnya jenis tambang dan migas (sekitar 80%), bank (sekitar 50%), industri, jasa, dan 70% saham di pasar modal. Perusahaan asing juga menguasai sektor perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, dan sektor strategis lainnya.⁹⁰

Melihat situasi di atas, PRD saat ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang tiga hal utama, pertama, tetap mengkampanyekan tiga program Tripanji persatuan nasional; (1) Nasionalisasi perusahaan strategis asing, (2) penghapusan utang luar negeri, (3) dan bangun pabrik (industrialisasi) nasional untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, mendorong kontrol negara dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama hasil tambang, pertanian, kehutanan, kelautan, dsb. Ketiga, proteksi terhadap pasar di dalam negeri, khususnya untuk menampung produk industri menengah dan kecil di dalam negeri.

5.1.4 Implikasi di Bidang Sosial Budaya

PRD memiliki pandangan bahwa perkembangan kebudayaan nasional seperti sudah terhenti, tergantikan oleh proses penghancuran karakter dan jiwa sebagai bangsa oleh imperialisme. Syarat-syarat untuk kemajuan kebudayaan, seperti pendidikan, literature, kesenian, kesusastraan, dsb hendak dimatikan dan ditundukkan oleh kapitalisme neoliberal, misalnya melalui konsumtifisme, liberalisme, komersialisasi, dan lain-lain. Contoh terbaru kebijakan terbaru di bidang pendidikan adalah pemberlakuan RSI/RSBI, yang sebetulnya hanya "ganti papan nama" tetapi kualitas dan mutu pendidikannya tetapi sama, namun harganya telah dinaikkan berkali-kali lipat.

⁹⁰ KPP PRD, dalam artikel neoliberalisme melilit rakyat, Agustus 2010.

Budaya sosialisme yang dibangun LEKRA dan JAKER dianggap oleh PRD belum bisa mengubah cara pandang masyarakat Indonesia secara revolusioner. Saat ini PRD sedang membangun sebuah wadah bersama dalam bentuk front kesenian menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan jika memang kesenian revolusioner ingin hadir ditengah perjuangan massa.

Front seni yang didalamnya berisikan produser-produser seni yang berkomitmen kuat terhadap cita-cita pembebasan kelas tertindas dari kekangan sistem neoliberalisme. Front seni yang telah sepakat untuk mengabdikan proses kreatifnya kepada rakyat miskin dengan sepenuh hati dengan menghilangkan watak sektarianisme yang terbukti menghambat maju gerak kesenian revolusioner. Front ini haruslah dibangun di atas sebuah pelajaran atas sejarah kegagalan gerakan sosialisme di masa sebelumnya dan memasang target untuk melampaui segala bentuk pencapaian tertinggi gerakan sosialisme di masa lalu.

Front seni yang akan dibangun oleh PRD ini akan terus mempropagandakan sosialisme melalui kebudayaan. Mereka mengharapkan setiap individu yang tergabung dan menyatakan komitmen pengabdian terhadap perjuangan menuju sosialisme juga harus melibatkan diri dalam kerja-kerja praktek di lapangan. Ia haruslah terlibat aktif dalam pengorganisiran sektor-sektor rakyat, aksi radikalisme bersama massa dan tuntutan perjuangannya. Ia tidak boleh melakukan pemisahan dengan melakukan dikotomi antara subjek dan objek inspirasi karya seni. Sebab dengan melakukan penyatuan spiritual seperti ini, setiap produser seni akan mampu melahirkan karya-karya seni yang berakar pada kondisi material di mana ia berada. Komitmen ini haruslah dijalani dengan serius dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang belum terwujudnya sosialis. Membangun proses kreatif mereka secara utuh dengan geliat kehidupan massa. Inilah yang dimaksud dengan kesetiaan di garis massa. Sesuatu yang harus dimiliki setiap individu produser seni revolusioner yang bergiat dalam front seni ini.

5.2 Implikasi Perpecahan PRD terhadap Radikalisasi Kelompok Kiri di Indonesia

Masalah mengenai partisipasi di dalam pemilu menjadi pemicu konflik internal dalam tubuh PRD. Di satu pihak, KPP-PRD melihat parlementerisme sebagai jalan

utama untuk merubah masyarakat. Di pihak yang lain, ada KPRM PRD menolak segala macam partisipasi dan intervensi di dalam lapangan parlementer. Dari kedua kelompok tersebut ada satu lagi kelompok yang tidak menyatakan secara tegas posisi mereka dalam parlemen dan lebih cenderung memanfaatkan isu-isu yang berkembang untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Dari ketiga kelompok besar tersebut, secara ideal bisa dilihat bahwa terdapat aliran-aliran yang melatarbelakangi pemikiran masing-masing kelompok. Pemikiran Marxisme-Leninisme, Trotsky, maupun tokoh-tokoh lain menjadi landasan yang menyebabkan perpecahan PRD ini.

5.2.1 Munculnya Kelompok Penganut Marxisme-Leninisme

Pada 31 Januari 2008, di Ruang Pertemuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Lantai 3 Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat berlangsung Deklarasi KPRM-PRM yang dimotori oleh Zely Ariane. Deklarasi ini adalah buah dari perpecahan internal PRD, beberapa tokoh PRD menganggap kepentingan untuk menegakkan Politik Rakyat Miskin menuju momentum Pemilu 2009 mendorong untuk segera mendeklarasikan secara terbuka Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD). Hal ini dilandasi kekecewaan terkait adanya sebagian PRD yang menolak menanggalkan prinsip-prinsip Politik Rakyat Miskin sekadar demi menjadi peserta pemilu 2009. Pernyataan sikap KPRM-PRD saat pendeklarasiannya adalah sebagai berikut:

Pasca penjatuhan Soeharto di tahun 1998, PRD telah menyadari bahwa tuntasnya reformasi, hanya bisa dilakukan jika sisa-sisa kekuatan lama (yakni Golkar dan Tentara) berhasil dikalahkan oleh kekuatan rakyat namun, sayangnya, bukan saja kekuatan lama tersebut tidak berhasil dihancurkan, kekuatan reformis pun, yang termanifestasikan dalam partai-partai politik baru, semakin menunjukkan watak aslinya, yang tidak berbeda dengan kekuatan lama dalam kepentingan mengabdikan pada modal barat yang sedang menjajah rakyat Indonesia. Dengan demikian, saat ini, bukan saja sisa-sisa lama yang menjadi musuh rakyat, melainkan juga kekuatan reformis gadungan.

Terhadap situasi ekonomi-politik sekarang, kaum gerakan dituntut untuk sanggup meneliti, menyimpulkan dan mengambil tanggung jawab. Rakyat semakin hari bertambah gamblang mengerui atas bertumpuknya persoalan yang nyata mereka hadapi. Semakin terbuka pula bagi kaum gerakan untuk menjelaskan kaitan persoalan sehari-hari rakyat dengan jaring penindasan imperialisme, bahkan bisa

melampaui atau menembus beribu ilusi yang terus dipertebal demi menutupi ketertundukan penguasa terhadap kepentingan imperialisme. Sekaligus terdapat harapan perubahan sejati bagi rakyat, bila kekuatan rakyat sendiri (dengan kaum gerakan di dalamnya) sanggup mencipta jaring perlawanan rakyat, yang luas dan semakin menyatu.

Politik rakyat miskin dalam wujud nyatanya adalah perluasan dan penyatuan perlawanan rakyat, penyatuan mobilisasi-mobilisasi rakyat dengan mengusung tuntutan dan jalan keluar persoalan ekonomi-politik rakyat. Mobilisasi ini harus terus meluas dan mengisi setiap ajang politik rakyat, dan pemilu hanya lah salah satunya. Namun apapun ekspresi politik rakyat miskin, hal utama yang tidak boleh dikompromikan adalah posisi untuk tidak dicampuri, tidak disubordinasi atau lepas dari pengaruh, dan (apalagi) tidak boleh dileburkan, dengan kekuatan pemerintah agen imperialis, tentara, sisa Orba dan reformis gadungan. Ya, politik rakyat miskin adalah politik alternatif (tandingan terhadap politik pro penjajah) yang berbasiskan pada kekuatan perlawanan rakyat sendiri, dengan prinsip non-kooperasi dan non-kooptasi dalam berhadapan dengan musuh-musuh rakyat (Imperialisme dan agen-agenya).

Sesulit apapun, pembangun kekuatan perlawanan rakyat harus tetap dikerjakan, harus diatasi dan tidak boleh dihindari. Karena itu semua unsur kekuatan gerakan sebaiknya menyumbangkan strategi-taktik dan metode (yang terus bisa dikembangkan) untuk memperluas kekuatan perlawanan rakyat, membangun kesadaran politik, sekaligus mewujudkannya dalam metode perjuangan rakyat: menuntut dengan mobilisasi massa. (Dan kami, dengan rendah hati berusaha menyumbangkan metode pengorganisasian gerakan tiga bulanan yang, tentu saja harus disempurnakan kembali oleh sumbangan berbagai unsur gerakan (Lihat Pembebasan, No.1, Tahun 1, Januari, 2008.) Dan, atas nama kemudahan-kemudahan untuk berkuasa (dengan alasan bisa melakukan revolusi dari atas), termasuk menjadi parlementaris-opportunis, sejatinya sudah menanggalkan arah sejati perjuangan rakyat, sudah melepaskan diri dari politik kerakyatan.

Politik (alternatif) Rakyat Miskin adalah posisi politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) sejak awal berdirinya. Politik yang meletakkan perubahan dan kemenangan rakyat dilandaskan pada kekuatan sendiri, berdasar kekuatan gerakan. Posisi politik tersebut juga lah yang ditanggalkan oleh sebagian Pimpinan PRD saat ini—yang menyebut diri sebagai kaum mayoritas dalam PRD—seiring dengan kepentingan mereka untuk meleburkan PAPERNAS (secara ideologi, politik, organisasi) ke dalam persatuan pemilu bersama partai kaum reformis gadungan dan sekutu pemerintahan agen imperialis, demi mendapatkan kesempatan masuk parlemen. Karenanya, kami, yang menamakan diri Komite Politik Rakyat Miskin (KPRM)—PRD, adalah sebagian PRD yang menolak menanggalkan politik rakyat miskin,

menolak politik parlementaris semata, yang meninggalkan gerakan ekstra parlemen— apalagi politik parlementaris-oportunis.

Politik parlementer, yang kami pahami, adalah politik yang memanfaatkan parlemen untuk memperbesar kekuatan ekstraparlemen, karena sejatinya parlemen sekarang memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk memperjuangkan rakyat miskin Indonesia, dan keterbatasan itu hanya bisa didobrak dengan kekuatan ekstraparlemen. Oleh karena itu kami MENOLAK politik parlementer (atas nama jalan baru – gerakan banting setir; merubah dari dalam) yang menganalisis potensi perjuangan rakyat hanya pada kotak-kotak suara; menumpulkan daya juang rakyat dengan ilusi 'perubahan dari atas' – 'perubahan dari parlemen'; menghancurkan alat politik (alternatif) rakyat dengan mensubordinasikannya pada partai-partai reformis gadungan; menghina martabat rakyat dengan mendudukkannya semeja dengan kekuatan Sisa sisa Lama, Tentara, dan Reformis Gadungan. Inilah yang kami sebut sebagai politik parlementer oportunis.

KPRM-PRD berdiri memang dimulai dari paksaan (yang, dengan kekuatan otoritas-mayoritas Pimpinan PRD, kemudian menjadi keputusan resmi internal PRD) mendesak terjadinya perpecahan/pembelahan dalam partai atas posisi politik mendukung politik parlementaris-opurtunis atau sebaliknya; mendukung politik pembangunan gerakan rakyat. Sekarang, posisi tidak demokratik atas pembelahan oleh pimpinan (mayoritas) PRD tersebut sudah kami mengerti sebagai kelaziman yang harus mereka lakukan (sebagai konsekuensi posisi politik oportunistanya); selanjutnya, yang lebih penting bagi KPRM-PRD, adalah berposisi nyata dalam pembangunan politik (alternatif) rakyat miskin bersama kekuatan gerakan rakyat lainnya: Persatuan.

Namun demikian, bukan berarti KPRM-PRD berlepas tangan terhadap kehancuran politik kerakyatan PRD, karena seiring dengan dinamika pembangunan gerakan rakyat, sekaligus kami akan lanjutkan dan kuatkan perjuangan internal untuk mengembalikan PRD (dan PAPERNAS) sebagai alat perjuangan politik rakyat miskin . Karena, lewat berbagai cara yang tidak demokratik (sepihak), massa pendukung PRD dan Papernas dibuat tidak (lagi) sepenuhnya mengerti dengan baik; atau tidak bisa menerima berbagai informasi dari berbagai pihak; akan kemana nasib mereka dipertaruhkan demi menjadi peserta pemilu 2009. Mereka tak (lagi) ditanya pendapatnya; dipersempit ruang perdebatannya, untuk turut menentukan arah politiknya di tahun 2009. Massa (bawah) tak diberikan pertanggungjawaban mengapa peluang 'koalisi', yang sebelumnya dikabarkan (seolah-olah) begitu besar dan nyata, ternyata gagal di tengah jalan (sebagaimana telah kami peringatkan sebelumnya); dan, bahkan kini bergerak pada 'peluang koalisi' lainnya tanpa ada kepentingan untuk mengkonsultasikan pada massa pendukungnya (melanggar janjinya sendiri: bahwa bila peluang koalisi yang pertama gagal maka akan diselenggarakan pertemuan

Presidium Nasional kembali). Tentu, kami tidak boleh lepas tangan dari situasi ini.

Pernyataan sikap di atas jelas menggambarkan bagaimana KPRM PRD telah menganggap keputusan KPP-PRD untuk masuk dalam ajang parlementaris adalah sebuah penghianatan. Mereka tetap memegang teguh prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme yang anti terhadap perlemen dan ikut dalam jajaran pemerintahan. Sampai saat ini KPRM PRD beserta semua underbownya masih tetap memegang prinsip ini, dan tidak mau bergabung dalam semua kegiatan KPP-PRD.

Saat ini, KPRM PRD memiliki underbow beberapa organisasi kiri, antara lain: Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia-Politik Rakyat Miskin (FNPBI-PRM), Pembebasan, Perempuan Mahardhika, Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Persatuan Rakyat Miskin Jakarta (PRMJ). Kelompok-kelompok ini secara konsisten terus menyuarkan isu-isu tentang kesejahteraan masyarakat dan buruh dan tidak mau memasuki ke ajang politik kepartaian. Mereka berpedoman bahwa isu pemboikotan saat Pemilu 2009 lalu ditransformasikan menjadi satu aksi untuk membangun sebuah organisasi politik yang berbasiskan buruh, tani, dan kaum miskin kota. Partai ini harus dibangun dengan kemandirian kelas dan program sosialis yang jelas: nasionalisasi industri-industri utama di bawah kontrol buruh, distribusi tanah untuk petani miskin, undang-undang kelautan dan perikanan yang berpihak pada nelayan-nelayan kecil, penghapusan utang luar negeri, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk semua rakyat, pekerjaan untuk semua rakyat dengan gaji layak, pensiun yang layak untuk semua rakyat, dan hak untuk mengorganisasi serikat dan mogok.⁹¹

Dalam format radikalisme kelompok kiri di Indonesia, kelompok ini termasuk dalam kategori yang sangat radikal karena mereka menginginkan implementasi sosialisme secara penuh di Indonesia. Walaupun di lapangan mereka belum bergerak secara radikal, namun konsolidasi-konsolidasi internal mereka masih sangat solid, dan bahkan mendapat dari organisasi kiri internasional. Beberapa tokohnya seperti Daniel

⁹¹ Wawancara dengan Zely Ariane (Jubir KPRM PRD) pada 26 Oktober 2010.

Indrakusuma dan Zely Ariane sempat memperdalam ideologi Marxis di Philipina dan Cuba.

5.2.2 Munculnya Kelompok Penganut Leon Trotsky

Sikap PRD terhadap kerja parlementer telah diadopsi oleh KPP-PRD, yang kemudian membentuk Partai Persatuan dan Pembebasan Nasional (Papernas) yang menegaskan bahwa parlemen adalah bangunan utama untuk melindungi rakyat dari kebuasan pasar bebas dan membuka ruang demokrasi yang telah dimonopoli oleh partai penguasa. Hal ini disampaikan oleh Agus Jabo Priyono (Ketua Umum KPP-PRD) saat pendeklarasian Papernas.⁹² Mereka menganggap taktik ekstra-parlementer (yang dijalankan KPRM PRD) sebagai sebuah tiang untuk mendukung taktik parlementer mereka. Namun akhirnya perjuangan Papernas ini kandas karena tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu 2009. KPP-PRD lalu melakukan “taktik intervensi” dengan memasukkan tokoh-tokohnya ke dalam partai yang lolos menjadi peserta Pemilu 2009.

KPP-PRD dalam hal ini menganut rujukan bahwa gerakan ekstra-parlementer membutuhkan parlemen untuk memformalitkan program yang diperjuangkan oleh mereka. Pada saat yang sama, mereka yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat yang sejati membutuhkan mereka yang di luar untuk memberikan tekanan kepada seluruh parlemen untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk merespon kebutuhan mereka.⁹³

Berdasarkan hal di atas, kita bisa melihat bahwa keikutsertaan KPP-PRD melalui Papernas dalam Pemilu (dengan memasukkan tokoh-tokohnya ke partai lain) telah menegaskan bahwa taktik ekstra-parlementer adalah subordinat dari perspektif parlementer mereka sebagai perjuangan utama melawan kapitalisme. Hal ini kontradiktif terhadap ideologi Marx-Lenin yang menyatakan bahwa buruh, tani, dan kaum miskin kota membutuhkan partai politik mereka sendiri.

⁹² Hal tersebut pernah diungkapkan Trotsky bahwa parlemen dapat menjadi pusat dari gerakan seluruh rakyat melawan negara polisi yang otokratik.

⁹³ Dikutip dari artikel Indonesia: Tracing a path towards parliament oleh Kelik Ismunanto.

Saat ini, KPP-PRD memiliki underbow beberapa kelompok kiri, yakni Partai Persatuan dan Pembebasan Nasional (Papernas), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Sukarelawan Pembela Tanah Air (Spartan), organisasi-organisasi buruh seperti Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), serta organisasi kebudayaan seperti Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER). Sekitar 40 orang dari organisasi-organisasi tersebut pernah mengikuti pemilihan calon legislatif pada tahun 2009, namun tidak ada yang lolos menjadi anggota dewan.

Dalam format radikalisasi kelompok kiri di Indonesia, KPP-PRD masuk dalam kategori radikal karena masih mengangkat isu-isu mengkritisi kebijakan pemerintah dan masih menganggap sosialisme diperlukan di Indonesia. Namun, keterlibatannya secara politis di parlemen pada 2009 dengan “mendompleng” partai yang lolos dalam Pemilu 2009 mengakibatkan kelompok ini tidak militan seperti halnya kelompok-kelompok PRD yang secara utuh menganut aliran Marx-Lenin.

5.2.3 Munculnya Kelompok Pragmatis-Opportunis

Dalam perjalanannya setelah beberapa kali terjadi perpecahan di dalam tubuh PRD, beberapa tokoh dari PRD mendirikan kelompok-kelompok baru yang nyaris tidak menyuarakan suara-suara yang radikal. Mereka hanya memanfaatkan isu-isu aktual yang ada untuk menyerang pemerintahan yang ada dan meminta imbalan berupa finansial maupun kedudukan tertentu. Selain karena keputusan dalam internal PRD yang selalu gagal melakukan berbagai strategi untuk bisa mencari simpati masyarakat melalui parlemen, mereka juga cenderung memiliki obsesi pribadi untuk memiliki jabatan atau memperoleh keuntungan finansial. Mereka tidak segan-segan membuat proposal kepada instansi-instansi tertentu untuk memberikan semacam “teror” melawan kebijakan yang dijalankan pemerintah, dan mengharapkan imbal balik berupa jabatan atau finansial terhadap pribadi dan kelompoknya.

Dalam tingkatan radikalisasi, kelompok ini termasuk yang tidak radikal karena semua bisa diselesaikan dengan uang. Kelompok ini biasanya memulai gerakannya dengan diskusi-diskusi publik, lalu mengkonsolidasikan gerakan untuk persiapan aksi. Mereka berharap isu yang mereka angkat untuk aksi unjuk rasa diketahui oleh instansi

terkait dan kemudian terjadi deal-deal tertentu kepada kelompok tersebut agar mengurangi massa aksinya, atau bahkan membatalkannya. Dari pengamatan penulis, kelompok yang menjalankan teknik ini adalah kelompok Forum Kepemimpinan Pemuda Indonesia (FKPI) yang dikoordinatori oleh Haris Rusli (Mantan Ketua Umum KPP-PRD). Mereka beberapa kali melakukan diskusi tentang isu-isu aktual seperti penolakan rencana kenaikan harga elpiji, penolakan rencana kenaikan harga tarif dasar listrik, penolakan rencana kenaikan harga BBM dan Sembako yang kemudian mengancam akan menurunkan ribuan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa. Pada akhirnya aksi ini hanya diikuti oleh sekitar 30 orang saja.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam tesis ini terdapat pertanyaan pokok penelitian, yaitu: Bagaimana implikasi perpecahan PRD terhadap radikalisisasi gerakan kiri di Indonesia? Hal ini telah terjawab dalam bab IV tesis ini (halaman 86-98). Dalam bab ini dibahas bagaimana kelompok kiri saat ini memiliki implikasi terhadap berbagai segi kehidupan berbangsa, serta muncul kelompok-kelompok baru hasil perpecahan PRD dengan perbedaan format radikalisasinya.

Pasca Kehancuran PKI tahun 1965, PRD yang secara formal dideklarasikan pada tahun 1996 telah membuat warna tersendiri dalam perkembangan kelompok kiri di Indonesia. Dinamika organisasi, tokoh-tokoh PRD, aksi-aksi yang dilakukan telah memperlihatkan eksistensi gerakan PRD hingga saat ini. Dalam perjalanan organisasinya, PRD mengalami masa pasang-surut disertai berbagai konflik internal yang menyebabkan berbagai organisasi kiri muncul di Indonesia saat ini dari hasil pecahan PRD.

Dalam peta pemikiran dan aksi kelompok dalam era Soeharto, PRD dikelompokkan oleh David Borchier dan Vedi Hadiz kedalam kelompok "radikal", bukan kelompok organik, Islam, dan pluralis.⁹⁴ PRD lebih menuntut perubahan struktur masyarakat dan bukan hanya perubahan pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh berbagai kelompok mahasiswa dan oposisi saat itu.

Demikian pula dalam aksinya, PRD yang dimotori oleh mahasiswa telah keluar dari kampus dan mengubah diri menjadi organisasi politik dan kemudian menjadi partai politik. Singkatnya mereka bukan hanya gerakan moral namun sudah melakukan aksi politik dan melakukan interaksi dan pemberdayaan pada berbagai kelompok masyarakat. Namun secara umum PRD masih dapat dikategorikan dalam gerakan politik non kekerasan dan berbeda dengan berbagai gerakan mahasiswa atau pemuda di negara lain. Demikian pula PRD berbeda dengan beberapa gerakan pemuda dalam

⁹⁴ Lihat David Bouchier and Vedi R. Hadiz (Ed.) *Indonesia Politics and Society: A Reader*. London: Routledge Curzon, 2003: Bab VII.

negeri (separatisme dan keagamaan) yang menggunakan senjata dan kekerasan dalam aksi mereka.

Secara langsung maupun tidak langsung, perjalanan PRD telah mewarnai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Berbagai propaganda dan kampanye yang dilakukan PRD paling tidak pernah didengar oleh masyarakat luas, baik melalui aksinya, diskusi, kesenian, maupun tulisan-tulisan mereka yang terus mendeskreditkan pemerintahan dan berupaya mensosialisasikan bahwa sosialisme adalah jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini.

Sebuah perpecahan di PRD terjadi setelah PRD memutuskan untuk berpartisipasi di dalam pemilu di bawah bendera PBR (Partai Bintang Reformasi). PBR adalah pecahan dari PPP pada tahun 2003. Pada pemilu 2004, PBR meraup 2,5% suara. Sebuah kelompok yang dipimpin oleh Zely Ariane dan Danial Indrakusuma pecah dari PRD karena keputusan ini dan membentuk sebuah partai yang baru, KPRM-PRD (Komite Politik Rakyat Miskin – PRD). Mereka menganggap PBR sebagai sebuah partai borjuis, dan aliran Marx-Lenin yang mereka pegang berseberangan dengan hal tersebut. Sedangkan KPP-PRD berargumen bahwa setiap kesempatan untuk memiliki seorang kandidat elektoral harus diambil karena “parlemen adalah bangunan utama untuk melindungi rakyat dari kebuasan pasar bebas”,⁹⁵ bahkan bila ini dilakukan di bawah bendera partai lain. Lebih dari 40 anggota Papernas ikut serta di dalam pemilu sebagai kandidat di bawah bendera PBR. Namun, untuk kesekian kalinya usaha ini juga gagal dilakukan untuk menembus parlemen karena tidak ada satupun Caleg yang lolos ke parlemen.

Uraian di atas adalah perjalanan politik yang dilakukan oleh PRD dari awal pembentukannya. Di sisi lain, di internal PRD sendiri terjadi berbagai konflik yang menyebabkan PRD terpecah belah. Perpecahan mengenai politik elektoral dan keikutsertaan dalam Pemilu memang mendominasi dalam konflik tersebut, namun beberapa hal seperti kedekatan pimpinan PRD dengan pejabat negara juga menjadi faktor penyebab perpecahan PRD.

⁹⁵ Indonesia: Tracing a path towards parliament oleh Kelik Ismunanto, salah satu pemimpin PRD.

Perpecahan dalam tubuh PRD dari awal mula pembentukannya telah melahirkan berbagai kelompok-kelompok kiri yang berkembang hingga saat ini. Kelompok-kelompok ini bisa dibagi menjadi tiga kelompok besar. Pertama, kelompok yang tetap memegang teguh aliran Marxisme-Leninisme yang direpresentasikan oleh KPRM PRD. Mereka memiliki ciri anti parlementaris dan terus memperjuangkan sosialisme seutuhnya di Indonesia. Walaupun gerakan mereka belum terlalu terbuka, kelompok ini bisa dikategorikan sangat radikal karena memiliki potensi ancaman yang besar bagi kelangsungan bangsa dan negara.

Kedua, kelompok yang menganut aliran Trotsky yang direpresentasikan oleh KPP-PRD. Kelompok ini masih terus menyebarkan paham sosialis, namun mereka juga berusaha masuk ke jalur parlemen. Bahkan dalam kongres mereka yang terakhir pada Maret 2010, mereka mengangkat Pancasila sebagai ideologi mereka karena menganggap bahwa Pancasila adalah sosialisme versi Indonesia. Kelompok ini bisa dikategorikan sebagai kelompok yang radikal karena sampai saat ini mereka masih terus mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap memegang prinsip neoliberalisme.

Ketiga, kelompok yang bisa dikategorikan sebagai kelompok yang pragmatis. Kelompok-kelompok ini didirikan oleh mantan tokoh-tokoh PRD yang mengalami keputusan baik dalam organisasi PRD maupun pencapaian tujuan pribadi mereka. Kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok yang tidak radikal karena ideologi mereka tidak dipermasalahkan lagi. Isu-isu yang mereka angkat pun sebagian besar digunakan untuk memperoleh timbal balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal ini departemen atau instansi pemerintah lain) berupa finansial maupun jabatan tertentu.

Berdasar uraian di atas, penulis memiliki kesimpulan bahwa kelompok kiri di Indonesia masih memiliki ancaman strategis terhadap segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengorganisasian dan konsolidasi di berbagai kelompok kiri di Indonesia saat ini sangat memungkinkan kelompok-kelompok tersebut menjadi salah satu kelompok besar di kemudian hari, baik sebagai gerakan moral, kepartaian, maupun kelompok ideologis.

5.2 Saran

Pakar politik ekonomi Amerika Serikat Profesor Geoffrey B Hainswort mengatakan, komunisme dan sosialisme sebagai paham dan ideologi tak akan mati.⁹⁶ Kalau terjadi kemunduran paham tersebut di suatu negara bukanlah kematian melainkan hanya sekarat atau tertidur lelap. Karena itu bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, harus meningkatkan kewaspadaannya secara sungguh-sungguh terhadap kelompok kiri di Indonesia, dalam hal ini PRD dan semua kelompok yang beraliran kiri.

Terkait dengan penulisan tesis ini, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian yang akan datang dengan tema besar tentang PRD dan kelompok kiri di Indonesia, penulis memiliki beberapa saran antara lain:
 - 1) Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah perjalanan dan perpecahan dalam PRD yang memiliki implikasi ke berbagai bidang kehidupan bernegara maupun implikasi khusus dalam gerakan kiri di Indonesia. Penulis belum melihat kelompok lain yang lebih representatif dan memiliki ancaman strategis seperti halnya PRD (beserta semua kelompok pecahannya), akan menarik jika ada kajian lain yang bisa menemukan kelompok kiri yang masih menunjukkan eksistensi dan memiliki potensi untuk menjadi kelompok yang besar di masa mendatang.
 - 2) Teori yang dipakai dalam penelitian ini sebagian besar menyangkut gerakan sosial dalam masyarakat yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara rakyat dan pemerintahannya. Berhubung penelitian ini dilihat dari perspektif intelijen strategis, maka teori-teori yang berhubungan dengan antropologis dan sosiologis masyarakat Indonesia terkait sosialisme di Indonesia tidak dicantumkan. Maka, akan lebih lengkap jika penelitian mendatang dicantumkan teori-teori tentang antropologi dan sosiologi masyarakat Indonesia.
 - 3) Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung di dalam tubuh PRD dan dilengkapi dengan data sekunder dari literatur dan

⁹⁶ Hainsworth, Geoffrey B. "Indonesia's Economic Downswing & Political Reforms. *Current History*. Apr 1987. Hal. 172

buku-buku. Oleh karena itu, penulis tidak membandingkan organisasi PRD dengan organisasi lain yang memiliki struktur maupun sistem yang sejenis dengan PRD karena keterbatasan waktu dan data yang diperoleh. Dalam penelitian yang akan datang, akan menarik jika ada organisasi pembanding, baik di dalam maupun luar negeri agar kajian bisa lebih mendalam.

b. Ancaman strategis kelompok kiri di Indonesia tidak akan dirasakan seketika. Ada masa-masa pertumbuhan dan kemunduran di dalamnya, oleh karena itu penulis menyarankan langkah-langkah strategis antara lain:

- 1) Ide-ide dari Marx, Lenin, Trotsky maupun tokoh kiri lainnya sebenarnya sudah sangat tidak relevan di Indonesia. Namun, perdebatan dan persepsi yang berbeda-beda dari seseorang atau suatu kelompok (termasuk PRD dan semua pecahannya) menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang menarik untuk dibahas dan dianggap masih bisa diaplikasikan kembali saat ini. Oleh karena itu, pemerintah sudah selayaknya membuat sebuah program untuk sosialisasi sampai ke tingkat terendah dalam kelompok masyarakat dan semua jenjang pendidikan tentang bahaya laten sosialisme beserta semua gerakannya.
- 2) Kampanye "sosialisme ala Indonesia" dan bahkan "sosialisme berdasar Pancasila" yang dilakukan oleh PRD serta seluruh kelompok pecahannya saat ini harus dikaji lebih dalam untuk diketahui motivasi sesungguhnya dari kelompok-kelompok tersebut. Hal ini berguna tidak hanya untuk memetakan gerakan yang ada saat ini dan masa yang akan datang, namun juga mewaspadaai berbagai strategi dari dalam kelompok-kelompok tersebut.
- 3) Di era kebebasan demokrasi seperti saat ini, berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah sudah sangat biasa terjadi. Kelompok-kelompok kiri biasanya memanfaatkan momentum kegagalan kebijakan pemerintah untuk menyerang pemerintah. Oleh karena itu, kewaspadaan dini pemerintah terkait hal-hal seperti di atas harus ditingkatkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan propaganda dan provokasi terhadap masyarakat luas.
- 4) Isu-isu seperti kemiskinan, minimnya upah buruh, mahalnya biaya pendidikan dan isu-isu kesejahteraan masyarakat lain selalu diangkat oleh kelompok kiri di Indonesia. Mereka memandang bahwa kapitalisme dan neokolonialisme lah

yang telah menyebabkan hal-hal tersebut. Pemerintah seharusnya memiliki konsep yang matang untuk mengatasi segala masalah sosial yang terjadi di Indonesia untuk meredusir segala tuntutan oleh kelompok kiri tersebut.

- 5) Sebagai negara yang memiliki umat Islam terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk menghilangkan pengaruh kelompok kiri di Indonesia. Pertentangan ideologi antara Islam dan sosialis di Indonesia sebenarnya tidak seimbang, oleh karena peranan ormas Islam yang moderat, seperti Nahdatul Ulama (NU) memiliki peluang untuk bisa menjadi kontra propaganda yang terus dilakukan oleh kelompok kiri di Indonesia.
- 6) Peluang politik dari kelompok kiri di Indonesia sebenarnya sangat minim. Terlihat bahwa dalam Pemilu 1999 PRD hanya memperoleh sekitar 80.000 suara, namun saat ini mereka terus melakukan strategi untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Antisipasi melalui jalur politik ini harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat kelompok kiri memiliki strategi besar untuk Pemilu 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abdullah, Taufik (editor) *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta : LP3ES, cetakan ke-6, 1994
- Almond, Gabriel A., 'Sosialisasi Kebudayaan & Partisipasi Politik', dalam Mochtar Mas'oed & Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990
- Anderson, Benedict R O'G & Ruth McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*, edisi Indonesia, *Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Analisis Awal*, Yogyakarta: LKPSM-Syarikat, 2001
- Anderson, Benedict R O'G *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance 1944-1946*, edisi Indonesia, *Revolusi Pemuda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988
- Andrain, Charles F. & David E. Apter, *Political Protest and Social Change, Analizing Politics*, Macmilan Press Ltd, London 1995
- Anwar, Yozar, *Angkatan 66, Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, Jakarta: PT Sinar Harapan, 1980
- Aspinal, Edward, *The Indonesian Student Uprising of 1998*, 1999
- Basri, Seta. *Gerakan Sosial di Indonesia : Gerakan Mahasiswa*. Jakarta: Pustaka Abadi, 2009.
- Berger, Peter L dan Richard J. Neuhaus, *Movement and Revolution*, Anchor Books, Dobleday & Company, Inc, Garden City., New York, 1970
- Bourchier, David and Vedi R. Hadiz (Eds.), *Indonesia Politics and Society: A Reader*. London: Routledge Curzon, 2003
- Budiman, Arief & Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, Jakarta: Institut Arus Informasi, 2001
- Budiman, Arief, "Mahasiswa Sebagai Intelegensia Muda", *Prisma*, No.11 November 1976.

- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, California: Sage Publications, 1994
- Culla, Adi Suryadi *Patah Tumbuh Hilang Berganti, Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1988)*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 1999
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Evers, Hans-Dieter (ed), *Modernization in South-East Asia*, Oxford University Press, Singapore-Kuala Lumpur, 1973
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Fatah, Eep Saefulloh, 'Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokrasi; Potret Pergeseran Politik Orde Baru', dalam *Prisma*, 4 April, 1994
- Giddens, Anthony, *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*, London: The MacMillan Press, Ltd, 1979
- , *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 2009.
- Gunawan, FX Rudy, *Budiman Sudjatmiko, Menolak Tunduk, Catatan Anak Muda Menentang Tirani*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999
- Gunn, Lain, "Mei '68: Revolusi Perancis", terjemahan, tanpa tahun.
- Hariyadie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional*, Jakarta: Citra Mandala Pratama, 1995
- Hidayat, Deddy N., *Pers Dalam 'Revolusi Mei', Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Hikam, AS, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996
- , *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Ingleson, John, *Road to Exile: The Indonesia Nasionalist Movement 1927-1934*, edisi Indonesia, dalam *Jalan ke Pengusungan : Pergerakan nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1988
- Irwan, Alexander, *Jejak-Jejak Krisis di Asia*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

- ISAI, *Bayang-Bayang PKI*, ISAI, Jakarta, 1995.
- Jan, San Ming, *Gerakan Mahasiswa di Korea Selatan*, terjemahan, 1999.
- KPP PRD, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, 1999
- Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani, Esei-esei Sejarah Kuntowijoyo*, Yogyakarta; Bentang Intervisi Utama, 1993
- Lenin, "Membangun Kontak Mahasiswa dengan Kelas Pekerja" diterjemahkan dari "Establishing Contacts with The Working Class" dalam *Lenin's Student in Revolution*, Moscow, 1982.
- Liddle, R William, 'Indonesia's Threefold Crisis', *Journal of Democracy*, Vol. 3, No. 4: 60-74, 1992
- MacIntyre, Andrew, *Business and Politics in Indonesia*, Allen & Unwin, Asian Studies Association of Australia (Seri Publikasi Asia Tenggara, No. 21), 1990
- Madjid, "Sejarah Memberikan Kesimpulan, Pergerakan yang Merevolusionerkan", *Progres*, No.3, Jilid 2, 1992.
- Magenda, Burhan D., Gerakan Mahasiswa dalam Hubungannya dengan Sistem Politik; Suatu Tinjauan, dalam *Prisma*, No. 12, Jakarta: LP3ES, Desember 1977
- Mahasin, Aswab, *Pola Gerakan Pinggiran*, dalam *Prisma*, No. 7 Tahun 1989
- Mandels, Ernest, "Gerakan Mahasiswa Revolusioner : Teori dan Praktek", terjemahan, tanpa tahun.
- Marlin, "Indonesia: Organizing the Mass Struggle for Real Democracy" wawancara dalam *Links*, No.9 (November 1997-Februari 1998), hal 5-25.
- Marx, Karl, "Manifesto of Communist Party", dalam *Marx-Engel Selected Work*, Progress Publisher, Moscow, 1977.
- Mattulesi, Andi & Djamaluddin Ancok, 'Faktor-faktor Penyebab Gerakan Sosial Mahasiswa', dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Unisia*, No. 32/XVII/IV/1997
- Maxwell, A Joseph *Qualitative Research Design An Interactive Approach*, California: Sage Publication, 1996.
- Miftahuddin. *Radikalisasi Pemuda (PRD Melawan Tirani)*, Jakarta: Desantara. Desember 2004
- Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elite*, Yogyakarta: Resist Book, 2005.

- Neil, Robert van, *The Emergence of The Modern Indonesian Elite*, edisi Indonesia, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984
- Nugroho, Bimo (koord.), *Dicari: Orang Hilang*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi & LBH Ampera, 1999
- O'Donnel, Guillermo & Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian, Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES, 1993
- Patria, Nezar, "*Memposisikan Kembali Gerakan Mahasiswa : Belajar dari Sejarah*", Yogyakarta, 1998.
- Petras, James, "Kritik Kepada Kaum Post-Marxist" terjemahan dari "Marxist Critique of Post Marxist" *Links*, No.9 (November 1997-Februari 1998).
- Prasetyo, Eko, dkk. *Gerakan Sosial Baru, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Program Sekolah Demokrasi dan Averroes Press, Juli 2006.
- Pratama, Endhiq, "*Merenda Gerak Sejarah : Membangun Gerakan Mahasiswa Kerakyatan*", Yogyakarta, 1999.
- Pringgodigdo, AK, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1980
- Raillon, Francois, *Ideologi Politik Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Railond, Francois, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia : Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Rajab, Suryadi A, "Panggung-Panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara : Gerakan Mahasiswa dibawah Orde Baru", dalam *Prisma*, No.10, 1991.
- Ricklefs, MC, *A History of Modern Indonesia*, edisi Indonesia, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
- Rifki Hasibuan, *Dilema Gerakan Sosial di Tengah Kemajemukan*, Yogyakarta: Resist Book, 2009
- Robert Mirel, *Teori Pergerakan Sosial, Periodisasi Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Robison, Richard, 'Indonesia: Tensions in State and Regime', dalam Suntingan Kevin Hewison, Richard Robison dan Garry Rodan, *Southeast Asia in The 1990's*,

- Authoritarianism, Democracy and Capitalism*, St Leonards, Allen & Unwin, 1993
- Robison, Richard, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sidney, Allen & Unwin, Asian Studies Association of Australia (Seri Publikasi Tentang Asia Tenggara No. 13), 1986
- Saidi, Anas (editor), *Menekuk Agama Membangun Tahta, Kebijakan Agama Orde Baru*, Jakarta: Desantara, 2004
- Saidi, Ridwan, *Mahasiswa dan Lingkungan Politik*, Jakarta: LPMI, 1989
- Sanit, Arbi (penyunting dan pengantar), *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992
- Sardo, Ki Joyo, "Mahasiswa Non-Partisan Justru Diperalat", dalam *Pembebasan*, No. 13, October, 1999.
- Shiraishi, Takashi, *Jaman Bergerak*, PT Garfity Pustaka, Jakarta, 1996.
- Shiraishi, Takashi, *An Age of Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926*, edisi Indonesia, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997
- Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Budaya Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT Eresco, 1983
- Supriyono, Daru, "Mampukah Mahasiswa Menuntaskan Revolusi Demokratik yang Terinterupsi", Yogyakarta, 1999.
- Suyanto, Bagong, dkk, *Gejolak Arus Bawah*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1995
- Uhlen, Anders, *Indonesia and the Third Wave of Democratization; The Indonesia Pro-Democracy Movement in a Changing World*, edisi Indonesia, *Oposisi Berserak; Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998

Internet:

- www.berdikarionline.com
- www.lmnd-prm.blogspot.com
- www.rumahkiri.net
- www.kprm-prd.org
- www.Jstor.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

BAB I

NAMA, WAKTU, SIFAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

NAMA

Nama Organisasi ini adalah Partai Rakyat Demokratik yang selanjutnya disingkat PRD

PASAL 2

WAKTU

Berdasarkan keputusan Kongres I, maka pada tanggal 2 Mei 1994 di Jakarta telah berdiri Persatuan Rakyat Demokratik

Berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa Persatuan Rakyat Demokratik, maka pada tanggal 15 April 1996 di Kabupaten Sleman Persatuan Rakyat Demokratik berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 3

SIFAT DAN WATAK

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah partai kader yang berbasis massa dan bersifat terbuka

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah partai yang berwatak progresif dan revolusioner

PASAL 4

TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan pusat dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) berada di Jakarta

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

PASAL 5

ASAS

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah organisasi yang berasas sosial demokrasi kerakyatan

PASAL 6

TUJUAN

Tujuan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah mewujudkan masyarakat demokratis multipartai kerakyatan

Tujuan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah mewujudkan sistem masyarakat yang demokratis di bidang sosial, ekonomi dan budaya.

BAB III POKOK POKOK PERJUANGAN

PASAL 7

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan kaum buruh, tani dan rakyat tertindas lainnya

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin kekuatan rakyat dalam revolusi politik menuju demokrasi politik, ekonomi dan budaya

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus mendorong dan memajukan organisasi massa-organisasi massa progresif di setiap sektor

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus terlibat aktif dan memimpin gerakan massa pada tahap menuju masyarakat demokratis di Indonesia

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI, PRINSIP WILAYAH KERJA ORGANISASI, SYARAT-SYARAT PENDIRIAN DAN PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

PASAL 8

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) tersusun sebagai berikut::

Organ tertinggi pembuat keputusan partai adalah Kongres Partai Rakyat Demokratik

Pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres adalah Dewan Nasional Partai Rakyat Demokratik

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional adalah Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat Nasional adalah Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat Daerah Tingkat I Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat Daerah Tingkat II adalah Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat kecamatan adalah Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat desa/kelurahan adalah Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

Organ terendah partai adalah Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

PASAL 9

PRINSIP WILAYAH KERJA ORGANISASI

Wilayah kerja organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah seluruh wilayah Republik Indonesia yang terbagi ke dalam 26 propinsi

PASAL 10

SYARAT-SYARAT PENDIRIAN STRUKTUR ORGANISASI PARTAI

Pendirian struktur partai pada setiap tingkat daerah didasarkan atas syarat-syarat:

Pendirian Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

Pendirian Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)

Pendirian Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
 Pendirian Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

PASAL 11

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

Prinsip-prinsip organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Organ yang lebih rendah dan tiap-tiap anggota harus mematuhi, tunduk dan mengikuti kepemimpinan organ yang lebih tinggi

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari setiap laporan, data, informasi, usulan dan kritik dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari kondisi perjuangan dan laporan dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota sebagai bahan panduan dalam setiap pengambilan keputusan

Keputusan dibuat berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam, penuh perhitungan dan atas hasil suara mayoritas

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan secara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

BAB VI

RAPAT-RAPAT DAN PERTEMUAN

PASAL 12

Rapat-rapat dan pertemuan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Rapat Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

Pertemuan Unit Kerja – Partai Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

PASAL 13

Setiap rapat/pertemuan di tiap tingkatan harus dipimpin oleh seorang pimpinan rapat yang didampingi seorang sekretaris

Setiap rapat/pertemuan di tiap tingkatan harus didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemimpin rapat dan sekretaris

Setiap rapat/pertemuan di tiap tingkatan harus memiliki agenda rapat yang jelas dan didasarkan pada laporan kerja organ dibawahnya

PASAL 14

Rapat yang berwenang mengambil keputusan politik adalah Rapat Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD).

BAB VI KEANGGOTAAN

PASAL 15

SYARAT KEANGGOTAAN

Keanggotaan Partai Rakyat Demokratik (PRD) tidak dibatasi oleh jenis kelamin, ras (suku bangsa) dan agama

Persyaratan untuk menjadi Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Individu yang terlibat aktif dalam organisasi massa-organisasi massa yang memperjuangkan demokrasi

Telah menerima dan menyetujui ideologi, program politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 16

CALON ANGGOTA

Calon anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) direkrut dari organisasi massa-organisasi massa yang memperjuangkan demokrasi, serta elemen-elemen progresif dari semua sektor rakyat

Calon anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan calon anggota dan menjalankan penugasan kerja sebagai calon anggota, sebelum dilantik dan disumpah menjadi anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 17

HAK KEANGGOTAAN

Hak keanggotaan dapat dicabut atau hilang apabila:

Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Melanggar disiplin partai

Gila

Mati

PASAL 18

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.

BAB VII SUMPAH

PASAL 19

“Demi terwujudnya masyarakat demokratis di Indonesia, dengan bersungguh-sungguh aku bersumpah, selalu setia dan patuh pada keputusan, disiplin dan peraturan-peraturan Partai Rakyat Demokratik”

“Demi terwujudnya masyarakat demokratis di Indonesia, dengan bersungguh-sungguh aku bersumpah, akan berdisiplin dalam menjalankan program politik Partai Rakyat Demokratik berdasarkan garis politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan terus berjuang demi pembebasan dan kemenangan rakyat tertindas”

BAB VIII DISIPLIN ANGGOTA

PASAL 20

Setiap anggota harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Setiap anggota dituntun oleh ketentuan yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, garis politik dan program politik Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Setiap anggota akan menerima sanksi berdasarkan laporan struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) di tempatnya bertugas, sewaktu dan atau setelah pelaksanaan aktivitasnya apabila terjadi tindakan indisipliner oleh anggota yang bersangkutan

PASAL 21

SANKSI

Sanksi yang diberikan kepada setiap anggota apabila terjadi tindakan indisipliner berupa:

Teguran lisan

Teguran tertulis

Skorsing

Dipecat

PASAL 22

PELAKSANAAN SANKSI

Pelaksanaan dan peninjauan sanksi dilakukan oleh Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) sampai Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Bila pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), maka peninjauan sanksi dapat dilakukan didalam Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Rapat Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan atau Dewan Nasional dan atau Kongres

PASAL 23

Anggota yang menerima sanksi berhak melakukan pembelaan diri didepan komite pimpinan yang membawahi komite pimpinan yang telah menjatuhkan sanksi

Jika yang menerima sanksi adalah anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dan atau Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD), maka anggota yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan diri di depan Dewan Nasional dan atau Kongres

Jika pembelaan diri diterima maka rehabilitasi akan diberikan oleh komite pimpinan yang menjatuhkan sanksi

Jika pembelaan diri anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dan atau Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) diterima maka rehabilitasi akan diberikan oleh Dewan Nasional dan atau Kongres

BAB X ATRIBUT

PASAL 24

(tentang bendera)

PASAL 25

(tentang lagu)

BAB XI KEUANGAN

PASAL 26

Sumber keuangan Partai Rakyat Demokratik (PRD) didapatkan dari:

Uang Iuran Anggota

Sumbangan dan lain-lain yang sesuai dengan prinsip perjuangan

Usaha mandiri yang sesuai dengan prinsip perjuangan

BAB XII

TENTANG ORGANISASI MASSA PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)

PASAL 27

Organisasi massa-organisasi massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah organisasi sektoral rakyat tingkat nasional, yaitu:

Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI)

Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID)

Serikat Tani Nasional (STN)

Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKER)

Bentuk hubungan antara organisasi massa-organisasi massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah afiliasi politik dan organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) membuka kemungkinan bergabungnya organisasi massa lain untuk berafiliasi politik dan atau organisasi

BAB XIII

TAMBAHAN DAN PERALIHAN

PASAL 28

Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar (AD), akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan

PASAL 29

Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan didalam Kongres setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah peserta yang hadir

Usulan perubahan disampaikan secara tertulis dan dilampirkan penjelasan rinci serta diserahkan kepada Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) selambat-lambatnya limabelas (15) hari sebelum pelaksanaan kongres

LAMPIRAN 2: ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

BAB I ORGANISASI

PASAL 1 KONGRES

1. Kongres adalah organ pengambil keputusan tertinggi
2. Kongres dilaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali
3. Peserta kongres adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada setiap tingkat struktur organisasi dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), yang memiliki hak:
 - a. Hak bicara dan hak suara
 - b. Hak memilih dan dipilih
1. Peserta peninjau terdiri dari wakil organisasi lain yang direkomendasi oleh Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) yang hanya memiliki hak bicara
2. Tugas-tugasnya:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) yang dipilih pada periode sebelumnya
 - b. Membahas, menganalisa dan menyimpulkan situasi politik nasional
 - c. Menetapkan garis besar Program Politik
 - d. Menetapkan strategi taktik
 - e. Mengubah/menetapkan kembali Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
 - f. Memilih dan mengangkat Kepemimpinan Pusat untuk periode yang akan datang
 - g. Membuat resolusi-resolusi
 - h. Membuat rekomendasi-rekomendasi
1. Kongres Luar Biasa dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

PASAL 2 DEWAN NASIONAL

1. Dewan Nasional adalah pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres
2. Dewan Nasional sebagai organ pengatur antara dua (2) kongres
3. Dewan Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu (1) tahun
4. Peserta Dewan Nasional adalah:
 - a. Seluruh jajaran pimpinan dalam Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
 - b. Ketua Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
 - c. Ketua Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
 - d. Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

1. Tugas-tugasnya:
 - a. Melakukan penilaian terhadap perkembangan situasi politik nasional
 - b. Melakukan evaluasi terhadap seluruh aktifitas organisasi
 - c. Merumuskan strategi dan taktik
 - d. Membuat keputusan yang belum sempat ditetapkan dalam Kongres
 - e. Membuat resolusi-resolusi
 - f. Membuat rekomendasi
1. Pada saat yang mendesak Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) memiliki wewenang mengundang anggota Dewan Nasional dengan pemberitahuan yang disampaikan selambat-lambatnya tujuh (7) hari sebelum Dewan Nasional dilaksanakan

PASAL 3

PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PP-PRD)

1. Pimpinan Pusat dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres untuk masa jabatan dua (2) tahun
2. Pimpinan Pusat PRD adalah struktur organisasi yang dibentuk dalam situasi khusus berdasarkan Kongres II PRD yang beranggotakan jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang berada di dalam penjara
3. Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD), terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan anggota
4. Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) merupakan badan pimpinan tertinggi di bawah Kongres dan Dewan Nasional
5. Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) bersama dengan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dapat membuat keputusan-keputusan strategis yang tidak ditetapkan dalam Kongres dan Dewan Nasional

PASAL 4

KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)

1. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres untuk masa jabatan dua (2) tahun sekali
2. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) berkedudukan di pusat kegiatan organisasi/sekretariat pusat
3. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) merupakan badan pimpinan tertinggi di bawah Kongres, Dewan Nasional dan Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)
4. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) sebagai pembuat keputusan harian organisasi
5. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) bertanggungjawab pada Kongres, Dewan Nasional dan Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)
6. Tugas dan tanggungjawabnya:
 - a. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Dewan Nasional dan atau Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)

- b. Mengambil keputusan dan memberikan arahan praktis pada seluruh jajaran komite pimpinan di bawahnya dan seluruh anggota Partai Rakyat demokratik (PRD)
- c. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya kepada Kongres
 - 1. Anggota Komite Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Ketua-ketua Departemen
 - 1. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

PASAL 5

STRUKTUR

KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)

KETUA

- 1. Ketua dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
- 2. Ketua berkedudukan di sekretariat pusat
- 3. Tugas dan tanggung jawabnya:
 - a. Memimpin seluruh perjuangan politik Partai Rakyat Demokratik (PRD)
 - b. Bersama dengan Sekretaris mengkoordinasikan seluruh jajaran pimpinan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
 - c. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres, Dewan Nasional dan Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

SEKRETARIS

- 1. Sekretaris dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
- 2. Sekretaris berkedudukan di sekretariat pusat
- 3. Tugas dan tanggung jawabnya:
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengontrol kerja-kerja organisasi dengan dibantu oleh Ketua-ketua Departemen
 - b. Menyelenggarakan sistem pengarsipan seluruh dokumen
 - c. Menyelenggarakan sistem berlapis untuk pendistribusian keputusan dan pengumpulan laporan-laporan dari struktur terendah sampai struktur tertinggi dan atau sebaliknya
 - d. Menyiapkan seluruh bahan rapat secara sistematis untuk Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
 - e. Membuat dan menyerahkan laporan bulanan organisasi kepada Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
 - f. Menyelenggarakan rapat reguler Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu (1) bulan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PROPAGANDA

- 1. Departemen Pendidikan dan Propaganda dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
- 2. Ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
4. Tugas dan tanggung jawabnya:
 - a. Menerbitkan organ propaganda Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan media internal secara reguler
 - b. Menyusun panduan propaganda, kurikulum dan menyiapkan seluruh material pendidikan bagi calon anggota dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
 - c. Melaksanakan pendidikan, kursus dan training secara reguler bagi calon anggota dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
 - d. Menyelenggarakan diskusi-diskusi internal secara reguler
 - e. Menyelenggarakan diskusi terbuka, seminar, workshop, sarasehan, dll.
 - f. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
 - g. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda dibantu oleh staf

DEPARTEMEN ORGANISASI

1. Departemen Organisasi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
2. Ketua Departemen Organisasi berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
4. Tugas dan Tanggung jawabnya:
 - a. Menyusun dan memimpin pelaksanaan program pengembangan organisasi
 - b. Mempersiapkan proses untuk pembentukan organisasi di Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - c. Mengadakan perjalanan dan kunjungan rutin ke daerah-daerah yang menjadi sasaran program pengembangan organisasi
 - d. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
 - e. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Organisasi dibantu oleh staf

DEPARTEMEN KERJASAMA

1. Departemen Kerjasama dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
2. Ketua Departemen Kerjasama berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
4. Tugas dan Tanggung Jawabnya:
 - a. Bertindak sebagai penghubung antara Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
 - b. Mengadakan kegiatan-kegiatan secara bersama antara Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
 - c. Merumuskan dan melaksanakan propaganda kepada kelompok-kelompok gerakan demokrasi
 - d. Membangun front perjuangan bersama dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
 - e. Membuat laporan kerja rutin kepada sekretaris
 - f. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Kerjasama dibantu oleh staf

DEPARTEMEN PERJUANGAN RAKYAT

1. Departemen Perjuangan Rakyat dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Konggres
2. Ketua Departemen Perjuangan Rakyat berkedudukan di sekretariat pusat, sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu sekretaris
4. Tugas dan Tanggungjawabnya:
 - a. Bertanggungjawab mengkoordinasi, memobilisasi dan memimpin aksi-aksi massa secara nasional
 - b. Bertanggungjawab mengkoordinasi, memobilisasi dan memimpin kerjasama aksi massa dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
 - c. Membuat laporan rutin kepada sekretaris
 - d. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Perjuangan Rakyat dibantu oleh staf

DEPARTEMEN DANA DAN USAHA

1. Departemen Dana dan Usaha dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Konggres
2. Ketua Departemen Dana dan Usaha berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
4. Tugas dan Tanggung-jawabnya:
 - a. Mengkoordinasikan kerja-kerja penggalan dana
 - b. Mengawasi dan mengatur alokasi dana
 - c. Mengumpulkan iuran dan sumbangan anggota
 - d. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
 - e. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Dana dan Usaha dibantu oleh staf

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Departemen Hubungan Internasional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Konggres
2. Ketua Departemen Hubungan Internasional berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
4. Kedudukan departemen ini merupakan sentral koordinasi dari seluruh kerja internasional dan hanya berada pada Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
5. Tugas dan Tanggung-jawabnya:
 - a. Bertindak sebagai penghubung Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan organisasi politik di berbagai negara yang berhaluan politik sama
 - b. Memperluas dan memperkuat jaringan solidaritas internasional anti imperialisme
 - c. Memperkuat kerja kampanye internasional untuk mendapat dukungan bagi perjuangan demokrasi di Indonesia
 - d. Mewakili ketua dalam berbagai kesepakatan kerjasama internasional

- e. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
- f. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Hubungan Internasional dibantu oleh staf

PASAL 5

KOMITE PIMPINAN WILAYAH – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPW-PRD)

1. Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) dipilih dalam Konferensi Wilayah untuk masa jabatan dua (2) tahun
2. Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) merupakan struktur tertinggi di Daerah Tingkat I
3. Struktur Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) sama dengan struktur Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), kecuali Departemen Hubungan Internasional
4. Tugas dan tanggungjawabnya:
 - a. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
 - b. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
 - c. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
 - d. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan
1. Komite Pimpinan Wilayah tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

PASAL 6

KOMITE PIMPINAN KOTA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPK-PRD)

1. Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) dipilih dalam Konferensi Kota untuk masa jabatan dua (2) tahun
2. Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) merupakan struktur tertinggi di Daerah Tingkat II
3. Struktur Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) sama dengan struktur Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
4. Tugas dan tanggungjawabnya:
 - a. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
 - b. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
 - c. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
 - d. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

1. Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

PASAL 7

KOMITE PIMPINAN KECAMATAN- PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPC-PRD)

1. Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) dipilih dalam Konferensi Kecamatan untuk masa jabatan satu (1) tahun
2. Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) merupakan struktur pimpinan tertinggi di Tingkat Kecamatan
3. Struktur Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) sama dengan struktur Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
4. Tugas dan tanggungjawabnya:
 - a. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
 - b. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
 - c. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
 - d. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan
1. Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

PASAL 8

KOMITE PIMPINAN DESA/KELURAHAN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPD/L-PRD)

1. Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dipilih dalam Konferensi Desa untuk masa jabatan satu (1) tahun
2. Komite Pimpinan Desa/Kelurahan (KPD/L-PRD) merupakan struktur tertinggi di Tingkat Desa/Kelurahan
3. Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) beranggotakan koordinator-koordinator Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD).
4. Struktur Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dibentuk sesuai dengan kebutuhan wilayah desa/kelurahan
5. Tugas dan tanggungjawabnya:
 - a. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
 - b. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) tentang keputusan yang diterimanya

- c. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
- d. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

PASAL 9

UNIT KERJA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (UK-PRD)

1. Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
2. Berkedudukan di satuan kerja yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi
3. Anggota Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) adalah kader dari satuan kerja
4. Tugas dan tanggung jawabnya:
 - a. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh anggotanya tentang keputusan yang diterimanya dari organ di atasnya.
 - b. Melaksanakan keputusan dan instruksi dari struktur organisasi di atasnya
 - c. Merekrut dan mengusulkan nama-nama calon anggota kepada struktur organisasi yang ada di atasnya
 - d. Menyelenggarakan pertemuan reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

BAB II KONFERENSI-KONFERENSI

PASAL 10

Prinsip-prinsip untuk menyelenggarakan konferensi adalah:

- a. Konferensi diselenggarakan dari tingkat wilayah sampai pada tingkatan desa
- b. Konferensi diselenggarakan atas dasar perwakilan jumlah anggota

PASAL 11

KONFERENSI WILAYAH

1. Konferensi Wilayah adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Daerah Tingkat I
2. Konferensi Wilayah diselenggarakan satu (1) kali dalam dua (2) tahun
3. Peserta konferensi wilayah adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang memiliki hak:
 - a. Hak bicara dan hak suara
 - b. Hak memilih dan dipilih
1. Konferensi Wilayah mempunyai wewenang:
 - a. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres
 - b. Memilih dan mencalonkan nama-nama yang akan menjadi Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
- c. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

- d. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Wilayah yang dipilih pada periode sebelumnya
1. Konferensi Luar Biasa Wilayah dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu kota
2. Konferensi wilayah adalah sah jika dihadiri oleh utusan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) yang memiliki hak bicara
- 3.

PASAL 12

KONFERENSI KOTA

1. Konferensi Kota adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Daerah Tingkat II
2. Konferensi Kota diselenggarakan satu (1) kali dalam dua (2) tahun
3. Peserta Konferensi Kota adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Daerah Tingkat II dan Tingkat Kecamatan yang memiliki hak:
 - a. Hak bicara dan hak suara
 - b. Hak memilih dan dipilih
1. Konferensi Kota mempunyai wewenang:
 - a. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres Partai
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
 - c. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) yang dipilih pada periode sebelumnya
1. Konferensi Luar Biasa Kota dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu kecamatan
2. Konferensi kota adalah sah jika dihadiri oleh utusan Komite Pimpinan Wilayah – Partai rakyat Demokratik (KPW-PRD) yang memiliki hak bicara

PASAL 13

KONFERENSI KECAMATAN

1. Konferensi Kecamatan adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Tingkat Kecamatan
2. Konferensi Kecamatan diselenggarakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
3. Peserta Konferensi Kecamatan adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki hak:
 - a. Hak bicara dan hak suara
 - b. Hak memilih dan dipilih
1. Konferensi Kecamatan mempunyai wewenang:
 - a. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
 - c. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Kecamatan yang dipilih pada periode sebelumnya
1. Konferensi Luar Biasa Kecamatan dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu desa/kelurahan

2. Konferensi Kecamatan adalah sah jika dihadiri oleh utusan Komite Pimpinan Kota – Partai rakyat Demokratik (KPK-PRD) yang memiliki hak bicara

PASAL 14

KONFERENSI DESA/KELURAHAN

1. Konferensi Desa adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Tingkat Desa/Kelurahan
2. Konferensi Desa/Kelurahan diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun
3. Peserta Konferensi Desa/Kelurahan adalah seluruh anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang bertugas di desa/kelurahan tersebut yang memiliki hak:
 - a. Hak bicara dan hak suara
 - b. Hak memilih dan dipilih
1. Konferensi desa mempunyai wewenang:
 - a. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil Kongres Partai
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)
 - c. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Desa/Kelurahan yang dipilih pada periode sebelumnya
1. Konferensi Luar Biasa Desa dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu jumlah anggota partai di desa/kelurahan tersebut
2. Konferensi Desa/Kelurahan adalah sah jika dihadiri utusan Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) yang memiliki hak bicara.

BAB III KEANGGOTAAN

PASAL 15

HAK HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota memiliki hak:
 - a. Memilih dan dipilih
 - b. Mengajukan penilaian, evaluasi, usulan, kritik dan komentar
 - c. Mendapat pendidikan rutin
 - d. Mendapat media internal
 - e. Mendapat informasi tentang perkembangan organisasi
 - f. Mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan/rapat
 - g. Mendapat tunjangan minimum apabila bekerja penuh bagi organisasi
 - h. Mendapat perlindungan dari organisasi
1. Setiap anggota dapat menggunakan hak-haknya secara penuh sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART

PASAL 16

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

1. Setiap anggota memiliki tanggung jawab:
 - a. Menjunjung tinggi AD/ART dan nama Partai rakyat Demokratik (PRD)
 - b. Mematuhi kebijakan, keputusan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan
 - c. Menjalankan tugas dan program yang telah diberikan
 - d. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat/pertemuan yang diselenggarakan sesuai tingkat struktur organisasinya

- e. Memperdalam dan menambah pemahaman tentang teori-teori perjuangan demokratik- progresif-kerakyatan
- f. Membaca dan mendiskusikan media internal dengan sesama anggota, serta mendistribusikan organ propaganda Partai Rakyat Demokratik (PRD) ke massa luas
- g. Membuat laporan kerja secara reguler
- h. Membayar iuran anggota
1. Segala bentuk penyimpangan atas tanggungjawab setiap anggota akan mendapatkan sanksi organisasi

PASAL 17

SYARAT CALON ANGGOTA

1. Syarat-syarat calon anggota:
 - a. Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip sosial demokrasi kerakyatan
 - b. Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi progresif
 - c. Telah terlibat dalam aksi-aksi massa
 1. Bersedia mengikuti pendidikan bagi calon anggota dengan materi:
 - a. Tentang Sosial Demokrasi Kerakyatan
 - b. Problem Pokok Masyarakat Indonesia
 - c. Tentang Organisasi Progresif
 - d. Pengenalan dan pemahaman AD/ART Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 18

PELANTIKAN ANGGOTA

1. Seorang calon anggota yang telah melalui masa pengujian dan telah dinyatakan berhasil berhak dilantik menjadi anggota
2. Sebelum pelantikan dilaksanakan calon anggota wajib mengangkat sumpah
3. Tata cara pengangkatan sumpah: posisi anggota berdiri tegak menghadap ke depan dengan tangan kiri mengepal dan diacungkan lurus ke atas sambil membacakan sumpah.

BAB IV

JENIS-JENIS RAPAT DAN PERTEMUAN

PASAL 19

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Komite Pimpinan Pusat -- Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Komite Pimpinan Wilayah -- Partai rakyat Demokratik (KPW-PRD) dan anggota yang mendapat rekomendasi dan disetujui oleh Komite Pimpinan Pusat -- Partai rakyat demokratik (KPP-PRD)
2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan maksimal satu bulan setelah pelaksanaan Dewan Nasional
3. Tugas dan Wewenang Rapat Kerja Nasional:
 - a. Membahas program kerja organisasi dan merumuskan program kegiatan organisasi
 - b. Melaksanakan rekomendasi dari Dewan Nasional

PASAL 20**RAPAT KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)**

1. Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan yang dilaksanakan pada setiap minggu keempat
2. Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dihadiri oleh yaitu Ketua, Sekretaris dan Koordinator Departemen beserta staf departemen
3. Tugas dan Wewenang Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat demokratik (KPP-PRD):
 - a. Membahas laporan kerja dari setiap departemen dan Komite Pimpinan Wilayah – Partai rakyat Demokratik (KPW-PRD)
 - b. Melakukan evaluasi kerja organisasi
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 21**RAPAT KOMITE PIMPINAN WILAYAH – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPW-PRD)**

1. Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan selambat-lambatnya lima (5) hari sebelum rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
2. Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat demokratik (KPW-PRD) dihadiri Ketua, Sekretaris dan Ketua Departemen beserta staf departemen
3. Tugas dan Wewenang Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD):
 - a. Membahas laporan kerja setiap departemen dan Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
 - b. Melakukan evaluasi kerja organisasi
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 22**RAPAT KOMITE PIMPINAN KOTA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPK-PRD)**

1. Rapat Komite Pimpinan Kota – Partai rakyat Demokratik (KPK-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan, selambat-lambatnya lima hari sebelum rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
2. Rapat Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Ketua Departemen beserta staf departemen
3. Tugas dan wewenang Rapat Komite Pimpinan Kota adalah:
 - a. Membahas laporan kerja setiap departemen dan Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
 - b. Melakukan evaluasi kerja organisasi
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi.

PASAL 23**RAPAT KOMITE PIMPINAN KECAMATAN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPC-PRD)**

1. Rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan selambat-lambatnya lima hari sebelum rapat Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
2. Rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Ketua Departemen beserta staf departemen
3. Tugas dan wewenang Rapat Komite Pimpinan Kecamatan adalah:
 - a. Membahas laporan kerja setiap departemen dan Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)
 - b. Melakukan evaluasi kerja organisasi
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 24**RAPAT KOMITE PIMPINAN DESA/KELURAHAN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPD/L-PRD)**

1. Rapat Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan selambat-lambatnya lima hari sebelum rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
2. Rapat Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan di Tingkat Desa/Kelurahan
3. Tugas dan wewenang Rapat Komite Pimpinan Desa adalah:
 - a. Membahas laporan kerja setiap anggota pimpinan dan Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)
 - b. Melakukan evaluasi kerja organisasi
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 25**PERTEMUAN UNIT KERJA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (UK-PRD)**

1. Pertemuan Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) dihadiri seluruh anggota yang bertugas di satuan kerja tersebut
2. Tugas dan Wewenang:
 - a. Membahas laporan kerja setiap anggota unit kerja
 - b. Melakukan evaluasi kerja organisasi
 - c. Membuat rekomendasi-rekomendasi
 - d. Mengusulkan calon-calon anggota partai

BAB V**TENTANG SANKSI ORGANISASI****PASAL 26****SANKSI ORGANISASI**

1. Segala bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota yang indisipliner harus diputuskan oleh jajaran pimpinan di setiap struktur organisasi
2. Apabila kesalahan yang sama dilakukan lagi kesempatan pembelaan diri tidak diberikan

3. Sanksi harus disesuaikan dengan bobot kesalahan yang dilakukan
4. Sanksi berupa teguran lisan diberikan maksimal tiga (3) kali dan harus dilanjutkan dengan sanksi yang lebih tinggi tanpa tenggang waktu dan kesempatan pembelaan diri
5. Sanksi berupa teguran tertulis hanya diberikan maksimal satu (1) kali dengan Surat Keputusan dari ajaran pimpinan di setiap struktur organisasi
6. Sanksi berupa skorsing dapat diberikan maksimal tiga (3) kali dengan masa sanksi yang meningkat, minimal tiga (3) bulan dan maksimal satu (1) tahun dengan Surat Keputusan dari jajaran pimpinan di setiap struktur organisasi
7. Sanksi pemecatan hanya dapat diputuskan oleh Komite Pimpinan Pusa – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD).

BAB VI STRUKTUR DAN ATRIBUT ORGANISASI

PASAL 27

Struktur Organisasi (terlampir)

PASAL 28

BENDERA

1. Warna dasar bendera adalah Merah
2. Lambang bendera adalah bintang berwarna kuning yang disebelah kirinya dilingkari oleh setengah lingkaran roda gigi yang berwarna hitam dan berjumlah sembilan
3. Warna Merah memaknakan perjuangan rakyat Indonesia
4. Warna Kuning pada bintang memaknakan tujuan perjuangan rakyat Indonesia
5. Warna Hitam pada roda gigi memaknakan bahwa perjuangan rakyat Indonesia digerakkan oleh rakyat pekerja
6. Untuk kepentingan penggandaan, pengecilan dan pembesaran harus mengikuti bentuk, komposisi, warna dan perbandingan ukuran sebenarnya
7. Untuk kepentingan seperti tersebut ayat (2) harus seijin organisasi

PASAL 29

LAGU

Mars PRD (terlampir)

BAB VII ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN

PASAL 30

ATURAN TAMBAHAN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ART ini akan ditentukan melalui Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
2. Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) seperti tersebut pada ayat (1) memiliki kekuatan setingkat di bawah Dewan Nasional

PASAL 31

ATURAN PERALIHAN

Lihat pasal 29 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar.

LAMPIRAN 3: MANIFESTO PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

TIDAK ADA DEMOKRASI DI INDONESIA. Demokrasi –dalam makna kedaulatan rakyat– adalah prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan suatu kekuasaan negara. Selama kedaulatan rakyat masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya sebuah bangsa dan masyarakat, selama itu pula sejarah akan memberikan alat-alat perlawanan untuk menegakkannya.

Selama 30 tahun kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di bawah kekuasaan Presiden Suharto, kekuasaan negara telah menjadi lembaga yang memasung dan menghambat kemajuan-kemajuan partisipasi rakyat dalam proses menentukan jalannya kehidupan bernegara. Kekuasaan eksekutif menjadi sedemikian besar, menindas, tidak terkendali dan melampaui kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif. Sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya adalah sejarah perjuangan rakyat yang terkenal gigih dalam melawan segala jenis penghisapan/penindasan dalam upaya untuk menghargai kemanusiaan dan perdamaian. Namun Rejim Orde Baru telah membuat langkah mundur –bila terbanding ke masa tahun 1950 – 1959– dalam kehidupan politik. Hak-hak dasar partisipasi rakyat untuk berpolitik telah dipasung, dibatasi, dibuntungi dengan penerapan 5 paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Hakekat kemerdekaan, yang adalah kebebasan memilih, mengawasil dan menentukan negara yang berkedaulatan rakyat, semakin menjauh dari kehidupan politik sehari-hari. Secara sistematis penguasa semakin mendominasi lapangan politik dengan cara-cara yang inkonstitusional, keji dan brutal. Tidak menghargai perbedaan pendapat, tidak menghargai kritik dan tidak mau mendengar aspirasi-aspirasi rakyat. Kebangkitan perlawanan rakyat –dalam makna masyarakat sipil– dibalas dengan intimidasi, teror, penangkapan, pemenjaraan, berondongan peluru, dan bahkan dengan pembantaian. Koran-koran, majalah, buku-buku, dan alat-alat pendidikan rakyat lainnya, yang kritis dan berani berbeda dengan pandangan penguasa, dibredel. Para wartawan yang tidak menghendaki pengawasan sepihak atas informasi oleh pemerintah dikirim ke penjara; Kaum buruh yang ditindas secara ekonomi, diintimidasi, diteror bahkan dibunuh; Kaum tani semakin sulit mempertahankan tanahnya dan hak-haknya karena harus berhadapan dengan militer yang apabila mereka melawan jarahan kaum kapitalis. Semua logika kekuasaan itu dilancarkan, diterapkan, dilaksanakan, dipelihara dengan tujuan; menjaga stabilitas akumulasi modal.

Hingga kini kita melihat semakin dalamnya kesenjangan antara segelintir yang kaya dengan mayoritas yang miskin. Kaum buruh dijajakan dan dieksploitasi secara murah untuk mengundang investasi dan akumulasi modal. Perekonomian Indonesia yang tumbuh di atas 6 %/tahun, hanya dapat dinikmati oleh minoritas kelompok tertentu. Aset-aset ekonomi yang vital dan penting bagi kehidupan rakyat, diswastakan dengan konsesi yang dijual-belikan di antara kerabat dan rekan sejawat. Bentuk-bentuk monopoli dan oligopoli yang menyengsarakan rakyat dilindungi, difasilitasi oleh kekuasaan yang ada. Beban ekonomi semakin berat ketika pemerintahan dipenuhi oleh para koruptor yang berkolusi dengan orang-orang pemerintahan untuk kepentingan pribadi dan kelompok bisnisnya. Lembaga-lembaga imperialis seperti IMF dan World Bank tanpa jemu-jemunya memacu ekonomi Indonesia dengan pinjaman-pinjaman luar negeri. Akibatnya hutang luar negeri Indonesia sekarang ini telah mencapai US\$ 100 milyar. Artinya, ini kita berada di peringkat tiga dunia di bawah Brasilia dan Mexico.

Perkembangan ekonomi Indonesia yang makin menguntungkan kelompok minoritas pemilik modal, dan eksploitasi modal asing di Indonesia, menjadikan kehidupan bernegara yang ada semakin keji dan jauh dari cita-cita rakyat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

30 tahun, delapan bulan, dan duapuluh dua hari kekuasaan Orde Baru ini, secara ekonomi, politik dan budaya tidak bisa diterima dan tidak bisa lagi dipertahankan oleh rakyat Indonesia. Terbukti: kaum buruh mulai melakukan pemogokan di berbagai kawasan industri; kaum tani melakukan aksi-aksi menentang penggusuran; para mahasiswa berdemonstrasi menentang militerisme; para intelektual menentang penindasan atas kebebasan akademik; para agamawan menolak intervensi militer; para suku anak dalam di Papua Barat dan Kalimantan menantang penghisapan oleh Jakarta; Di Timor-Timur, rakyat Maubere tidak pernah berhenti melawan peyerbuan militer dan penjajahan oleh rejim Orde Baru; rakyat Aceh dan Papua Barat menuntut hak penentuan nasib sendiri. Metode-metode perlawanan rakyat juga terus meningkat melalui aksi-aksi masa besar-gabungan antar sektor masyarakat, menduduki DPR, menyerbu kantor polisi dan markas militer, konfrontasi dengan militer, hingga produksi selebaran-selebaran yang massif. Intinya: ketidakpuasan rakyat terjadi dimana-mana; rakyat sudah tida rela hidup di bawah rejim Orde Baru. Sistem ekonomi, politik dan budaya sekarang ini, yang dijaga oleh garda militer rejim Orde Baru, terbukti memang tidak mampu menyalurkan apalagi mencari jalan keluar bagi problem-problem nyata yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri.

Sistem ekonomi, politik dan budaya yang ada sekarang sedang bangkrut. Inilah saatnya segala paket perundang-undangan yang membatasi partisipasi rakyat seperti 5 paket UU politik dicabut; inilah saatnya garda militer yang berlindung di bawah Dwi Fungsi ABRI harus dicabut.

Paket undang-undang ini adalah benteng pengabsahan pemerintah untuk membatasi hak-hak politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan tata-kenegaraan. Partai politik, sebagai ibu kandung dari rakyat untuk berpolitik, sebagai rahim kedaulatan rakyat, harus segera ditegakkan; Pemilu yang jujur dan demokratis, dengan tidak membatasi partisipasi dan aspirasi politik rakyat, sebagai hak masyarakat sipil modern, tidak pernah ada; Susunan DPR/MPR mencerminkan kejahatan dalam mempertahankan kekuasaan –oknum-oknum klik kekuasaan dan ABRI mendapat hak-hak khusus yang diangkat oleh Presiden tanpa melalui pemilu; UU tentang organisasi kemasyarakatan tidak mengizinkan afiliasi politik dan dihambat dalam pendiriannya; dan terakhir UU tentang referendum tidak pernah dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan penting seperti perubahan UUD 45 --UUD 45 menjadi suatu yang sakral tanpa mempertimbangkan perubahan situasi ekonomi, politik dan budaya dunia. Rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang bisa belajar, memiliki kesempatan, dan memiliki ruang untuk sadar akan kedaulatannya, sadar akan kemampuannya dalam berpolitik. Untuk itu tidak ada jalan lain selain mencabut paket 5 UU politik 1985.

Militer menjarah lorong-lorong kehidupan masyarakat sipil, persis dengan hakekat kemiliterannya, sebagai penyandang senjata, terlebih-lebih dengan hakekat kemiliteran rejim Orde Baru –tak terusik oleh sejarah pencerahan abad pertengahan sekalipun. Masyarakat sipil modern yang tak bersenjata harus memiliki otoritas mutlak terhadap militer, menjadikan militer (meminjam istilah masyarakat Perancis) sebagai Si Raksasa

Bisu (*La Grande Muette*) –tak ada satu kata pun tentang politik (baca: kekuasaan) dari moncong senjata. Oleh karena itu: Rakyat harus mencabut Dwi Fungsi ABRI Pembudakkan rejim Orde baru ke dalam sistem kapitalisme dunia membuat pemerintahan Jenderal Suharto tidak dapat lari dari sorotan internasional atas penindasan yang ada dinegerinya. Tumbangnya rejim-rejim otoriter di Amerika Latin, Afrika, dan Asia mengajarkan pada rejim dan gerakan demokrasi bahwa tidak ada kekuasaan otoriter yang langgeng dan abadi; semua pasti ada akhirnya. Kebijakan ekonomi luar negeri haruslah mempunyai watak anti neo-kolonialisme –seperti yang diwujudkan melalui APEC, AFTA dan NAFTA. Kerjasama Internasional harus dibawah syarat-syarat damai dan kemanusiaan. Untuk itu penjajahan atas Timor-Timur haruslah menjadi Bab dari program perjuangan kita, bukan sekedar embel-embel solidaritas –dalam makna tabo terhadap rakyat Maubere untuk menentukan nasibnya sendiri: MERDEKA. Perjuangan demokrasi Indonesia tidaklah lengkap dan palsu bila tidak menghubungkan dengan tuntutan kemerdekaan bagi rakyat Maubere. Partai Rakyat Demokratik (PRD) menghindari chauvinis-nasionalisme dan menganggap persaudaraan internasional sebagai watak pokok dari perjuangan rakyat. Terintegrasinya kekuasaan modal secara internasional, dengan dukungan pemerintahan yang melecehkan demokrasi, haruslah juga dilawan secara internasional. Untuk itu Partai Rakyat Demokratik (PRD) akan aktif dan mendukung semua forum dan aksi damai internasional yang berwatak kerakyatan dan anti penindasan.

Kerja-kerja perjuangan melawan kekuasaan rejim Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari program Partai rakyat Demokratik (PRD), dan sebagai sebuah partai politik merasa syah, berhak dan wajib berpartisipasi untuk menentukan jalannya pemerintahan dan kekuasaan negara. Penumpukan partisipasi rakyat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kedaulatan rakyat dalam sistem yang ada tidak melulu membutuhkan legitimasi legal-fomal penguasa, bila penguasa yang ada justru tidak dapat menghargai partisipasi aktif dari rakyatnya sendiri untuk mengawasi dan mengkritiknya. Problem-problem masyarakat Indonesia yang kapitalistik ini harus diselesaikan, tidak bisa tidak harus dengan suatu partisipasi rakyat yang harus semakin meluas: DENGAN DEMOKRASI. Berbagai kekuatan yang mungkin membawa perbaikan politik harus sesegera mungkin menyatukan langkah dan program-programnya untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratik kerakyatan.

Suatu pemerintahan yang berwatak demokratik dan kerakyatan haruslah mempunyai kekuatan arah kemilau masa depan yang jelas tentang masyarakat Indonesia, serta jalan keluar bagi persoalan ekonomi, politik dan budayanya –yang selama 30 tahun, delapan bulan, dan duapuluh hari, ditanam dengan pupuk-bangkai dan air-darah rakyat. Untuk mencapai kekuatan arah cita-cita masyarakat yang demokratik tersebut harus dicari kekuatan pendorong untuk mencapainya di tengah-tengah rakyat itu sendiri. Untuk itu persoalan strategi-taktik haruslah dirumuskan dengan cara tepat berdasarkan pada potensi-potensi yang ada di rakyat itu sendiri. Dari semua potensi-potensi yang ada di masyarakat tersebut kami melihat perlawanan kaum buruh adalah pondasi yang paling mungkin untuk diraih dan diorganisir dalam perjuangan demokratik. Jumlahnya yang semakin besar, kesetiaan perlawanannya, dan makna strategisnya bagi perekonomian kapitalisme Orde Baru akan membuat buruh dapat menjadi benteng demokrasi di masa kini dan masa depan; Kekuatan kedua yang secara historis terbukti mampu menjadi kekuatan yang menentukan adalah mahasiswa dan kaum intelektual. Kelompok sosial

ini telah menjadi pelopor dalam perlawanan politik menentang kekuasaan rejim Orde Baru. Kemampuan mereka dalam ideologi, organisasi dan politik merupakan sumbangan yang penting bagi gerakan demokrasi. Penumpukan dan petualangan gerakan mahasiswa, hanya bisa dikurangi bila terintegrasi dalam gerakan rakyat atau demokrasi secara keseluruhan; Kekuatan ketiga yang terbukti yang terbukti sedang bangkit adalah kaum miskin kota. Jumlah mereka yang besar dan tersingkir akibat daya tarik kota dan pembangunan yang pincang antara kota-daerah menjadikan sektor ini menjadi penyangga basis masa di kota. Dalam aksi-aksi mendukung Megawati, terlihat bagaimana sektor ini secara militan dan fanatik membela hak-hak mereka; Dan sektor terakhir yang juga penting adalah sembangan perlawanan kaum tani. Kapitalisme brutal yang terjadi telah memiskinkan dan membuat petani kehilangan tanah sebagai alat produksinya. Tidak mengherankan bila sektor ini, yang jumlahnya tersebar dipelosok Indonesia akan menjadi kekuatan pendukung yang penting dalam gerakan demokrasi.

Untuk menyatukan dan menggerakkan kekuatan-kekuatan demokratik yang ada sekarang ini harus dibuat suatu platform bersama yang mampu bergerak dalam kesatuan aksi dan tindakan. Kesatuan aksi dan tindakan tidak cukup diwakili oleh persamaan program dan metode, tapi juga kecakapan untuk menerjemahkan momentum politik yang mampu menyeret partisipasi rakyat secara lebih luas. Untuk itu momentum Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 1997 harus direspon dan diantisipasi. Pemilu adalah momentum, ketika kesadaran masa terfokus pada aroma politik dengan disertai pengerahan-pengerahan massa yang luas dari para kontestan. Gerakan demokrasi harus mengamati kesadaran massa sehingga dapat memberikan sumbangannya bagi peningkatan kesadaran rakyat tentang hakekat politik dari kekuasaan Orde Baru. Kita tidak boleh mengucilkan diri dari kesadaran massa, apalagi meremehkannya. Alat untuk mengorganisir dan memperluas jaringan gerak-perlawanan dengan memanfaatkan isu pemilu dapat diandalkan melalui pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). KIPP yang sudah populer tidak dapat terpisah dari kondisi politik yang terus berubah dari hari ke hari. Untuk itu KIPP diharapkan dapat menembus batas-batas kesadaran palsu rakyat dan mampu melakukan agitasi-propaganda untuk mendidik dan mengaktifkan rakyat bahwa pemilu harus dihubungkan dengan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat akan selalu berhubungan dengan paket 5 UU politik tahun 1985 dan Dwi Fungsi ABRI. Ke sana lah muara KIPP harus ditujukan. KIPP bukan lah sekedar alat dari konsep pemantauan proses pemilihan umum –dari sejak pantarlih hingga penghitungan suara– namun juga mengawasi sampai sejauh mana kedaulatan rakyat dihargai sebagai fondasi bagi keabsahan pemilu.

Langkah penting yang sudah dirasakan mendesak, dan harus diciptakan adalah membangun suatu front persatuan diatas suatu platform bersama untuk mencapai sasaran-sasaran strategis bagi kedaulatan rakyat seperti pencabutan 5 paket UU politik 1985 dan dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Dan fondasi front, tidak bisa lagi dan tidak bakal mengalami penguatan bila tidak didasarkan pada basis-basis massa. Untuk itu kualitas organisasi yang layak dalam suatu front haruslah setingkat partai-partai politik atau ormas-ormas yang berbasis massa. Front perjuangan yang serius dan sejati harus lah mempunyai program-program, strategi/taktik, dan slogan-slogan yang mempunyai akar ke basis massa. Front adalah suatu wadah pengerahan massa, bukan wadah kampanye isu politik. Selama ini kita belum sadar akan makna politik front, dan masih

tidak bisa membedakan batasan-batasan antara komite aksi dengan front. Untuk tugas-tugas ke depan, suatu usaha membangun front-demokratik harus sesegera mungkin diupayakan. Adalah tidak berguna mempertahankan eksistensi organisasi, bila ia tidak mampu menjawab persoalan politik strategis dalam menghadapi kekuasaan rejim Orde Baru yang otoriter. Partai Rakyat Demokratik (PRD) menganggap, bahwa suatu front harus dibangun dengan bersendikan kantong-kantong massa. Selama kantong-kantong masa belum dapat digerakkan menjadi suatu gerakan demokrasi, maka front tersebut akan tertatih-tatih dan gagap menghadapi kekuasaan yang militeristik dan mau menang sendiri. Dengan semua problem-problem masyarakat Indonesia di atas, maka juga harus secara jelas dapat dibayangkan dan divisionerkan suatu masyarakat masa-depan yang demokratis secara ekonomi, politik dan budaya. Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang pentingnya terlebih dahulu untuk menyelesaikan solusi-solusi politik untuk mempermudah solusi-solusi ekonomi Indonesia yang sudah tereksplotasi habis-habisan dibawah kapitalisme. Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang penting, di masa depan, membangun suatu masyarakat sipil modern yang menghormati kedaulatan rakyat dan pembenahan praktek demokrasi dengan trias-politiknya secara sejati dan sepenuh-penuhnya. Pembangunan demokrasi yang sejati dan sepenuh-penuhnya haruslah diabdikan pada kedaulatan rakyat. Untuk itu suatu pemerintahan koalisi-demokratik kerakyatan haruslah diciptakan di masa depan, untuk menyalurkan partisipasi rakyat dengan saling menghormati aliran ideologi dan alat-alat politiknya masing-masing secara damai, tanpa kekerasan.

Perkembangan masyarakat sipil modern Indonesia yang berkedaulatan rakyat akan tergantung dari cara-cara kita membangun suatu gerakan demokrasi di masa kini. Langkah-langkah strategis-taktis harus dibangun sekarang ini dengan tetap berangkat dari kondisi-kondisi kongkrit yang ada dimasyarakat. Untuk itu Partai Rakyat Demokratik (PRD) percaya dan yakin bahwa pengorganisirannya adalah satu-satunya cara untuk menegakan kedaulatan rakyat. Dan berdirinya Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan salah satu manifestasi dan jawaban untuk menjawab kebekuan dan kebuntuan dari alat-alat politik ekstra parlementer, serta meningkatkan kualitatif gerakan rakyat menuju suatu masyarakat demokratik multi partai kerakyatan yang damai, tanpa kekerasan.

Jakarta, 22 Juli 1996

LAMPIRAN 4: PIDATO DEKLARASI PRD

Mari Kibarkan

Panji-Panji Kedaulatan Rakyat!

Hidup Rakyat! Hidup Demokrasi !

Kepada yang terhormat kawan-kawan dari buruh, tani, mahasiswa, pemuda, intelektual, para undangan, tokoh-tokoh pejuang demokrasi dan para wartawan serta para anggota dan simpatisan PRD yang berdatangan dari berbagai kota di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Aku, ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), atas nama seluruh pengurus pusat maupun daerah PRD dan massa pendukung, mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kehadirannya pada Deklarasi Partai Rakyat Demokratik ini. Hari ini, pada tanggal 22 Juli 1996, kami para pengurus PRD mengumumkan pendirian partai kami kepada rakyat dan penguasa secara terbuka dan terang-terangan. Meskipun baru dideklarasikan pada hari ini, sebetulnya PRD sudah melakukan aktivitas politik praktis dan aksi-aksi massa dengan menggunakan nama Partai Rakyat Demokratik. Cikal bakal PRD telah berdiri pada tanggal 2 Mei, 1994. Ketika itu PRD masih berbentuk organisasi payung bagi perjuangan rakyat di berbagai sektor seperti buruh, tani, mahasiswa dan kebudayaan dengan nama Persatuan Rakyat Demokratik. Seiring dengan kemajuan-kemajuan didalam masyarakat dan khususnya perluasan didalam basis massa pendukung PRD, diputuskan untuk mengubah organisasi payung ini menjadi suatu partai politik. Pada Kongres Luar Biasa, tanggal 15 April, 1996, di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, secara resmi didirikanlah Partai Rakyat Demokratik. Selain memilih kepengurusan nasional yang baru, Kongres juga sudah memutuskan kesimpulan tentang masyarakat Indonesia dan problem-problemnya, Program-program Perjuangan, Strategi/Taktik, bentuk keorganisasian, dan Slogan organisasi selama kepengurusan 1996-1998. Dengan bentuk partai politik, PRD berharap dapat menyatukan kekuatan demokrasi yang progresifkerakyatan dari berbagai sektor dan geografis yang tersebar diseluruh Indonesia dalam kesatuan aksi dan tindakan dalam perjuangan demokrasi dan menegakan kedaulatan rakyat. Kami sadar pendirian partai baru ini tidak mungkin mendapat pengakuan atau legalitas dari penguasa. Dan terus terang kami memang tidak membutuhkan suatu legitimasi dari penguasa, legitimasi bagi PRD adalah pengakuan dari rakyat. Selama paket undang-undang politik yang membatasi partisipasi rakyat untuk mengontrol pemerintahan seperti yang terdapat dalam 5 UU politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI masih berlaku, selama itu pula rakyat tidak mungkin dilegalkan untuk mendirikan partai baru, oleh karenanya rakyat harus menentang 5 paket UU Politik dan Dwi Fungsi tersebut. Setiap perundang-undangan dan fungsi kelembagaan yang bertentangan dengan kedaulatan rakyat tidak layak untuk dipatuhi, malahan sudah saatnya untuk dicabut. Oleh karena itu PRD menjadikan pencabutan 5 UU politik dan Dwi Fungsi ABRI sebagai tuntutan strategis untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Dan PRD melihat berdirinya PUDI, Masyumi Baru, Parkindo dan PNI Baru sebagai langkah-langkah yang tepat untuk mencairkan kebekuan politik dan kebuntuan saluran-saluran politik formal yang sudah ada.

Saudara-saudara pecinta demokrasi yang terhormat...

Selama 30 tahun, 8 bulan, dan 22 hari kekuasaan Orde baru dibawah pimpinan Jendral Suharto, terjadi kemunduran-kemunduran yang fatal dalam sistem politik dan budaya politik. Kekuasaan eksekutif yang ada di tangan presiden kelewat tidak terbatas dengan

kewenangan yang melampaui legislatif dan yudikatif. Prinsip-prinsip mendasar demokrasi modern yang menjadikan legislatif (baca: MPR/DPR) sebagai pengontrol eksekutif sudah tidak dijalankan. Kosentrasi kekuasaan pada eksekutif ini, telah menciptakan suatu labirin kekacauan dalam ekonomi dan politik eksekutif ini, telah menciptakan suatu labirin kekacauan dalam ekonomi dan politik. Nepotisme, kolusi dan korupsi menjadi suatu kultur di antara para pemegang kekuasaan untuk memperbesar jaringan bisnis keluarga dan kolega-kolega bisnisnya. Konsesi-konsesi bisnis dijalankan dengan cara-cara yang kotor dengan prinsip "asal cepat dapat untung." Bila rakyat setiap hari harus membanting tulang dengan keluhan "hari ini kita makan apa?", maka oligarki kekuasaan yang ada sekarang juga sibuk memilih "hari ini saya makan siapa?" Saudara-saudara para pejuang demokrasi...

Pemusatan kekuasaan ini telah membuat mandeg dan mampet mekanisme politik yang ada, apalagi perangkat perundang-undangan yang dibuat rejim semakin melegitimasi pemusatan kekuasaan tersebut. Untuk itu PRD sangat yakin, bahwa persoalan suksesi kepemimpinan nasional sudah saatnya harus dibicarakan oleh rakyat Indonesia. Dan persoalan suksesi ini harus juga dihubungkan dengan percabutan paket 5 UU politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI, bukan sekedar pergantian figur. Suksesi di Indonesia selama ini dijadikan suatu tabu politik oleh penguasa. Malahan "menurut petunjuk bapak presiden", bukan lah budaya kita untuk mengelus-ngelus jago. Namun sementara itu Golkar sendiri sibuk membuat pernyataan sikap dimana-mana untuk mendukung Jendral Suharto agar dicalonkan kembali sebagai presiden RI. Menurut PRD, suksesi sudah saatnya untuk dijadikan perdebatan diantara partai-partai politik yang ada. Untuk itu adalah suatu yang syah bagi semua warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak boleh ada pembatasan-pembatasan dan perundang-undangan yang membatasi hak-hak warga negara tersebut. Seorang pemimpin negeri ini, haruslah dikenal oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan presiden haruslah transparan. Dan pemilu yang ada haruslah menyertakan calon-calon dari partai politik yang akan dijagokan sebagai calon presiden mendatang. Posisi PRD dalam proses suksesi, sudah cukup jelas, bahwa negeri ini harus mengalami suatu fase baru dalam kepemimpinan nasional. Untuk itu PRD sudah memutuskan untuk memberikan dukungan-kritis pada PDI-Megawati Soekarnoputri dan pencalonannya sebagai Presiden Indonesia yang baru. Proses penghancuran atas kedudukan politik Megawati sebagai ketua PDI yang syah secara brutal oleh penguasa militer dan para birokrat, justru semakin menambah kepercayaan rakyat akan kepemimpinannya. Dimana-mana rakyat turun kejalan untuk mendukung Megawati. Kita membutuhkan figur seperti Megawati; dicintai rakyat dan berani melawan arus politik yang menghambat kedaulatan rakyat.

Saudara-saudara pejuang dan partisan demokrasi sejati...

Kekuasaan negara tidak boleh dipertahankan melalui cara-cara teror, intimidasi, penangkapan, penjara atau memproduksi perangkat UU dan kelembagaan yang anti kedaulatan rakyat. Kita melihat, selama 30 tahun, delapan bulan dan duapuluh dua hari kekuasaan Orde Baru dipenuhi oleh "prestasi" penggunaan kekerasan atas rakyatnya sendiri. Dari sejak berdirinya, kekuasaan Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari peristiwa holokaus dan perampasan tak-konstitusional atas kekuasaan presiden Sukarno. Lebih dari satu juta orang menjadi korban dari penegakan kekuasaan Orde Baru. Sebuah biaya yang tak boleh ditanggung, menjijikan, memuakkan, tak beradab. Pada hakekatnya,

kemenangan yang memakan korban, adalah sebuah kekalahan. Ini adalah suatu sejarah hitam dari negeri kita, yang sepertinya menyambung kekuasaan fasisme-Jepang, menghacurkan gerbang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, 1945, yang seharusnya bukan sekedar dipahami dalam makna kemerdekaan/independence tapi juga kebebasan/freedom. Cara-cara kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan negara merupakan akibat dari kekuasaan dominan ABRI didalam politik. ABRI, yang seharusnya hanya menjadi alat pertahanan negara dari serangan pihak luar, kini telah berubah menjadi penguasa yang paling menentukan. Dwi Fungsi ABRI dijadikan legitimasi oleh Orde Baru untuk mempertahankan supremasi politiknya. Padahal didalam UUD'45 sekalipun tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan supremasi tentara dalam politik! Di dalam UUD'45, yang selalu digambar-gemborkan akan ditegakkan oleh Orde Baru, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan misalnya bahwa ABRI mendapat jatah duduk di DPR/MPR melalui Fraksi ABRI, tanpa melalui Pemilu! Karena itu PRD tidak pernah meminta bertemu fraksi ABRI di DPR RI, sebab itu berarti mengakui keberadaannya di parlemen. PRD bertemu fraksi ABRI di DPR RI, sebab itu berarti mengakui keberadaannya di parlemen. PRD berprinsip tidak boleh ada pengecualian-pengecualian dan kekhususan-kekhususan bagi semua rakyat Indonesia, termasuk ABRI. Bila anggota ABRI ingin menyalurkan aspirasi politiknya, maka mereka berhak menyalurkannya melalui partai-partai politik sebagai individu, yang telah melepaskan keanggotaannya sebagai ABRI, sebagai seorang individu yang tidak menyangand senjata. Sehingga semua wakil-wakil yang duduk di DPR adalah betul pilihan rakyat, yang dipilih rakyat tidak dalam suasana, atmosfir, ketakutan. Bila betul seorang bekas ABRI itu dipilih rakyat, maka ia harus dapat membuktikan dirinya melalui pemilihan secara langsung, tanpa jatah-jatahan kursi di DPR/MPR RI. ABRI harus dikembalikan fungsi konstitusionalnya: hanya sebagai penjaga keamanan negara dari serangan pihak luar; dan polisi, yang berada di bawah wewenang departemen dalam negeri, hanyalah berurusan dengan hal-hal pidana-kriminal dan perdata-non-politik.

Saudara-saudara pejuang dan demokrat sejati sekalian...

Situasi politik nasional sekarang ini sedang mengalami titik kulminasi dalam partisipasi rakyat. Rejim yang sedang kehilangan kepercayaan diri ini mencoba memotong-motong kepemimpinan politik populis seperti Gus Dur dan Megawati. Setelah gagal menggusur Gus Dur dari kepemimpinan NU, skenario lalu dimainkan untuk memotong Megawati. Sayangnya, pemerintah salah, ternyata ia telah memilih "kerbau", bukan "banteng". Suryadi yang dipaksakan untuk memimpin PDI ternyata keok dihadapan rakyat pendukung Megawati dan para simpatisannya. Massa turun ke jalan di berbagai kota untuk menunjukkan kemarahan dan penentangannya atas campur tangan kekuasaan militer dan birokrat. Dan kejadian ini semakin menajamkan kontradiksi antara rakyat dengan pihak pemegang kekuasaan. PRD memandang tindakan penguasa terhadap Megawati Sukarnoputeri tersebut bukanlah sekedar persolan manuver menjelang pemilu 1997 untuk mendongkrak suara Golkar yang semakin tidak populer di mata rakyat dan usaha mengemboskan PDI semata. Tetapi harus dilihat bahwa ini merupakan akibat praktek politik otoriter yang dijalankan dengan bersejatakan paket 5 UU politik dan Dwi Fungsi ABRI. Karena itu persoalan PDI, tidak bisa dilihat secara fragmentaris, tapi harus dilihat secara holistik sebagai hal yang tidak terhindarkan dari sistem politik yang

otoriter dan jauh dari kedaulatan rakyat. Selama kedaulatan rakyat dilecehkan "secara konstitusional," selama itu pula demokrasi telah mati sebelum dilahirkan.

Saudara-saudara pejuang demokrasi sekalian...

Sistem pemilu yang ada sekarang hanyalah sekedar rekayasa untuk melegitimasi penguasa. Ketidakpuasan rakyat atas sistem pemilu yang ada tampak dengan pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Golput. Bagi PRD, KIPP merupakan alat untuk membuktikan kepada rakyat bahwa suatu pemilu pasti tidak akan demokratis bila paket 5 UU politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI tidak dicabut; Selain itu juga, bagi PRD, KIPP merupakan alat yang akan menjadi wadah partisipasi rakyat dalam mengawasi, menghujat, dan melawan kekuasaan yang korup, karena selama ini rakyat tidak pernah memiliki kesempatan memiliki wadah oposan, baik secara konstitusional maupun momentual. Tujuannya jelas, untuk membuktikan pada rakyat bahwa pemilu yang akan datang, yang pernah ada, dan diselenggarakan oleh rejim Orde Baru, tidak mungkin menegakan kedaulatan rakyat. Energi rakyat yang tersedot oleh momentum pemilu ini, kami pikir harus dijadikan arena untuk pendidikan politik secara massif. Melihat perkembangan yang terjadi di dalam PDI, PRD berpendapat bahwa kini semakin terbukti lah di hadapan mata dan pengertian rakyat bahwa pemilu 1997 sudah tidak memiliki keabsyahannya lagi bila dilangsungkan. Tapi ini bukan berarti pemilu 1997 harus ditunda --dalam arti memperpanjang kekuasaan yang korup. Tidak, persoalannya adalah bagaimana pemilu bisa diselenggarakan dalam suasana yang terbebas dari ketakutan, yang terbebas dari paket 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI; Tidak juga berarti bahwa KIPP harus dibubarkan. Karena KIPP, dalam pemahaman PRD, bukan sekedar alat untuk mengawasi jalannya pemilu, dari sejak pantarlih hingga penghitungan suara, tapi adalah untuk menuntut kondisi-kondisi demokratis sebagai landasan bagi pemilu yang menghargai kedaulatan rakyat --sekali lagi, yang terbebas dari paket 5 UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Jadi, walaupun PRD telah tahu pasti bahwa pemilu yang akan datang itu tidak akan demokratis, namun PRD, dengan alat KIPP-nya, harus membuktikannya dihadapan rakyat, dan tentu saja dalam perspektif strategi/taktik proses pembuktian ini akan mengakumulasi tumpahan kekuatan partisipasi rakyat yang maha-besar. Rakyat mengerti itu; rejim Orde Baru mengerti itu; Terbukti, bola salju partisipasi rakyat dalam KIPP, bahkan ketika masih kecil pun, diteror rejim Orde Baru.

Saudara-saudara, pejuang kedaulatan rakyat...

Dalam memahami gerakan demokrasi di dalam negeri, tidak boleh dipisah dari gerakan demokrasi di seluruh dunia yang semakin marak ini. Oleh karenanya, salah satunya, bagi kita, kaum demokrat Indonesia, terutama harus mengkaitkan perjuangan kita dengan perjuangan bangsa dan rakyat Maubere (Timor Timur). Kita semua tahu, bahwa demokrasi sangat menjunjung tinggi kedaulatan suatu bangsa. Maka dalam konstitusi kita yang telah dibuat para pejuang negeri ini, yang walau dibuat masih di bawah atmosfer kekuasaan fasisme-Jepang pun, nyata-nyata masih bisa menegaskan dan menempatkan kemerdekaan suatu bangsa di alenia pertama: bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Ya! Kemerdekaan adalah hak semua bangsa, termasuk Bangsa Maubere! Jangan lah kita berharap mendapat simpati dan dukungan internasional bagi perjuangan kita, bila kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah tidak menjadi agenda/tuntutan perjuangan kita, atau bila penindasan terhadap bangsa terjajah di pelupuk mata kita saja pun hanya sekedar menjadi tontonan humanitarian palsu.

Seharusnya kita tidak mengotori kain putih-suci bendera perjuangan bangsa kita oleh merah-darah korban kemunafikan kita; kita hanya akan memulainya dengan merah-keberanian pembebasan. Proses "integrasi" Timor Timur ke Indonesia belum selesai. Maka dari itu, PRD berkeyakinan bahwa perjuangan demokrasi di Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan perjuangan self determination Bangsa Mau Bere; Maka dari itu, sikap PRD mengenai masalah Timor Timur jelas dan tegas: harus diselenggarakan referendum bagi penentuan masa depan rakyat Mau Bere di bawah pengawasan PBB dan lembaga-lembaga independen internasional.

Saudara-saudara yang aku cintai... PRD yakin jalan untuk menegakan kedaulatan rakyat tidak akan pernah dapat dipatahkan. Didalam kegelapan sekalipun, kita masih bisa bernyanyi, bernyanyi tentang kegelapan, kata Bertold Brecht. Dan nyanyian kegelapan politik Indonesia selama 30 tahun, 8 bulan, 22 hari, tampaknya rakyat akan mulai melihat fajar yang merekah. Fajar tersebut muncul bersama long march rakyat yang sedang mengibarkan panji-panji kedaulatannya. Lagu demokrasi akan dinyanyikan di jalan-jalan, di pabrik-pabrik, di kampung-kampung, di kampus-kampus di desa-desa dan di gunung-gunung, sehingga orang yang benci akan long march demokrasi yang mulai bangkit tersebut tidak punya pilihan; ikut menyanyikan demokrasi dan megibarkan panji-panji kedaulatan rakyat, dimana pun ia berada, apapun status sosialnya, tidak peduli darimana asal-usulnya.

Akhir kata, PRD dengan terbuka menerima partisipasi rakyat untuk menjadi anggota, terlibat dalam aksi-aksi maupun sumbangan yang berbentuk materiil maupun non-materiil bagi perjuangan. PRD yakin kedaulatan rakyat tidak bisa dipenjara atau dibunuh, kedaulatan rakyat adalah matahari yang menerangi jiwa-jiwa pemegang kekuasaan. Benteng kezaliman yang paling kuat pun tidak akan pernah abadi. Dan kedaulatan rakyat adalah keabadian yang tidak lapuk disepanjang zaman. PRD, sebagai partai rakyat tertindas, akan menjadi garda depan untuk mengibarkan panji-panji kedaulatan rakyat. Sebagai penutup mari bersama-sama menyerukan slogan dari PRD:

Satu Perlawanan, Satu Perubahan:

Upah 7000;

Turunkan harga;

Awasi Pemilu;

Partai Baru, Presiden Baru;

Referendum bagi Rakyat Maubere

Jakarta, 22 Juli, 1996

Budiman Sudjatmiko

LAMPIRAN 5: NASKAH UNDANGAN DAN PERNYATAAN SIKAP DEKLARASI KPRM-PRD

KOMITE POLITIK RAKYAT MISKIN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
(KPRM – PRD)

UNDANGAN

Kebangkitan demokratik kini adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Ia sedang maju dengan kesulitan yang lebih besar, dengan langkah yang lebih lambat dan melewati jalur yang lebih ruwet ketimbang yang kita bayangkan, akan tetapi, walaupun demikian, ia sedang maju.

Kepada:

Kawan-kawan Gerakan Demokratik di tempat
Salam Pembebasan,

Mempersatukan jutaan rakyat (terhisap dan tertindas) dalam kepemimpinan persatuan adalah suatu tugas strategi-taktik yang sangat mendesak hari ini; yang (juga) amat sangat sukar; yang menuntut ketekadan, keuletan dan keberanian. Berhadapan dengan momentum elektoral—yang hambatan-hambatan demokratiknya belum sanggup dihancurkan oleh gerakan rakyat—tugas revolusioner tersebut menuntut tanggung jawab yang lebih besar, khususnya dalam mengolah potensi kebangkitan rakyat ke dalam politik non kooperasi – non kooptasi: Politik Rakyat Miskin.

Kepentingan untuk menegakkan Politik Rakyat Miskin menuju momentum elektoral 2009 lah, yang mendesak kami untuk segera mendeklarasikan secara terbuka Komite Politik Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik (KPRM-PRD), yakni sebagian PRD yang menolak menanggalkan prinsip-prinsip Politik Rakyat Miskin sekadar demi menjadi peserta pemilu 2009.

Untuk itu, kami mengundang kawan-kawan gerakan demokratik dan kerakyatan, untuk hadir dalam acara deklarasi dan diskusi yang akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tgl: Kamis, 31 Januari 2008

Waktu: Pukul 13.00 s/d selesai

Tempat: Ruang Pertemuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Lt.3
Jl. Diponegoro No. 74. Jakarta

Tema: Tanggung Jawab KPRM-PRD kepada Rakyat dan Gerakan Demokratik:
"Menolak Politik Kooptasi/Kooperasi PRD-PAPERNAS dengan Sisa-sisa Lama dan Reformis Gadungan; Bersatu, Tegakkan Politik (Alternatif) Rakyat Miskin!"

Kami sangat mengharapkan kedatangan kawan-kawan, untuk berbagi visi dalam menyusun rencana merebut agenda politik 2009 dari tangan partai-partai sisa orba, tentara dan reformis gadungan.

Jakarta, 28 Januari 2008

Zely Ariane

Juru Bicara

Daftar Undangan:

1. Aliansi Buruh Menggugat

2. Aliansi Rakyat Miskin
3. Aliansi Jurnalis Independen
4. DEMOS
5. Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek
6. Federasi Buruh Transportasi Nasional
7. FSP2KI
8. Gerakan Pembebasan Perempuan Papua Barat (GP3PB)
9. Hapsari
10. Intelegensia Study Club (ISC)
11. IKOHI
12. Institut Global Justice
13. Jakarta Centre for Street Children (JCSC)
14. KONTRAS
15. Koalisi Anti Hutang
16. Komite Pembaharuan Agraria
17. Lingkaran Studi untuk Aksi dan Demokrasi Indonesia
18. LP-KROB
19. Perhimpunan Rakyat Pekerja
20. Penguin Merah
21. Partai Perserikatan Rakyat
22. Serikat Mahasiswa Indonesia
23. Serikat Petani Indonesia
24. SP MADANI
25. SBSI 92
26. Serikat Pekerja Metal Indonesia
27. Serikat Pekerja Nasional
28. Serikat Hijau Indonesia (SHI)
29. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
30. Dede Utomo
31. Yusuf Isak
32. Eko Prasetyo
33. George Aditjondro
34. Rumah Kiri
35. Asvin
36. Wimar Witoelar
37. Asvi Warman Adam
38. Pers

Pernyataan sikap KPRM-PRD dalam deklarasinya:

Menolak Politik Kooptasi/Kooperasi dengan Sisa-sisa Lama, Tentara dan Reformis Gadungan; Bersatu, Tegakkan Politik (Alternatif) Rakyat Miskin!

Pasca penjatuhannya Soeharto di tahun 1998, PRD telah menyadari bahwa tuntasnya reformasi, hanya bisa dilakukan jika sisa-sisa kekuatan lama (yakni Golkar dan Tentara) berhasil dikalahkan oleh kekuatan rakyat namun, sayangnya, bukan saja kekuatan lama tersebut tidak berhasil dihancurkan, kekuatan reformis pun, yang termanifestasikan

dalam partai-partai politik baru, semakin menunjukkan watak aslinya, yang tidak berbeda dengan kekuatan lama dalam kepentingan mengabdikan pada modal barat yang sedang menjajah rakyat Indonesia. Dengan demikian, saat ini, bukan saja sisa-sisa lama yang menjadi musuh rakyat, melainkan juga kekuatan reformis gadungan.

Terhadap situasi ekonomi-politik sekarang, kaum gerakan dituntut untuk sanggup meneliti, menyimpulkan dan mengambil tanggung jawab. Rakyat semakin hari bertambah gamblang mengerti atas bertumpuknya persoalan yang nyata mereka hadapi. Semakin terbuka pula bagi kaum gerakan untuk menjelaskan kaitan persoalan sehari-hari rakyat dengan jaring penindasan imperialisme, bahkan bisa melampui atau menembus beribu ilusi yang terus dipertebal demi menutupi ketertundukan penguasa terhadap kepentingan imperialisme. Sekaligus terdapat harapan perubahan sejati bagi rakyat, bila kekuatan rakyat sendiri (dengan kaum gerakan di dalamnya) sanggup mencipta jaring perlawanan rakyat, yang luas dan semakin menyatu.

Politik rakyat miskin dalam wujud nyatanya adalah perluasan dan penyatuan perlawanan rakyat, penyatuan mobilisasi-mobilisasi rakyat dengan mengusung tuntutan dan jalan keluar persoalan ekonomi-politik rakyat. Mobilisasi ini harus terus meluas dan mengisi setiap ajang politik rakyat, dan pemilu hanya lah salah satunya. Namun apapun ekspresi politik rakyat miskin, hal utama yang tidak boleh dikompromikan adalah posisi untuk TIDAK dicampuri, TIDAK disubordinasi atau lepas dari pengaruh, dan (apalagi) TIDAK boleh dileburkan, dengan kekuatan pemerintah agen imperialis, tentara, sisa ORBA dan reformis gadungan. Ya, politik rakyat miskin adalah politik alternatif (tandingan terhadap politik pro penjajah) yang berbasiskan pada kekuatan perlawanan rakyat sendiri, dengan prinsip non-kooperasi dan non-kooptasi dalam berhadapan dengan musuh-musuh rakyat (Imperialisme dan agen-agensya)

Sesulit apapun, pembangun kekuatan perlawanan rakyat harus tetap dikerjakan, harus diatasi dan tidak boleh dihindari. Karena itu semua unsur kekuatan gerakan sebaiknya menyumbangkan strategi-taktik dan metode (yang terus bisa dikembangkan) untuk memperluas kekuatan perlawanan rakyat, membangun kesadaran politik, sekaligus mewujudkannya dalam metode perjuangan rakyat: menuntut dengan mobilisasi massa. (Dan kami, dengan rendah hati berusaha menyumbangkan metode pengorganisasian gerakan tiga bulanan yang, tentu saja harus disempurnakan kembali oleh sumbangan berbagai unsur gerakan. Lihat PEMBEBASAN, No.1, Tahun 1, Januari, 2008.) Dan, atas nama kemudahan-kemudahan untuk berkuasa (dengan alasan bisa melakukan revolusi dari atas), termasuk menjadi parlemen-mentaris-opportunis, sejatinya sudah menanggalkan arah sejati perjuangan rakyat, sudah melepaskan diri dari politik kerakyatan.

Politik (alternatif) Rakyat Miskin adalah posisi politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) sejak awal berdirinya. Politik yang meletakkan perubahan dan kemenangan rakyat dilandaskan pada kekuatan sendiri, berdasar kekuatan gerakan. Posisi politik tersebut juga lah yang ditanggalkan oleh sebagian Pimpinan PRD saat ini—yang menyebut diri sebagai kaum mayoritas dalam PRD—seiring dengan kepentingan mereka untuk meleburkan PAPERNAS (secara ideologi, politik, organisasi) ke dalam persatuan pemilu bersama partai kaum reformis gadungan dan sekutu pemerintahan agen imperialis, demi mendapatkan kesempatan masuk parlemen. Karenanya, kami, yang

menamakan diri Komite Politik Rakyat Miskin (KPRM)–PRD, adalah sebagian PRD yang menolak menanggalkan politik rakyat miskin, menolak politik parlementaris semata, yang meninggalkan gerakan ekstra parlemen— apalagi politik parlementaris-oportunis.

Politik parlementer, yang kami pahami, adalah politik yang memanfaatkan parlemen untuk memperbesar kekuatan ekstraparlemen, karena sejatinya parlemen sekarang memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk memperjuangkan rakyat miskin Indonesia, dan keterbatasan itu hanya bisa didobrak dengan kekuatan ekstraparlemen. Oleh karena itu kami MENOLAK politik parlementer (atas nama JALAN BARU – GERAKAN BANTING SETIR; MERUBAH DARI DALAM) yang mengkanalisasi potensi perjuangan rakyat hanya pada kotak-kotak suara; menumpulkan daya juang rakyat dengan ilusi 'perubahan dari atas' – 'perubahan dari parlemen'; menghancurkan alat politik (alternatif) rakyat dengan mensubordinasikannya pada partai-partai reformis gadungan; menghina martabat rakyat dengan mendudukkannya semeja dengan kekuatan Sisa- sisa Lama, Tentara, dan Reformis Gadungan. Inilah yang kami sebut sebagai politik parlementer oportunis.

KPRM–PRD berdiri memang dimulai dari paksaan (yang, dengan kekuatan otoritas-mayoritas Pimpinan PRD, ke-mudian menjadi keputusan resmi internal PRD) mendesak terjadinya perpecahan/pembelahan dalam partai atas posisi politik mendukung politik parlementaris-opurtunis atau sebaliknya; mendukung politik pembangunan gerakan rakyat. Sekarang, posisi tidak demokratik atas pembelahan oleh pimpinan (mayoritas) PRD tersebut sudah kami mengerti sebagai kelaziman yang harus mereka lakukan (sebagai konsekuensi posisi politik oportunistanya); selanjutnya, yang lebih penting bagi KPRM-PRD, adalah berposisi nyata dalam pembangunan politik (alternatif) rakyat miskin bersama kekuatan gerakan rakyat lainnya: PERSATUAN.

Namun demikian, bukan berarti KPRM-PRD berlepas tangan terhadap kehancuran politik kerakyatan PRD, karena seiring dengan dinamika pembangunan gerakan rakyat, sekaligus kami akan lanjutkan dan kuatkan perjuangan internal untuk mengembalikan PRD (dan PAPERNAS) sebagai alat perjuangan politik rakyat miskin . Karena, lewat berbagai cara yang tidak demokratik (sepihak), massa pendukung PRD dan PAPERNAS dibuat tidak (lagi) sepenuhnya mengerti dengan baik; atau tidak bisa menerima berbagai informasi dari berbagai pihak; akan kemana nasib mereka dipertaruhkan demi menjadi peserta pemilu 2009. Mereka tak (lagi) ditanya pendapatnya; dipersempit ruang perdebatannya, untuk turut menentukan arah politiknya di tahun 2009. Massa (bawah) tak diberikan pertanggungjawaban mengapa peluang 'koalisi', yang sebelumnya dikabarkan (seolah-olah) begitu besar dan nyata, ternyata gagal di tengah jalan (sebagaimana telah kami peringatkan sebelumnya); dan, bahkan kini bergerak pada 'peluang koalisi' lainnya tanpa ada kepentingan untuk mengkonsultasikan pada massa pendukungnya (melanggar janjinya sendiri: bahwa bila peluang koalisi yang pertama gagal maka akan diselenggarakan pertemuan Presidium Nasional kembali). Tentu, kami tidak boleh lepas tangan dari situasi ini.

Jakarta, 31 januari 2008
 ZELY ARIANE
 Juru Bicara

LAMPIRAN 6: HASIL KONGRES KPP-PRD KE-7, MARET 2010

Pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2010, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyelenggarakan Kongresnya yang ke-VII (tujuh) di Salatiga, Jawa Tengah. Kongres ini diikuti sekitar 100 kader/perwakilan dari 19 provinsi. Kongres ke-VII ini, disebut-sebut sebagai titik balik (*point of return*) dalam kurun empat belas tahun perjalanan PRD. Partai Rakyat Demokratik, dideklarasikan tanggal 22 Juli 1996, sempat melewati masa kritis akibat represi rezim otoriter Orde Baru. Namun, di antara tahun 1996-1998 itu, PRD tetap melakukan perlawanan dengan taktik perjuangan bawah tanah (*clandestine*).

Setelah Orde Baru ambruk, sejumlah perdebatan internal mewarnai keberadaan dan gerak PRD, baik perdebatan teoritis maupun praktis. Perdebatan menyangkut kesimpulan atas persoalan pokok masyarakat Indonesia, rumusan asas, strategi politik, strategi organisasi, dan bahkan tujuan PRD. Perdebatan-perdebatan ini kerap berujung perpecahan. Namun, saat ini coba dimaknai kembali, bahwa perdebatan-perdebatan tersebut merupakan upaya (atau jalan) untuk mencapai bentuk dan pola perjuangan partai yang terbaik, di atas kondisi-kondisi yang baru. Perdebatan-perdebatan tersebut, dan bercampur pengalaman praktisnya, telah diambil sebagai pelajaran berharga untuk merumuskan dan menatap masa depan.

Terkait pemaknaan akan hal tersebut di atas, terbersit semangat yang kuat di kalangan kader PRD untuk: (1) menghilangkan kecenderungan dogmatisme terhadap teori-teori perjuangan. (2) berupaya semakin mengenal kondisi-kondisi masyarakat Indonesia pada bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, sekalian mendalami sejarahnya, dan merumuskan solusi atas masalah-masalahnya.

Kongres PRD secara aklamasi memutuskan jawaban atas pertanyaan: apa persoalan pokok masyarakat Indonesia saat ini? Disepakati, bahwa gerak perkembangan masyarakat Indonesia, untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, terhambat oleh suatu bentuk penjajahan baru. Sejak pemilihan umum presiden tahun 2009 lalu, khalayak umum mulai mengenal hambatan/persoalan ini dengan istilah: "neoliberalisme".

Neoliberalisme, adalah sebuah sistem sosial yang menyokong penguasaan/perampasan sumber daya ekonomi (tanah/lahan/tempat tinggal, modal/uang, pasar/konsumen/pembeli, alat kerja, dan pengetahuan/teknologi) oleh modal besar yang mayoritas milik asing. Penguasaan/perampasan sumber daya ekonomi tersebut, secara cepat atau lambat, semakin menciptakan ketidakadilan sosial yang luar biasa, antara yang sangat kaya dan yang miskin, antara negeri-negeri/bangsa-bangsa yang maju dan yang terbelakang.

Di Indonesia sekarang, terdapat hampir empat puluh juta pengangguran, dan 70% dari 115 juta angkatan kerja merupakan pekerja sektor informal. Mereka adalah tenaga produktif yang sedang disia-siakan oleh negara, dalam kekuasaan politik/cengkraman neoliberalisme, sehingga juga ditelantarkan. Indonesia tertinggal dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikasi fakta ini bisa dikongkritkan, bahwa setelah 65 tahun proklamasi kemerdekaan, masih terdapat 55% angkatan kerja yang hanya menggap pendidikan pada Sekolah Dasar (SD).

Neoliberalisme turut mengancam keberadaan borjuasi (pengusaha/pemilik modal) nasional karena persaingan-persaingan sebagai sesama pengusaha/pemilik modal. Neoliberalisme berpadu dengan korupsi melahirkan penindasan struktural yang tak berperikemanusiaan dan tak berperikeadilan, khususnya terhadap golongan-golongan termiskin dalam masyarakat-yang saat ini berjumlah lebih dari 100 juta jiwa.

Persoalan-persoalan masyarakat lainnya, telah digolongkan sebagai bagian dari sistem neoliberalisme, atau terkait secara tidak langsung. Masalah budaya politik di bawah iklim liberalisme yang berpadu sisa otoritarianisme dan budaya feodalisme (seperti politik pencitraan, politik represi, dan politik uang) cukup sering disebut dalam Kongres. Juga persoalan korporat media yang memonopoli dan mengendalikan isu/materi penyiaran.

Kongres PRD juga menyimpulkan adanya gerak perubahan situasi geopolitik internasional, dari dunia unipolar (dengan sentralnya di Amerika Serikat) menuju multipolar. Indikasinya, antara lain, kemunculan potensi kekuatan-kekuatan dunia baru BIRC - Brasil, India, Rusia, dan Cina/Tiongkok, serta Amerika Latin. Tampak juga, kecenderungan kapital di banyak negeri mulai coba berlindung di balik kepentingan nasionalnya. Meski belum menampak jelas, perubahan situasi geopolitik internasional ini turut membawa dampak tertentu ke dalam negeri.

Asas PRD

Hasil penting lain adalah perubahan asas PRD, dari Sosial Demokrasi Kerakyatan menjadi Pancasila. Sosial Demokrasi Kerakyatan masih dinilai positif dalam makna perjuangan bagi demokrasi dan keadilan sosial, namun kurang mengekspresikan semangat kebangsaan/kepentingan nasional-yang telah menjadi kebutuhan obyektif. Perubahan ini tidak membawa argumentasi: "untuk menghindari stigma komunis" yang selama ini dilekatkan kepada PRD. Stigmatisasi tidak merubah kenyataan kongkrit. Lebih jauh, pilihan Pancasila sebagai asas PRD merupakan hasil pendalaman terhadap hakikat Pancasila yang dimaksud oleh pencetusnya dan pada zamannya, Soekarno.

Orde Baru menyalahgunakan Pancasila untuk menyelubungi kejahatannya. Tapi penyalahgunaan ini tidak sanggup menghapus nilai-nilai dan maksud baiknya bagi seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia. PRD memandang, nilai-nilai itu perlu kembali diangkat, dipahami, dan digunakan oleh Rakyat Indonesia, sebagai dasar pemikiran (asas) menuju cita-cita nasional. Asas tersebut ada di tengah kehidupan masyarakat Indonesia: Ketuhanan atau Spiritualitas, Kesetaraan Manusia/Internasionalisme, Kebangsaan/Nasionalisme, Demokrasi/ Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial/Sosialisme.

Usulan opsi selain Pancasila yang muncul dalam dinamika Kongres adalah: 1) Sosio Demokrasi - Sosio Nasionalisme/Bung Karnoisme; 2) Sosialisme Indonesia/Soekarnoisme; 3) Marxisme-Leninisme, dan; 4) Gotong Royong/Pluralisme Kiri.

Tujuan

Beberapa usulan berbeda sempat kembali muncul dalam pembahasan tujuan PRD. Dan pada akhirnya tujuan PRD yang diputuskan dan ditetapkan adalah "Mewujudkan masyarakat adil dan makmur, menghapuskan penindasan manusia atas manusia serta penindasan bangsa atas bangsa".

Opsi di atas unggul dalam perolehan suara terhadap beberapa usulan lain, yaitu: (1) "membangun pemerintahan persatuan nasional yang berjiwa Tri Sakti", (2)

"Membentuk pemerintahan revolusioner sementara buruh dan tani; dan (3) "Esensi Preambule/Pembukaan UUD 1945".

PRD Partai Terbuka

Kongres ke VII PRD secara aklamasi menetapkan PRD sebagai partai yang bersifat terbuka. Kesan eksklusif sempat melekat pada PRD, sebagai konsekuensi mekanisme penyaringan anggota yang ketat, serta pengaruh lanjutan dari taktik perjuangan bawah tanah di era kediktoran Orde Baru-yang tepat pada masa/situasinya. Disadari kemudian, bahwa dua belas tahun penerapan model tersebut dalam era keterbukaan politik, justru menciptakan sekat atau jarak antara Partai dengan masyarakat. Sekat ini tetap ada dan terasa, sekalipun mayoritas kader PRD terlibat aktif dalam pengorganisasian dan perjuangan masyarakat di berbagai sektor, seperti; buruh, petani, rakyat miskin perkotaan, pedagang/pengusaha kecil, mahasiswa, pencari kerja, pekerja paruh waktu, profesional, seniman dan budayawan.

Keputusan menjadi partai terbuka adalah upaya menghilangkan jarak atau sekat tersebut. Dengan demikian, tiap-tiap warga atau rakyat Indonesia yang setuju pada asas, tujuan, serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PRD dapat menjadi anggota. Dalam kongres sempat tergambarkan konsep untuk menjalankan mekanisme organisasi yang demokratis, dalam mengolah hak dan kewajiban tiap-tiap kader dan anggotanya. Konsep ini akan dielaborasi lebih jauh, agar dapat merajut potensi yang ada menjadi kesatuan perjuangan yang berhari depan. Baik perjuangan di lapangan elektoral maupun di lapangan non-elektoral.

PRD bertekad membangun basis-basis konstituen secara berkelanjutan, dan kaderisasi untuk melahirkan calon-calon pemimpin di tingkat lokal maupun nasional. Capaian pengorganisasian tersebut akan dilaporkan secara reguler kepada seluruh kader dan anggota. PRD tetap dan akan berupaya menjalin kerjasama sebaik-baiknya dengan kekuatan politik nasional lain dalam perjuangan menghadapi neoliberalisme.

Struktur dan Pengurus/Kepemimpinan

Kongres menetapkan struktur badan penyusun PRD terdiri atas: Kongres (sebagai badan pengambil keputusan tertinggi), berikut Presidium Nasional (Presnas), Komite Pimpinan Pusat (KPP), Komite Pimpinan Wilayah (KPW), Komite Pimpinan Kabupaten/Kota (KPK), Komite Pimpinan Kecamatan (KPC), Komite Pimpinan Desa (KPD) dan Komite Pimpinan Kelurahan (KPL).

Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jenderal Presidium Nasional (Presnas), yang sekaligus menjabat Ketua dan Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat PRD telah dilangsungkan. Pencalonan bersistem paket ini akhirnya dimenangkan oleh pasangan Agus Jabo Priyono sebagai Ketua, dan I Gede Sandra sebagai Sekretaris Jenderal. Kepemimpinan terpilih mencerminkan perpaduan dua generasi dalam PRD. Agus Jabo Priyono, awalnya seorang aktivis mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret - Solo (UNS) dekade 1990-an, yang turut menjadi pendiri PRD. I Gede Sandra adalah aktivis politik, alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2005. Paket ini unggul pada putaran kedua pemilihan, atas dua paket lainnya yaitu: Agus Jabo Priyono (calon Ketua) - Binbin Firman Tresnadi (calon Sekjen), dan paket Lalu Hilman Afriandi (calon Ketua) - I Gede Sandra (calon Sekjen). Sejumlah nama lainnya sempat meramaikan putaran pertama sebagai calon Ketua dan Sekjen PRD. Mereka antara lain Marlo Sitompul, Data Brainata, Yulia Evina Bhara, dan Rudi Hartono (mengundurkan diri dari pencalonan).

LAMPIRAN 7: STATEMENT SOLIDARITAS KPRM PRD UNTUK KONGRES I LMND PRM

Hidup rakyat!

Hidup Mahasiswa yang melawan!

Hidup Mahasiswa yang belajar sambil melawan!

Salam Pembebasan,

Salam Politik Rakyat Miskin

1. Terima kasih atas militansi kawan-kawan hingga dapat hadir dalam kongres perdana LMND PRM ini.
2. Hari ini aku berani berkesimpulan, bahwa kawan-kawan yang berhasil hadir di sini, dari ujung Timur Ternate-Ambon hingga ujung Barat Sumatera Utara, bukanlah kawan-kawan yang datang untuk berwisata, temu kangen, atau kewajiban semata. Aku berani beranggapan bahwa kawan-kawan adalah bagian termaju dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia, yang datang untuk memberikan sumbangan pemikiran sebanyak-banyaknya bagi strategi dan taktik perbesaran gerakan mahasiswa yang menguntungkan pembebasan rakyat.
3. Mayoritas kawan-kawan adalah generasi baru pasca 1998. Generasi yang semakin jauh dari atmosfer revolusioner penjatuhan kediktatoran; jauh dari heroisme pergerakan. Apalagi para aktivis revolusioner dan aktivis gerakan reformasi pun semakin banyak yang mengkhianati janji-janji reformasi, berebut menjadi alas kaki musuh-musuh rakyat—perpecahan yang kita alami dua tahun lalu adalah salah satu wujud nyatanya. Di tengah situasi ini, generasi 'biru' itu juga digempur habis-habisan oleh liberalisasi penyebab kemiskinan dan ketiadaan lapangan kerja di satu sisi, dan kebudayaan dekaden, hedon ala sinetron Indonesia di sisi lain. Sementara, tepat seperti ujaran Lenin: "Sekolah-sekolah kuno memproduksi pelayan-pelayan yg dibutuhkan oleh kapitalis; sekolah-sekolah kuno merubah makhluk pengetahuan menjadi makhluk yg harus menulis dan mengatakan apapun yang diinginkan kapitalis... Masyarakat lama berdasar atas prinsip: merampok atau dirampok; bekerja untuk orang lain atau membuat orang lain bekerja untuk anda; menjadi pemilik budak atau menjadi budak" Ya, di sekolah-sekolah kuno lah kalian berada kini.
Dan seperti inilah situasi yang akan semakin menghancurkan tenaga produktif muda Indonesia. Sebuah situasi yang disebabkan oleh kejahatan kapitalisme.
4. Namun, generasi baru ini juga hidup di tengah aksi-aksi spontan rakyat yang tak berjeda; meluasnya bacaan-bacaan kiri—yang tak kan sanggup dibredel lebih jauh oleh pemerintah—dan transparansi informasi, yang memberikannya landasan menjadi individu-individu kritis; semakin banyak dan kreatifnya upaya-upaya persatuan. Di dalam arus segala macam informasi itu mereka juga dapat menyaksikan bahwa dunia sedang berubah; kapitalisme mulai jatuh kredibilitasnya akibat krisis dan sedang dilawan secara besar-besaran di Amerika Latin dipimpin oleh Kuba dan Venezuela.
5. Di masa inilah, sebenarnya, mahasiswa, dan orang-orang muda Indonesia diterangkan jalannya, seterang-terangnya: bahwa, masa depan hidupnya hanya akan lebih baik, bahagia, dan bernilai, jika mereka berani berontak melawan sepiunya dunia akademik; jahatnya kapitalisme; dan busuknya para elit politik musuh-musuh rakyat. Hanya pemberontakan yang membuat mereka menjadi semakin pandai dan

bermanfaat bagi orang banyak: rakyat miskin Indonesia. Hanya pemberontakan yang membuat mereka dapat menjadi bagian dari kelas pekerja produktif dan termaju: membangun SOSIALISME. Inilah yang kita sebut sebagai Revolusi.

6. Revolusi adalah perubahan kepemilikan—kita rebut apa yang secara sepihak dimiliki oleh kapitalis. Revolusi juga menjungkirbalikkan kekuasaan—kita gulingkan kekuasaan borjuasi komprador kapitalisme. Dan Revolusi adalah perubahan kebudayaan dan kesadaran—kita tinggalkan kebudayaan-kebudayaan purba produk dari sekolah-sekolah kuno yang anti demokrasi, anti solidaritas, anti rakyat miskin, anti pembebasan perempuan.
7. Mari kita jalankan Revolusi sejak sekarang; sejak dalam pikiran hingga tindakan. Mari kita ubah kesadaran dengan BELAJAR dari sekolah-sekolah progresif; sekolah kehidupan; sekolah perjuangan; sekolah pembebasan; sekolah pemberontakan. Di dalam sekolah ini kita akan belajar dan berjuang menjadi partisipan perjuangan pembebasan dari para penghisap. Dan LMND-PRM (atau apapun nama baru yang akan kawan-kawan sepakati nanti) adalah salah satu dari sekolah-sekolah itu.
8. Seperti kata Lenin, kita tak dapat lagi kembali ke sekolah-sekolah kuno, pengajaran-pengajaran kuno, pelatihan dan pendidikan kuno, apabila mereka membatasi hanya pada ruang sekolah dan dipisahkan dari proses kehidupan. Sepanjang para buruh dan tani ditindas oleh para tuan tanah dan kapitalis, dan sepanjang sekolah dikendalikan oleh para tuan tanah dan kapitalis, maka generasi muda akan tetap buta dan bodoh. Jikalau pun kita masih berada dalam sekolah-sekolah itu, maka, tugas kita pun menjadi lebih jelas: MELAWAN.
9. Di penghujung sambutan provokasiku ini, aku mengajak kawan-kawan semua untuk berfikir lebih dalam dan berani, bahwa perjuangan yang sedang kawan-kawan lakukan bukanlah batu loncatan karir; bukan ajang aktualisasi diri; bukan ajang unjuk gigi. Perjuangan ini mempertaruhkan hidup; menghadapkan kawan-kawan pada pilihan-pilihan sulit; membunuh pamrih-pamrih individual; dapat memisahkan kawan-kawan dari orang tua, kekasih, dan orang-orang yang dicintai lainnya, demi sebuah kebenaran dan kebahagiaan lebih banyak manusia. Perjuangan ini adalah pilihan hidup!
10. Kembali aku mengutip Lenin dalam Tugas-tugas Liga Pemuda: "Kita harus mengorganisir semua kerja, tanpa peduli seberapa besar penderitaan yang mungkin dihadapi, sehingga setiap buruh dan tani akan berkata: 'Saya adalah bagian dari angkatan kerja yang bebas, dan akan mampu membangun kehidupan kita tanpa tuan tanah dan kapitalis...'"
11. Selamat berkongres! Jangan hanya menggantung pakaian kotor. Jangan hanya duduk diam menghabiskan kopi. Bicara, berposisi dan berdebatlah. Temukan jalan keluar revolusioner dari setiap hambatan perjuangan.

YOGYAKARTA,
11 Maret 2010
Zely Ariane
(Juru Bicara)